



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT
NOMOR 5 TAHUN 2012**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2011-2030**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI RAJA AMPAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Raja Ampat memerlukan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang sebagai pedoman dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Raja Ampat dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang dapat terarah, berkesinambungan, efektif dan efisien, serta dapat menjadi acuan Kepala Daerah terpilih pada periode berikutnya dalam menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. bahwa sesuai amanat dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011-2030;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
13. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
14. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
16. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
17. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
30. Peraturan Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 09 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Tahun 2006-2011;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Raja Ampat (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Distrik, Kelurahan dan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 60);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 67);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 68);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 69);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 Nomor 81);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor..... tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Raja Ampat.....;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT

DAN

BUPATI RAJA AMPAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2011-2030.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Raja Ampat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Raja Ampat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Raja Ampat sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Raja Ampat.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan, Kantor, Unit Satuan Kerja, dan Distrik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011-2030, yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten Raja Ampat adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2030.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Raja Ampat tahun 2011-2015 yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Raja Ampat adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD, RPJP Provinsi Papua Barat serta memperhatikan RPJMN.
11. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan untuk periode 1 (satu) Tahun.

12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Raja Ampat untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
16. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun.
18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
19. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
20. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
21. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Raja Ampat.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

Program pembangunan Daerah periode tahun 2011-2030 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD Kabupaten Raja Ampat.

Pasal 3

- (1) RPJPD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011-2030 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program dengan berpedoman pada RPJPN serta memperhatikan RPJMN.
- (2) RPJPD Kabupaten Raja Ampat adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2030.
- (2) RPJPD Kabupaten Raja Ampat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan mengacu pada RPJPN.
- (3) RPJPD Kabupaten Raja Ampat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi dan program Bupati.
- (4) Periodisasi pembangunan jangka panjang daerah dibagi dalam tahapan pembangunan jangka menengah dengan tahun perencanaan yang disesuaikan dengan masa jabatan Bupati.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari terjadinya kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang menjabat pada tahun terakhir jabatannya, diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode jabatan Bupati berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode jabatan Bupati berikutnya.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 5

Sistematika penyusunan RPJPD adalah sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
- BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH
- BAB V : SASARAN, ARAH KEBIJAKAN, DAN PRIORITAS TAHAPAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
- BAB VI : KAIDAH PELAKSANAAN

Pasal 6

Isi beserta uraian RPJPD Kabupaten Raja Ampat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD.
- (2) Tata Cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Peraturan Daerah ini akan ditinjau kembali apabila dalam pelaksanaannya terdapat perubahan kebijakan dan/atau perubahan Peraturan Perundang-undangan, yang mengatur tentang sistem perencanaan pembangunan dan penataan ruang wilayah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan mempunyai daya laku terhitung sejak bulan Januari tahun 2011

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat.

Ditetapkan di Waisai
Pada tanggal 22 Oktober 2012

**BUPATI RAJA AMPAT,
CAP/TTD
MARCUS WANMA**

Diundangkan di Waisai
Pada Tanggal 22 Oktober 2012
**SEKRETARIS DAERAH KAB. RAJA AMPAT,
CAP/TTD**

**Drs. FERDINAND DIMARA, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA IV/c
NIP. 19571212 198303 1 031**

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

MOHLIYAT MAYALIBIT, SH
PENATA
NIP. 19791020 200312 1 007



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT

NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2011-2030

I. UMUM

Pembangunan Nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, guna meningkatkan taraf hidup masyarakat dari generasi ke generasi berikutnya. Perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, disusun secara berjenjang dalam bentuk jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Oleh karena itu, untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Pemilihan Bupati secara langsung pada setiap periode lima tahunan, juga menjadi salah satu pertimbangan utama pentingnya penyusunan rencana pembangunan daerah secara berkesinambungan. Mengingat akan pentingnya rencana pembangunan dalam dimensi jangka panjang, serta memenuhi amanat dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan amanat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, maka Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menyusun RPJPD dalam kurun waktu Tahun 2011-2030. RPJPD Kabupaten Raja Ampat adalah merupakan dokumen perencanaan pembangunan merupakan perwujudan dari visi, misi Kabupaten Raja Ampat untuk masa 20 tahun ke depan, yakni dimulai dari tahun 2011-2030. Pelaksanaan RPJPD 2011-2030 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan secara periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang bersifat 5 (lima) tahunan.

RPJPD Kabupaten Raja Ampat digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJMD Kabupaten Raja Ampat pada masing-masing tahapan sesuai dengan visi, misi dan program Bupati yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJMD tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam RKPD dan merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penetapan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2011-2030 adalah :

- a. untuk mendukung terciptanya proses koordinasi secara intensif antar pelaku pembangunan, sehingga tujuan pembangunan daerah dapat tercapai ;
- b. untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang dan antar waktu serta antar fungsi pemerintah baik Pusat maupun Daerah.
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara terpadu.
- d. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya yang tersedia secara efisien, efektif, bertanggungjawab, berkeadilan dan berkelanjutan.
- e. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan lainnya yang peduli terhadap proses-proses pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Sehubungan dengan penjelasan sebagaimana dikemukakan diatas, maka sangat perlulah memproduksi suatu perangkat dalam bentuk peraturan daerah yang mengatur tentang RPJPD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 -2030.

II. Pasal demi pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Visi Kabupaten Raja Ampat periode tahun 2011-2030 adalah “**Raja Ampat sebagai Kabupaten Bahari yang Mandiri, Adil dan Makmur serta berkelanjutan**” yang dijabarkan kedalam Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan;
2. Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
3. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan; dan
4. Mengembangkan ekonomi kelautan secara berkelanjutan yang ditopang oleh potensi ekonomi lainnya berbasis masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

AMPIRAN :PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT
LAMPIRAN :PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT
NOMOR : TAHUN 2012
TANGGAL : 2012

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2011-2030

BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3. Hubungan Antar Dokumen	10
1.4. Sistematika Penulisan	12
1.5. Maksud dan Tujuan	13
BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	15
2.1. Aspek Geografis dan Demografis	16
2.1.1. Karakteristik lokasi dan wilayah	16
2.1.1.1. Luas dan batas wilayah administrasi	16
2.1.1.2. Letak dan kondisi geografis	18
2.1.1.3. Topografi	19
2.1.1.4. Geologi	20
2.1.1.5. Hidrologi	21
2.1.1.6. Klimatologi	23
2.1.1.7. Penggunaan lahan	23
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah	24
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana	25
2.1.4. Demografi	29
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	32
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	32
2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB	32
2.2.1.2. Laju Inflasi Provinsi	33
2.2.1.3. PDRB Perkapita	34
2.2.1.4. Pemerataan Pendapatan, Ketimpangan dan Angka Kriminalitas	34
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	35
2.2.2.1. Angka Melek Huruf	35
2.2.2.2. Rata-rata Lama Sekolah, Partisipasi Kasar dan Partisipasi Murni	36
2.2.2.3. Angka Usia Harapan Hidup	38
2.2.2.4. Presentase Balita Gizi Buruk	38

2.2.2.5. Angka Kesakitan	39
2.2.2.6. Kepemilikan Lahan dan Ketenaga kerjaan	40
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah raga	40
2.3. Aspek Pelayanan Umum	41
2.3.1. Pendidikan	41
2.3.2. Kesehatan	46
2.3.3. Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Perhubungan	49
2.3.4. Penataan Ruang dan Perencanaan Pembangunan	53
2.3.5. Lingkungan Hidup, Pertanahan, ESDM, dan Kehutanan	56
2.3.6. Ketenagakerjaan, Kependudukan Catatan Sipil dan Ketrasmigrasian	60
2.3.7. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	64
2.3.8. Sosial dan Kebudayaan	68
2.3.9. Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Penanaman Modal	69
2.3.10. Kepemudaan dan Olah Raga	72
2.3.11. Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	73
2.3.12. Ketahanan Pangan dan Pertanian	74
2.3.13. Komunikasi dan Informatika, Kearsipan, Perpustakaan dan Statistik	77
2.3.14. Pariwisata	79
2.3.15. Kelautan dan Perikanan	81
2.3.16. Kehutanan	86
2.4. Aspek Daya Saing Daerah	88
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	88
2.4.2. Fokus Fasilitas dan Infrastruktur Wilayah	89
2.4.2.1. Perhubungan	89
2.4.2.3. Air Bersih	92
2.4.2.4. Komunikasi dan Informatika	93
2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi	93
2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia	93
BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS	95
3.1. Potensi dan Peluang Pembangunan	96
3.2. Permasalahan Pembangunan	105
3.3. Isu-isu Strategis	116

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH	
4.1. Visi	119
4.2. Misi	121
4.2.1. Mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	122
4.2.2. Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	122
4.2.3. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	123
4.2.4. Mengembangkan Ekonomi Kelautan Secara Berkelanjutan yang Ditopang Oleh Potensi Ekonomi Lainnya Berbasis Masyarakat	124
BAB V SASARAN, ARAH KEBIJAKAN, DAN PRIORITAS TAHAPAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH	125
5.1. Sasaran dan Arah Kebijakan	126
5.1.1. Misi Pertama : Mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	128
5.1.1.1. Tersedianya Infrastruktur Dasar yang Mendukung Percepatan dan Pemerataan Pembangunan	128
5.1.1.2. Tersedianya infrastruktur pelayanan publik dasar khususnya pendidikan dan kesehatan secara proporsional, berkualitas dan dapat diakses masyarakat	129
5.1.1.3. Tersedianya sistem Perencanaan dan Kebijakan Dasar Pembangunan yang Mampu Mendorong Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan secara Berkelanjutan	130
5.1.2. Misi Kedua : Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	133
5.1.2.1. Meningkatnya derajat pendidikan dan ketrampilan penduduk	134
5.1.2.2. Meningkatnya derajat kesehatan penduduk	135
5.1.2.3. Meningkatnya keadilan gender dan perlindungan anak.	136
5.1.2.4. Meningkatnya jiwa kewirausahaan (entrepreneurship)	137
5.1.2.5. Meningkatnya jaminan perlindungan dan kesejahteraan sosial masyarakat.	138
5.1.3. Misi Ketiga : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	140
5.1.3.1. Meningkatnya akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam menyelenggarakan pembangunan	140
5.1.3.2. Meningkatnya profesionalitas aparatur pemerintah	142
5.1.4. Misi Keempat : Mengembangkan Ekonomi Kelautan Secara Berkelanjutan yang Ditopang Oleh Potensi Ekonomi Lainnya Berbasis Masyarakat	145
5.1.4.1. Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya kelautan	145
5.1.4.2. Meningkatnya kapasitas dan sinergi lembaga pengelola industri pariwisata	146
5.1.4.3. Meningkatnya dukungan sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan serta industri dan perdagangan terhadap perekonomian daerah	147
5.1.4.4. Meningkatnya efektivitas penegakan prinsip pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan	148
5.2. Tahapan dan Prioritas	151
5.2.1. RPJMD Ke-1 (2011-2015)	151
5.2.2. RPJMD Ke-2 (2016-2020)	151
5.2.3. RPJMD Ke-3 (2021-2025)	152
5.2.4. RPJMD Ke-4 (2026-2030)	152

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Peta Administratif Kabupaten Raja Ampat	17
Gambar 2.2.	Peta Indeks Ancaman Bencana Tsunami di Indonesia	26
Gambar 2.3.	Peta Zonasi Ancaman Bencana Gerakan Tanah di Papua Barat	28
Gambar 2.4.	Peta Kerawanan Bencana Angin di Indonesia	29
Gambar 2.5.	Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2010	32
Gambar 2.6.	Angka Melek Huruf dan Buta Huruf di Raja Ampat 2007-2010	36
Gambar 2.7.	Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Tahun 2010	37
Gambar 2.8.	Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010	39
Gambar 2.9.	Alokasi Anggaran Bidang Pendidikan di Kabupaten Raja Ampat Tahun 2006-2010	46
Gambar 2.10.	Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Raja Ampat	49
Gambar 5.1.	Tahapan dan Prioritas Capaian Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011-2030	127

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Luas Daerah, Jenis Kelamin dan Kepadatannya Kondisi Bulan Maret 2011-2030	
Tabel 2.2.	Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kabupaten Raja Ampat Tahun 2006-2010	42
Tabel 2.3.	Banyaknya Sekolah, Guru dan Murid Dirinci Menurut Jenis Tingkat Pendidikan Tahun 2010	43
Tabel 2.4.	Pemerataan Sekolah di Masing-Masing Distrik Tahun 2010	44
Tabel 2.5.	Jumlah Fasilitas Kesehatan	47
Tabel 2.6.	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan	50
Tabel 2.7.	Rencana Pengembangan Kawasan di Kabupaten Raja Ampat	55
Tabel 2.8.	Pembangunan Rumah Bagi Transmigran Lokal	64
Tabel 2.9.	Hasil Produktivitas Pertanian Tahun 2010	75
Tabel 2.10.	Rencana Pengembangan Sistem Komunikasi	78
Tabel 2.11.	Jumlah Kunjungan Wisata Raja Ampat	81
Tabel 1.16.	Luas Kawasan Hutan Kabupaten Raja Ampat	87
Tabel 2.12.	Fasilitas Hotel/Losmen/Cottage/Resort, Kamar, Tempat Tidur, Desa Wisata, dan Spot Diving PerKecamatan di Kabupaten Raja Ampat 2010	91
Tabel 5.1.	Target dan Tahapan Capaian Misi 1 : Mewujudkan Percepatan dan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan dan berkelanjutan	132
Tabel 5.2.	Target dan Tahapan Capaian Misi 2 : Mewujudkan Sumber daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	139
Tabel 5.3.	Target dan Tahapan Capaian Misi 3 : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	144
Tabel 5.4.	Target dan Tahapan Capaian Misi 4 : Mengembangkan Ekonomi Kelautan Secara Berkelanjutan yang Ditopang Oleh Potensi Ekonomi Lainnya Berbasis Masyarakat	150
Tabel 5.5.	Tahapan dan Prioritas RPJPD Kabupaten Raja Ampat	154

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Raja Ampat dengan ibu kota Waisai merupakan Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Sorong yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua. Sebagaimana yang dihadapi oleh daerah otonom baru dikawasan Timur Indonesia, Kabupaten Raja Ampat dihadapkan pada realitas keterbatasan dalam berbagai aspek terutama infrastruktur, sumberdaya manusia, dan kapasitas pemerintahan serta tantangan kondisi geografis. Namun demikian, Kabupaten Raja Ampat memiliki kekayaan alam yang berlimpah serta potensi wisata bahari dan budaya yang luar biasa besar. Di tengah segala keterbatasan dan keberlimpahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dengan otonomi yang dimiliki dituntut untuk mampu mengaktualisasikan potensi-potensi yang dimilikinya guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat seraya menjaga keberlanjutannya. Keberlanjutan menjadi aspek penting dalam pembangunan meskipun harus diakui tidak mudah menemukan titik keseimbangan antara percepatan pembangunan dengan kelestarian lingkungan. Pemenuhan kedua hal tersebut sering kali harus berakhir pada situasi *zero sum*, yaitu optimalisasi satu aspek mengakibatkan pengorbanan pada aspek yang lain. Dalam konteks Raja Ampat, mengingat kelestarian lingkungan merupakan kunci masa depan pariwisata Raja Ampat maka upaya menemukan titik keseimbangan antara keberlanjutan dengan menghasilkan pendapatan daerah (*income generating*) menjadi sangat penting.

Guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat seraya menjaga keberlanjutannya, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat memerlukan perencanaan yang bersifat strategis, berkelanjutan, dan komprehensif untuk dapat mengelola kelemahan, potensi, dan peluang yang dimilikinya agar dapat memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakatnya. Dengan demikian penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2011-2030 ini bukan sekedar menjalankan amanat peraturan perundangan akan tetapi merupakan kebutuhan untuk mensinergikan agenda pembangunan Daerah dengan agenda pembangunan Nasional dan Regional sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan hukum yang paling utama dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Raja Ampat tahun 2011-2030. RPJPD ini juga menjadikan sejumlah regulasi sebagai landasan hukum operasionalnya, yaitu terdiri dari :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
13. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
15. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Distrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 9 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Tahun 2006-2011;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 1);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Raja Ampat (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Distrik, Kelurahan dan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 60);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 67);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 68);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 69);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 Nomor 81).

1.2. Hubungan Antar Dokumen

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) memerintahkan penyusunan RPJP menganut paradigma perencanaan yang visioner dan tanggap terhadap perubahan. Oleh karena itu RPJPD Kabupaten Raja Ampat hanya memuat arahan secara garis besar untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang terbagi dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 5 (lima) tahunan yaitu RPJMD ke-1 (2011-2015), RPJMD ke-2 (2016-2020), RPJMD ke-3 (2021-2025), dan RPJMD ke-4 (2026-2030). Selain itu, sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, dokumen RPJPD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011-2030 tidak terlepas dari RPJP Nasional Tahun 2005-2025. Adapun visi pembangunan nasional yang mencakupi kurun waktu mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2025 adalah “**Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur**”. Visi RPJPN tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi yang terdiri dari :

- (1) mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila,
- (2) mewujudkan bangsa yang berdaya-saing,
- (3) mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum,
- (4) mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu,
- (5) mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan,
- (6) mewujudkan Indonesia asri dan lestari,
- (7) mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional,
- (8) mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Jadi apa yang menjadi misi pembangunan nasional tersebut merupakan salah satu sumber acuan penyusunan RPJPD Kabupaten Raja Ampat tahun 2011-2030 untuk menentukan identifikasi isu-isu strategis, di samping sumber-sumber lain dalam rangka identifikasi peluang dan tantangan bagi daerah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang akan datang. Agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka panjang Kabupaten Raja Ampat dengan daerah-daerah lain terkait, penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Raja Ampat juga harus memperhatikan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota daerah sekitarnya. Ini dilakukan dalam rangka mensinkronkan kepentingan strategis yang harus disinergikan, menemukan persamaan permasalahan pembangunan yang memerlukan upaya pemecahan bersama, dan menentukan agenda pembangunan kewilayahan yang menjadi kewenangan bersama sebagai bagian dari kesatuan wilayah atau kawasan pembangunan. Dengan demikian dokumen RPJPD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011-2030 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang mengacu pada dokumen RPJPN dan telah dipadukan dengan dokumen RPJPD daerah sekitarnya serta proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan.

1.3. Sistematika Penulisan

RPJPD Kabupaten Raja Ampat ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini berisi uraian latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya, serta sistematika dokumen RPJPD Kabupaten Raja Ampat agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Bab 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah, serta aspek lainnya yang menjadi indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Bab 3 Analisis Isu-isu Strategis

Bab ini menjelaskan butir-butir potensi dan peluang, permasalahan, serta isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam pembangunan daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Bab 4 Visi dan Misi Daerah

Bab ini memaparkan rumusan Visi dan Misi yang hendak dicapai dari hasil pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun mendatang di Kabupaten Raja Ampat.

Bab 5 Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Bab ini berisi uraian sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah berdasarkan setiap misi yang dirumuskan dalam bentuk arah kebijakan ke dalam pentahapan pembangunan 5 (lima) tahunan selama 20 (dua puluh) tahun dan prioritas masing-masing tahapan.

Bab 6 Kaidah Pelaksanaan

Pada bagian ini diuraikan langkah-langkah pelaksanaan dari visi misi dan arah kebijakan yang telah disusun dalam dokumen RPJPD yaitu mulai dari sosialisasi, implementasi, monitoring dan evaluasi.

1.4. Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011-2030, selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten Raja Ampat, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2030. Maksud disusunnya RPJPD ini adalah guna memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita, tujuan daerah dan nasional serta sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya. Selain itu juga RPJPD ini menjadi acuan daerah dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron, dan sinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Kabupaten Raja Ampat. Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya RPJPD Kabupaten Raja Ampat ini adalah :

- (1) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah,
- (2) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan,
- (3) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan,
- (4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan
- (5) menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan Raja Ampat sebagai kabupaten bahari yang mandiri, adil dan makmur, serta berkelanjutan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Rencana pembangunan jangka panjang daerah dapat diformulasikan dengan baik apabila informasi mengenai kondisi daerah dapat teridentifikasi dan terdeskripsikan dengan baik. Deskripsi kondisi daerah menjadi basis penyusunan rencana pembangunan daerah, yaitu memberikan landasan bagi analisis lingkungan dan perumusan isu-isu strategis. Deskripsi mengenai kondisi daerah pada Bab ini terbagi ke dalam empat aspek, yaitu aspek geografis dan demografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Tiga aspek yang disebutkan terakhir lebih banyak memaparkan apa yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan capaian-capaian yang relevan dengan masing-masing aspek.

2.1. Aspek Geografis dan Demografis

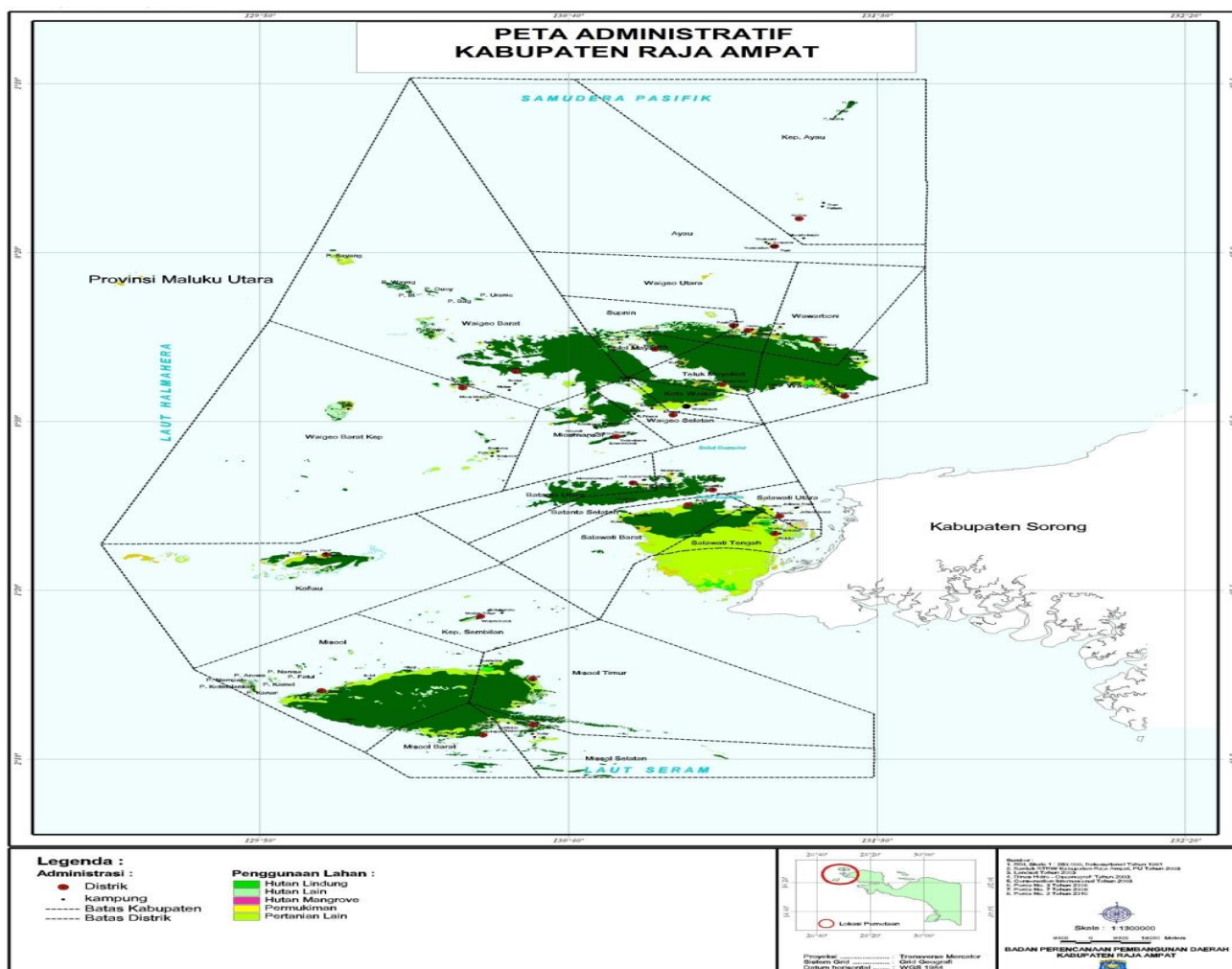
2.1.1. Karakteristik lokasi dan wilayah

2.1.1.1. Luas dan batas wilayah administrasi

Kabupaten Raja Ampat merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Sorong dan termasuk salah satu dari tujuh kabupaten baru di Provinsi Papua Barat. Meskipun sejak tahun 2002 Kabupaten Raja Ampat ditetapkan sebagai kabupaten baru namun penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten ini baru berlangsung efektif pada 16 November 2005. Pada awalnya Kabupaten Raja Ampat hanya terbagi menjadi tujuh distrik, kemudian berkembang menjadi tiga belas distrik. Perkembangan terbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 2 Tahun 2010 Kabupaten Raja Ampat terbagi menjadi menjadi 24 (dua puluh empat) distrik, 4 (empat) kelurahan, dan 124 (seratus dua puluh empat) desa. Secara administratif batas wilayah Kabupaten Raja Ampat terdiri dari :

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Republik Federal Palau, Samudera Pasifik;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Seram Utara, Provinsi Maluku;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara; dan
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Kota Sorong dan Kabupaten Sorong.

Gambar 2.1. Peta Administratif Kabupaten Raja Ampat



2.1.1.2. Letak dan kondisi geografis

Secara geografis, Kabupaten Raja Ampat terletak di bawah garis Katulistiwa, antara 0° 14's dan 130° 31'e. Sedangkan secara geostrategis, Kabupaten Raja Ampat memiliki peranan penting sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan wilayah luar negeri yaitu Pulau Fani yang terletak di ujung paling utara berbatasan langsung dengan Republik Palau.

Kabupaten Raja Ampat terletak di jantung pusat segitiga karang dunia (*Coral Triangle*) dan merupakan pusat keanekaragaman hayati laut tropis terkaya di dunia saat ini. Kabupaten Raja Ampat memiliki kekayaan dan keunikan spesies dengan ditemukannya 1.104 jenis ikan, 699 jenis moluska (hewan lunak) dan 537 jenis hewan karang. Kabupaten Raja Ampat juga terdiri dari hamparan padang lamun, hutan mangrove, dan pantai tebing berbatu yang indah. Potensi menarik lainnya adalah pengembangan usaha ekowisata dan wilayah ini telah diusulkan sebagai Lokasi Warisan Dunia (*World Heritage Site*) oleh Pemerintah Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Kabupaten Raja Ampat sebagai wilayah kepulauan memiliki wilayah daratan seluas 8.034,44 km² dan pada umumnya didominasi oleh perbukitan yang masih dipenuhi dengan hutan alami. Sedangkan wilayah pesisir memiliki karakteristik yang beragam seperti pantai landai berpasir hitam dan berpasir putih dengan terumbu karang yang masih alami. Pada sebagian wilayah pulau terdapat pegunungan dengan lereng-lereng yang curam, seperti di Pulau Batanta, Pulau Waigeo dan Pulau Salawati.

Ketinggian daerah pegunungan ini dapat mencapai 100-300 meter di atas permukaan laut (dpl). Wilayah dengan ketinggian di bawah 100 meter dpl pada umumnya terdapat pada Pulau Salawati bagian selatan.

2.1.1.3. Topografi

Kabupaten Raja Ampat memiliki empat pulau besar yaitu Pulau Waigeo, Batanta, Salawati dan Misool. Masing-masing pulau memiliki karakteristik topografi yang berlainan, yaitu :

- Pulau Waigeo merupakan pulau yang sebagian besar topografinya bergunung dan berbukit pada bagian poros tengah sampai ke daerah pesisir. Selain itu juga terdiri dari pasir dan karang-karang batu. Pulau Waigeo dikelilingi pulau-pulau yang berukuran sedang dan kecil yang sebagian besar di antaranya telah dihuni oleh penduduk. Bagian barat dan selatan Pulau Waigeo lebih banyak dikelilingi oleh pulau-pulau lain apabila dibandingkan dengan bagian timur dan utara.
- Pulau Batanta sebagian besar topografinya terdiri dari pegunungan dan perbukitan yang memanjang dari bagian tengah sampai pesisir. Pada bagian pesisir jarang ditemukan pasir putih. Pulau ini hanya dikelilingi oleh delapan pulau kecil.
- Pulau Salawati dikelilingi oleh pulau-pulau kecil terutama pada bagian selatan dan timur. Dari bagian tengah sampai dengan pesisir dikelilingi oleh gunung dan perbukitan yang membujur ke semua arah.
- Pulau Misool memiliki topografi yang hampir sama dengan ketiga pulau besar lainnya. Pada bagian barat dan selatan dikelilingi oleh pulau-pulau kecil. Sedangkan bagian utara terbentang pulau-pulau kecil yang membujur dari arah timur ke barat yang jarak tempuhnya dari Pulau Misool lebih dari satu jam. Bagian tengah terdapat pegunungan dan pada bagian pesisir terdapat bukit-bukit berbatuan terutama pada bagian barat dan selatan Pulau Misool. Di luar empat pulau besar tersebut, terdapat pulau-pulau berukuran sedang dan kecil. Berdasarkan survei Toponim antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat, terdapat lebih dari 1.830 pulau – pulau kecil. Pulau-pulau tersebut hanya terdiri dari batu karang sehingga masyarakat yang bertempat tinggal di sana hanya memiliki pilihan untuk bekerja sebagai nelayan dan tidak bisa bercocok tanam seperti penduduk di Distrik Salawati.

2.1.1.4. Geologi

Kondisi geologi Kabupaten Raja Ampat didominasi oleh formasi batuan kapur yang terbentuk pada masa kuartar. Jenis tanah yang ada disusun oleh batuan das, neogen dan batu gamping yang membentuk bukit-bukit rendah. Pada umumnya batu gamping tersebut bersifat padat dan mengandung pasir seperti batu gamping facet, damar, atkari, zaag, openta, sagewin, dan bogal. Sumber utama batu gamping berasal dari terumbu gamping yang berasal dari binatang laut. Perbedaan posisi pembentukan batuan ini menimbulkan perbedaan dalam proses sedimentasinya sehingga terbentuk berbagai macam batu gamping tersebut. Jenis batuan lain di wilayah Kabupaten Raja Ampat adalah batuan sedimen, konglomerat yang komposisinya terdiri dari bahan yang tahan lapuk berupa konglomerat aneka bahan. Batuan breksi yeffman dengan butiran yang lebih besar, fragmen menyudut yang umumnya terdiri dari fragmen batuan hasil rombakan, dalam massa dasar yang lebih halus atau tersemenkan. Golongan batuan sedimen berupa pasir juga terdapat di wilayah ini, dengan jenis batu pasir damar. Selain itu juga terdapat batuan sedimen serpih yang mempunyai sifat seperti lempung. Batuan serpih dimana pada bidang-bidang lapisan memperlihatkan belahan yang menyerpih dengan klasifikasi serpih letita. Beberapa formasi batuan yang terdapat di wilayah Raja Ampat adalah Formasi Yaben, Formasi Klasafet, Formasi Waigeo, Formasi Rumai, Formasi Yarefi, Formasi Demu dan Formasi Fafanlap. Batumetamorf yang ada adalah batuan malihan ligu, sedangkan batuan beku terdapat di batuan Gunung Api Batanta dan batuan Gunung Dore. Wilayah ini juga termasuk daerah rawan gempa karena dilalui sesar Sorong yaitu yang menjulur dari daratan Papua bagian Utara menyeberangi Selat Sele dan menuju bagian utara Pulau Salawati dengan memiliki lebar 10 km dan arahnya ke barat dan barat daya.

2.1.1.5. Hidrologi

Kabupaten Raja Ampat memiliki ratusan sungai, yang terdiri dari sungai-sungai kecil dan sungai-sungai besar. Sungai-sungai besar ini merupakan induk dari beberapa sungai kecil. Sungai-sungai besar umumnya terdapat di Pulau Waigeo, Pulau Salawati dan Pulau Misool. Sungai-sungai berukuran besar rata-rata tidak mengalami kekeringan pada musim kemarau. Secara umum, bila ditinjau dari kondisi fisik, sungai yang terdapat di Kabupaten Raja Ampat masih menunjukkan kondisi fisik air sungai yang alami. Kondisi ini sangat ditunjang dengan adanya vegetasi yang tumbuh di sepanjang aliran sungai sebagai daerah tangkapan air hujan. Beberapa sungai yang cukup besar terdapat di Pulau Waigeo di antaranya adalah Sungai Bayon dengan panjang \pm 4 km, Sungai Kamtabai dan Sungai Kasim di Pulau Misool bagian barat. Bila dilihat potensi air tanahnya, sebagian besar wilayah daratan di Kabupaten Raja Ampat tidak memiliki air tanah tawar kecuali di pulau-pulau besar seperti Pulau Waigeo, Salawati dan Misool. Sungai yang memiliki *wash load* cukup tinggi yaitu Sungai Wawiyai di Distrik Waigeo Selatan, Sungai Gamta dan Sungai Biga di Distrik Misool Timur Selatan. *Wash load* umumnya berasal dari erosi permukaan tanah atau lapukan yang disebabkan pemanfaatan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai tempat permukiman, terjadinya penebangan hutan dan kegiatan pertanian. Berdasarkan semua parameter fisik dan kimia beberapa Sungai di Kabupaten Raja Ampat yang diukur pada Atlas, diketahui bahwa debit air terbesar terdapat di wilayah Sungai Wakrey dengan besaran 1.20-2.60 m³/detik dan debit air terkecil terdapat di wilayah Sungai Knayar dengan besaran 0.00m³/detik. Kabupaten Raja Ampat juga memiliki rawa-rawa yang berkembang dengan baik dan didominasi oleh pohon sagu (*Metroxylon sagu*). Pohon sagu merupakan hasil dari pengelolaan budidaya masyarakat lokal, dimana sagu telah menjadi makanan pokok bagi sebagian penduduk setempat. Sejumlah spesies sagu lainnya, juga terdapat di rawa tepian Sungai Kabilol dan didominasi oleh spesies *Osmoxylon (Araliaceae)* yang berduci.

2.1.1.6. Klimatologi

Sepanjang tahun 2010, kondisi suhu Kabupaten Raja Ampat tidak banyak bervariasi. Berdasarkan catatan Badan Meteorologi dan Geofisika di Stasiun DEO pada ketinggian 0 meter di atas permukaan laut. Suhu udara minimum di Kabupaten Raja Ampat sekitar 24,40 Celcius, dan suhu udara maksimum sekitar 31,20 Celcius. Kisaran rata-rata suhu udara tersebut menunjukkan bahwa daerah tersebut relatif cukup tinggi. Dalam periode waktu antara tahun 2005-2008 curah hujan tahunan berkisar antara 2000-430 mm/tahun dengan jumlah hari hujan setiap tahunnya berkisar antara 156-286 hari. Puncak hujan umumnya terjadi pada bulan Maret sampai Oktober yaitu berkisar antara 200-300 mm/bulan.

Sepanjang tahun 2010 curah hujan tercatat 3.025,9 milimeter dan merata dengan kelembaban udara rata-rata tercatat 85 persen (Raja Ampat Dalam Angka 2011).

2.1.1.7. Penggunaan lahan

Berdasarkan data pada Dinas Perkebunan dan Dinas Kehutanan Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010 jumlah lahan perkebunan yang tersedia seluas 150.000 hektar dan hanya 13.281 hektar lahan perkebunan yang telah digunakan. Sedangkan untuk penggunaan lahan hutan, seluas 153.698,20 hektar diperuntukkan sebagai kawasan Hutan Produksi Konservasi (HPK), 15.240,84 hektar sebagai Hutan Produksi (HP), 6.941,32 hektar diperuntukkan sebagai Hutan Produksi Terbatas (HPT) sedangkan sisanya sekitar 1.972,77 hektar dipergunakan sebagai areal penggunaan lainnya.

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

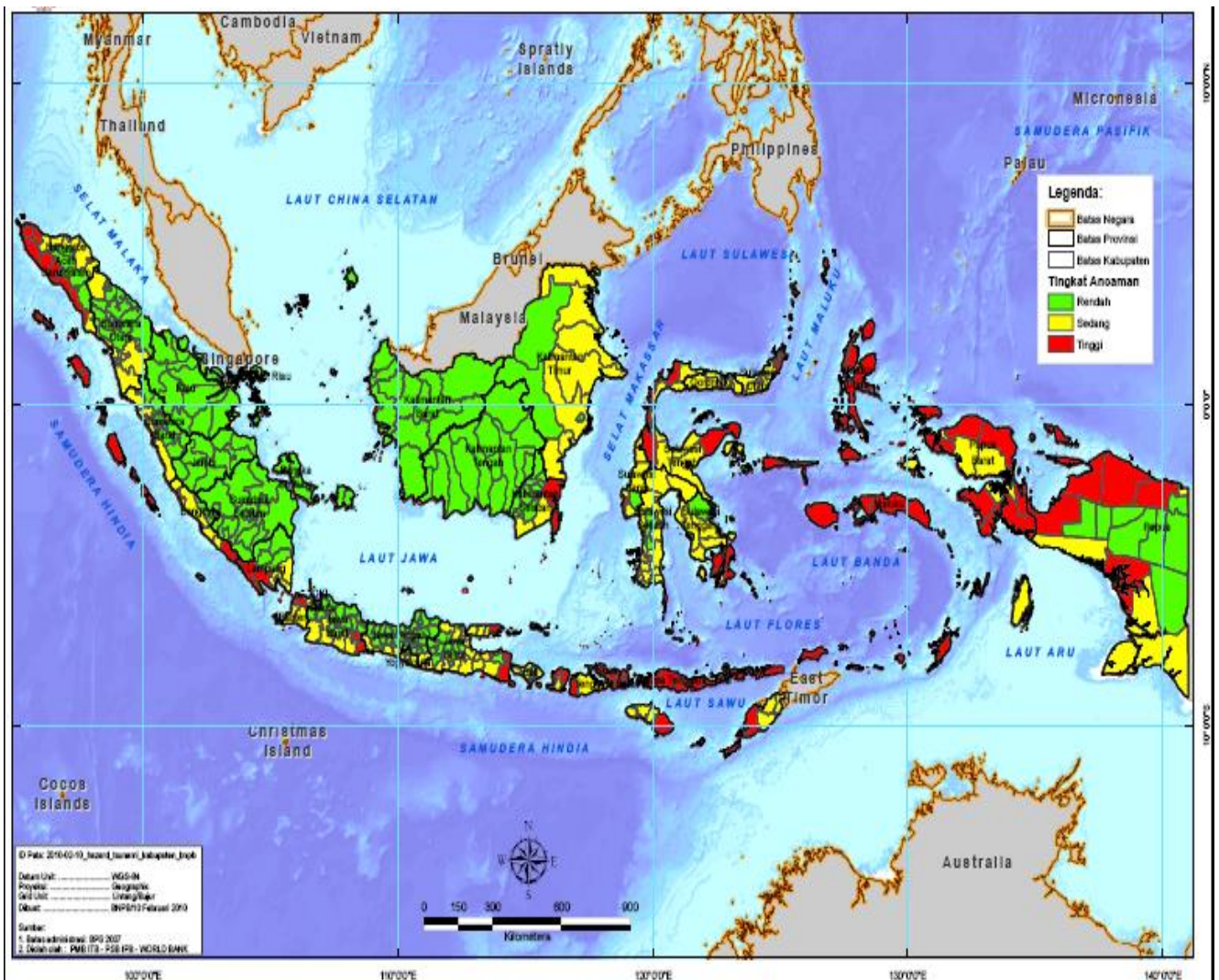
Wilayah yang teridentifikasi sebagai wilayah yang memiliki potensi budi daya pengembangan pertanian lahan basah yaitu Waigeo, Samate, dan Salawati, sedangkan di lahan kering semua distrik memiliki potensi. Pengembangan lahan pertanian abadi cocok dikembangkan di kawasan Waigeo dan Salawati dan sekaligus menjadi lahan untuk mendukung ketahanan pangan dan agroindustri. Optimalisasi lahan untuk tanaman perkebunan pada dasarnya dapat dikembangkan di 24 Distrik. Revitalisasi kawasan perkebunan rakyat dan pengembangan kawasan perkebunan komoditas unggulan dikembangkan di seluruh Distrik. Khusus kawasan perkebunan skala besar berada di Salawati dan Misool sedangkan kawasan industri paling tepat dikembangkan di Waigeo dan Salawati. Mengingat Kabupaten Raja Ampat memiliki potensi dalam sektor perikanan dan kelautan, maka pembangunan sarana prasarana untuk sektor tersebut perlu dikembangkan pada semua distrik. Di samping itu pula, Kabupaten Raja Ampat memiliki potensi pariwisata yang sangat besar karena keindahan alamnya. Oleh karena itu peningkatan daya tarik objek wisata dilakukan di seluruh objek kawasan di Kabupaten Raja Ampat. Penataan lingkungan kawasan wisata dan pembangunan sarana prasarana wisata dilakukan di 16 (enam belas) kampung wisata prioritas yaitu Arborek, Saonek, Meosmanswar, Sawinggrai, Yembuba, Arefi, Fafanlap, Harapan Jaya, Saleo, Serpele, Usaha Jaya, Sauwandarek, Yenwaupnor, Waisai dan Yellu.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah Kabupaten Raja Ampat juga termasuk daerah rawan gempa karena dilalui sesar Sorong yaitu yang menjulur dari daratan Papua bagian Utara menyeberangi Selat Sele dan menuju bagian utara Pulau Salawati. Pulau-pulau yang digolongkan kedalam kategori daerah dengan nilai Intensitas Skala *Modified Mercalli Intensity* (MMI) V antara lain Pulau Waigeo, Pulau Gag, Pulau Gam, Pulau Kawe dan sekitarnya, serta Pulau Misool dan sekitarnya, MMI VI-VII mencakup Pulau Batanta, Kofiau dan sekitarnya. Penambangannya pun dapat mengancam rawan longsor, seperti wilayah Pulau Salawati (batubara dan migas), Pulau Waigeo dan Gag (nikel) serta Pulau Batanta dan Misool (emas dan bahan baku semen).

Kondisi geografis Kabupaten Raja Ampat yang berbentuk kepulauan dan berada di mulut Samudra Pasifik dan dilempeng kontinental yang dinamik juga menyebabkan wilayah Kabupaten Raja Ampat masuk ke dalam kategori kawasan rentan bencana tsunami. Bahkan dalam peta potensi tsunami yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagian besar Pulau diwilayah Kabupaten Raja Ampat berada pada kawasan merah. Hal tersebut dapat dilihat dalam peta sebagai berikut :

Gambar 2.2. Peta Indeks Ancaman Bencana Tsunami di Indonesia

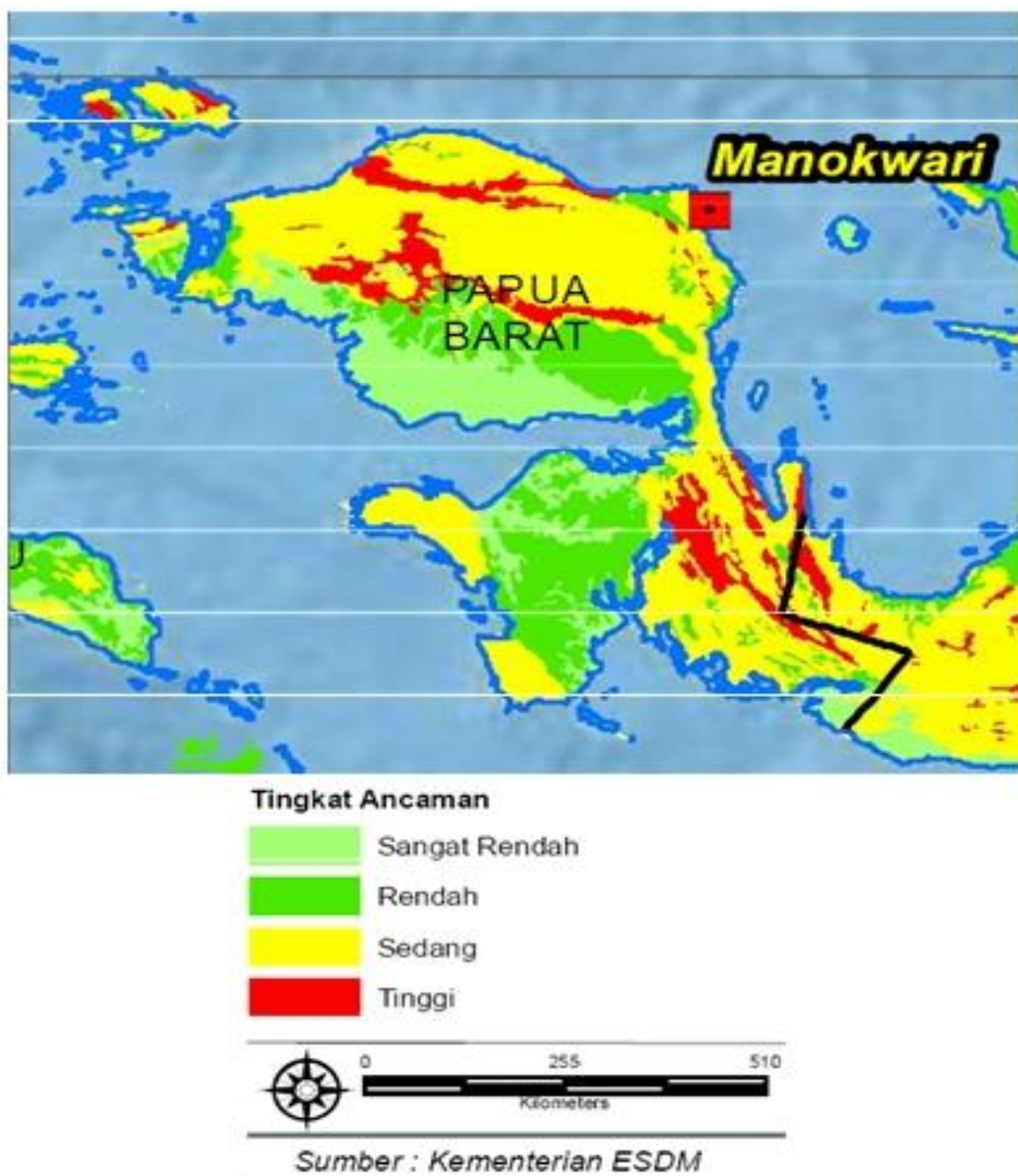


Sumber : BNPB, 2010

Terlihat jelas bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Raja Ampat ditandai dengan warna merah, artinya Kabupaten Raja Ampat termasuk dalam wilayah rawan tsunami tingkat tinggi. Ancaman gelombang tsunami pasti terjadi, namun tidak dapat dipastikan kapan terjadinya. Karakteristik ini karena gempa bumi yang menjadi pemicu gelombang tsunami tidak dapat dipastikan kapan terjadinya. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan hanya mampu memprediksi derajat kemungkinan terjadinya gempa bumi. Abrasi juga dapat terlihat di pulau-pulau kecil antara lain disekitar Pulau Arborek dan Pulau Ayau yang terhantam gelombang terutama ketika musim angin dari arah barat dan dari arah selatan. Sedangkan gelombang yang menghantam sekitar Kampung Waigama, Pulau Misool, searah arus laut dari timur menyusur kebarat, telah mengurangi daratan. Erosi telah menggerus tanah disekitar pantai oleh aliran permukaan, karena adanya penebangan pohon untuk pembukaan lahan pertanian dan permukiman. Sedimen di muara-muara sungai membentuk delta dan beting-beting pasir ke arah lautan. Hal ini dapat dilihat pada muara-muara sungai antara lain di Kampung Kalitoko,

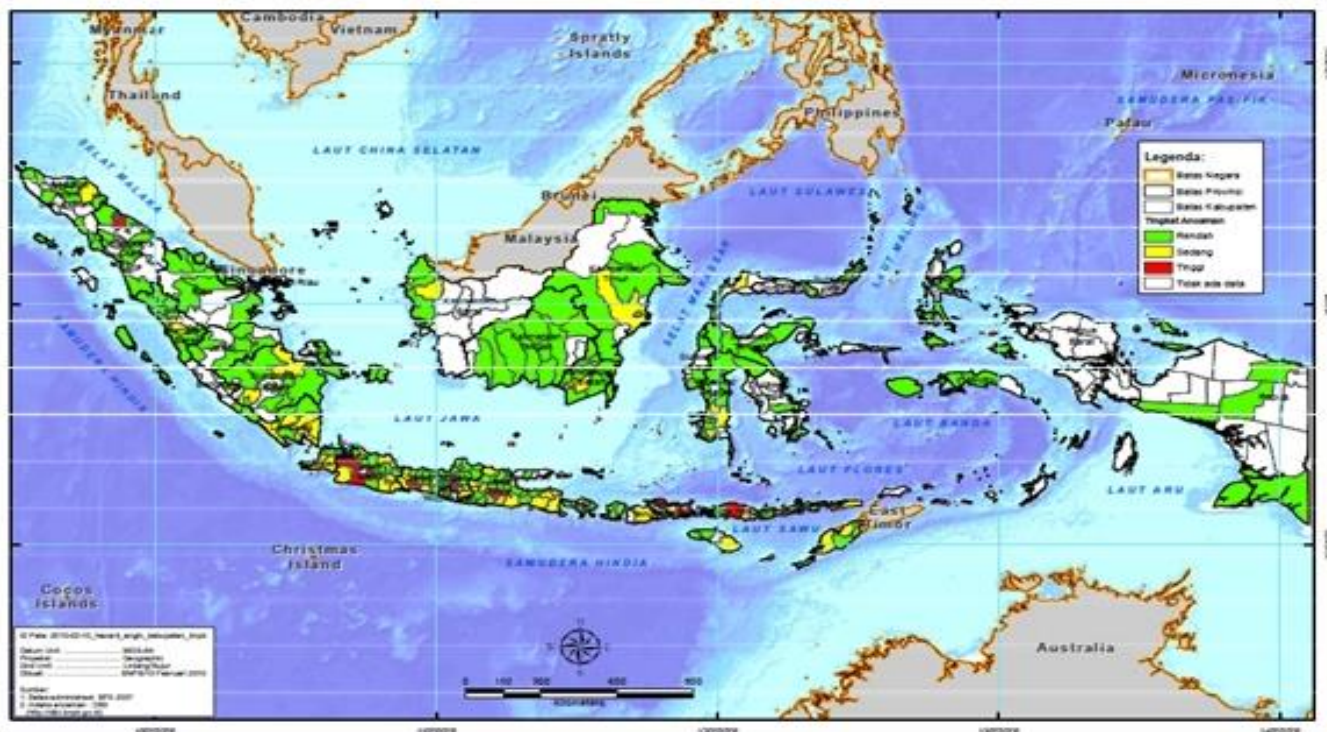
Warsamdin, Kabare di Pulau Waigeo, Sungai Wartandip Yensawai di Pulau Batanta dan Sungai Kasim, Sungai Gamta dan Sungai Biga di Pulau Misool. Untuk bencana kebakaran sering terjadi pada hutan dataran rendah pada batu gamping dan karst saat musim kering seperti pada bagian utara Jurang Werabia. Kebakaran juga sering terjadi di ekosistem semak-semak pada ultra basik, seperti halnya yang terjadi di daerah karst. Bekas kebakaran banyak dijumpai di bagian perbukitan dekat Go di Teluk Mayalibit. Frekuensi kebakaran pada saat ini lebih tinggi sebagai akibat pembakaran perladangan berpindah dan usaha pembalakan yang telah memacu kebakaran hutan. Berdasarkan peta kemiringan lereng di bawah ini, terlihat bahwa zona-zona kerawanan longsor Kabupaten Raja Ampat sebagian besar berada di sebagian wilayah Pulau Waigeo Barat, Waigeo Utara dan sebagian Pulau Batanta dengan kategori ancaman yang tinggi.

Gambar 2.3. Peta Zonasi Ancaman Bencana Gerakan Tanah di Papua Barat



Selain rawan bencana tsunami dan tanah longsor, Kabupaten Raja Ampat juga memiliki potensi rawan bencana angin. Angin diatas perairan Utara pada umumnya bertiup dari arah Barat Daya hingga Barat Laut dengan kecepatan 05-10 knots. Sedangkan angin di atas perairan Selatan pada umumnya bertiup dari arah Barat Laut hingga Timur Laut dengan kecepatan 05-10 knots. Dari gambar dibawah ini, dapat dilihat bahwa sebagian Kabupaten Raja Ampat berpotensi rawan bencana angin, meskipun tidak semua daerah masuk ke zona rawan.

Gambar 2.4. Peta Kerawanan Bencana Angin di Indonesia
Sumber : BNPB 2010



2.1.4. Demografi

Sesuai dengan kondisi alamnya, hampir seluruh penduduk Kabupaten Raja Ampat menetap di tepi laut (pantai). Hanya penduduk Kampung Kalobo, Waijan, Tomolol, Waisai, dan Magey yang tinggal agak jauh ke arah daratan. Berdasarkan data pada Maret 2011 jumlah penduduk kabupaten Raja Ampat adalah sebanyak 60.386 jiwa. Berdasarkan komposisinya mayoritas penduduk berada di Kota Waisai (21,5 persen) dan selebihnya tersebar di 23 distrik lainnya dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Luas Daerah, Jenis Kelamin dan Kepadatannya
Kondisi Bulan Maret 2011**

Kecamatan (1)	Luas Daerah (km ²) (2)	Penduduk			Kepadatan per km ² (6)
		Laki-laki (3)	Perempuan (4)	Jumlah (5)	
1. Misool Selatan	619,45	2.785	2.231	5.016	8,1
2. Misool Barat	268,21	777	706	1.483	5,5
3. Misool Utara	420,85	1.180	990	2.170	5,2
4. Kofiau	845,07	1.494	1.293	2.787	3,3
5. Misool Timur	532,34	1.776	1.392	3.168	6,0
6. Kep. Sembilan	163,67	910	793	1.703	10,4
7. Salawati Utara	240,95	1.566	1.340	2.906	12,1
8. Salawati Tengah	160,63	1.195	1.059	2.254	14,0
9. Salawati Barat	133,86	550	478	1.028	7,7
10. Batanta Selatan	205,25	1.028	861	1.889	9,2
11. Batanta Utara	250,86	968	808	1.776	7,1
12. Waigeo Selatan	310,76	1.226	1.107	2.333	7,5
13. Kota Waisai	54,84	7.648	5.345	12.993	236,9
14. Teluk Mayalibit	106,81	632	562	1.194	11,2

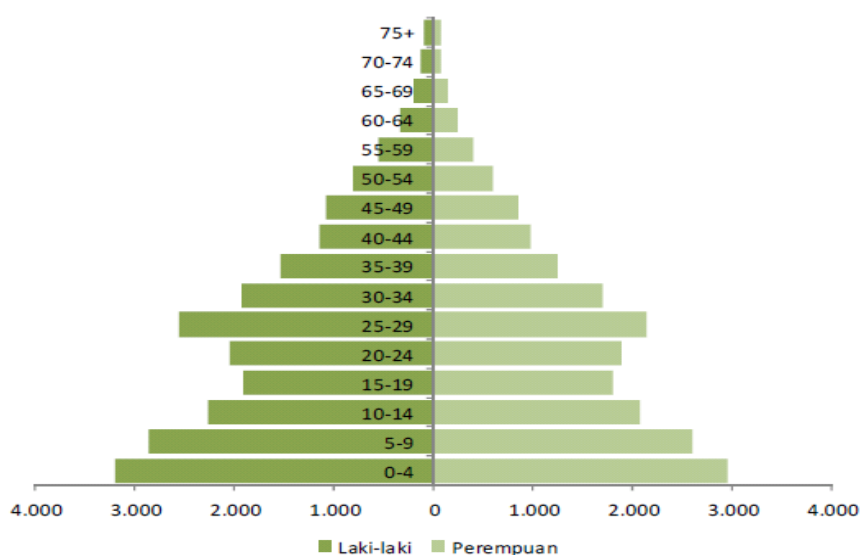
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15. Tiplol Mayalibit	167,06	626	534	1.160	6,9
16. Meosmansar	224,08	1.320	1.135	2.455	11,0
17. Waigeo Barat	1.669,84	1.325	928	2.253	1,4
18. Waigeo Barat Kepulauan.	939,29	1.382	1.167	2.549	2,7
19. Waigeo Utara	95,15	1.009	852	1.861	19,6
20. Warwabomi	61,67	866	737	1.603	26,0
21. Supnin	63,43	843	550	1.393	22,0
22. Kepulauan Ayau	203,42	792	688	1.480	7,3
23. Ayau	135,61	605	615	1.220	9,0
24. Waigeo Timur	161,35	965	747	1.712	10,6
Jumlah	8.034,44	33.468	26.918	60.386	7,5

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Maret 2011

Secara keseluruhan jumlah penduduk laki-laki di Raja Ampat lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki mencapai 33.468 jiwa (55,4 persen) sedangkan penduduk perempuan berjumlah 26.918 jiwa (44,6 persen) dari total jumlah penduduk Raja Ampat. Distrik yang memiliki tingkat kepadatan tertinggi sekaligus dengan jumlah penduduk terpadat adalah Kota Waisai yakni dengan tingkat kepadatan penduduk 236.9/km². Sedangkan untuk tingkat kepadatan penduduk yang paling rendah berjumlah 1,4 km² di wilayah Distrik Waigeo Barat, hal ini juga dipengaruhi Distrik Waigeo Barat merupakan Distrik dengan area terluas (1.669,84 km²).

Berdasarkan piramida penduduk pada tahun 2010, penduduk Kabupaten Raja Ampat tergolong ke dalam penduduk yang masih muda. Jumlah penduduk terbesar adalah penduduk yang berumur 0-4 tahun, disusul kemudian oleh penduduk yang berumur 5-9 tahun dan 25-29 tahun.

Gambar 2.5. Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2010



Sumber : Raja Ampat Dalam Angka 2011

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Raja Ampat 2010, tingkat laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Raja Ampat pada tahun 2010 sebesar 2,00 persen. Bila dibandingkan dengan tahun 2009, angka ini mengalami kenaikan sebesar 1,77 persen. Struktur perekonomian Kabupaten Raja Ampat tahun 2010 (Atas Dasar Harga berlaku) didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian (49,5 persen), selanjutnya diikuti oleh sektor pertanian (34,75 persen), sektor jasa (6,20 persen), sektor bangunan (4,65 persen), sektor perdagangan, hotel dan restoran (2,91 persen), sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan (0,20 persen), dan sektor listrik dan air bersih (0,05 persen). Berdasarkan PDRB 2010 Raja Ampat, nilai PDRB nominal (atas dasar harga berlaku) pada tahun 2010 sebesar Rp 1,1 trilliun lebih besar dibanding tahun 2009 sebesar Rp 1 trilliun dengan tingkat pertumbuhan 6,73 persen. Secara sektoral, PDRB pada Tahun 2010 untuk seluruh sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif dan pertumbuhan tertinggi secara berturut-turut dialami oleh sektor bangunan 15,47 persen; sektor industri pengolahan 11,22 persen; sektor listrik, gas dan air bersih 9,86 persen; sektor pengangkutan dan komunikasi 9,16 persen; sektor Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan

11,81 persen kemudian sektor jasa-jasa sebesar 8,68 persen; sedangkan untuk sektor pertambangan dan penggalian minus 1,55 persen.

2.2.1.2. Laju Inflasi Provinsi

Laju inflasi pada tahun 2008 dan 2009 di Kabupaten Raja Ampat masing-masing sebesar 19,28 persen dan 10,87 persen. Pada tahun 2010 terjadi penurunan signifikan dari laju inflasi sebelumnya menjadi 4.64 persen. Berdasarkan data Survei Harga Konsumen, BPS Papua Barat 2010 kondisi ini semakin mendekati tingkat laju inflasi Provinsi Papua Barat yaitu 4.48 persen.

2.2.1.3. PDRB Perkapita

Kabupaten Raja Ampat mengalami kenaikan nilai PDRB dari tahun ke tahun. Nilai PDRB Atas Dasar Harga (ADH) berlaku tahun 2008 sebesar Rp 938.10 milyar dengan jumlah penduduk 41.170 jiwa. Nilai PDRB tersebut mengalami kenaikan di tahun 2009 menjadi 1,058 triliun, dengan jumlah penduduk 41.800 jiwa dan terus menanjak naik menjadi 1,13 triliun di tahun 2010, dengan jumlah penduduk 42.508 jiwa. PDRB ADH konstan Kabupaten Raja Ampat juga mengalami progres dari tahun ke tahun, sebesar Rp. 520,95 milyar di tahun 2008, kemudian merangkak naik menjadi Rp 530,17 milyar di tahun 2009 dan pada tahun 2010 menjadi Rp 540,75 milyar.

Berdasarkan data PDRB Kabupaten Raja Ampat 2010, PDRB per kapita mengalami kenaikan, yakni PDRB ADH berlaku sebesar Rp 22.786.027,48 pada tahun 2008, 5.285.203,94 pada tahun 2009 dan naik menjadi Rp 26.575.545,76 pada tahun 2010. Sedangkan untuk PDRB Per kapita ADH Konstan Rp 12.653.570,08 pada tahun 2008, Rp 12.665.252,98 pada tahun 2009 dan naik menjadi Rp 12.721.067,06 pada tahun 2010 dengan persentase laju pertumbuhan PDRB per kapita adalah 5,1 persen.

2.2.1.4. Pemerataan Pendapatan, Ketimpangan dan Angka Kriminalitas

Pemerataan pendapatan berdasarkan indeks gini Kabupaten Raja Ampat di tahun 2010 berada pada nilai 0,38 persen. Ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan berdasarkan pendekatan pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Raja Ampat masih rendah. Sedangkan Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) berada pada nilai 0,21 persen yang menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan antar daerah di Kabupaten Raja Ampat rendah. Berdasarkan tingkat kemiskinan di Raja Ampat sejumlah 23,62 persen penduduk Raja Ampat masih berada dibawah garis kemiskinan dan sejumlah 76,38 persen penduduk yang telah berada pada kondisi ekonomi di atas garis kemiskinan. Selain masih menjadi kabupaten baru, sektor-sektor potensial seperti kelautan dan perikanan masih dalam pengembangan, sehingga belum bisa menjadi kekuatan ekonomi untuk penduduk di Kabupaten Raja Ampat. Dari data Raja Ampat Dalam Angka 2010, diketahui bahwa banyaknya pelanggaran/kejahatan pada tahun 2009 sebanyak 47 kasus, dan dapat terselesaikan sebanyak 44 kasus. Sedangkan pada tahun 2010 terdapat 80 kasus dan sejumlah 76 kasus di antaranya dapat terselesaikan dengan baik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tingkat kriminalitas berhasil ditangani dengan baik di Kabupaten Raja Ampat, hal itu ditandai dengan 95 persen angka kriminalitas yang telah tertangani.

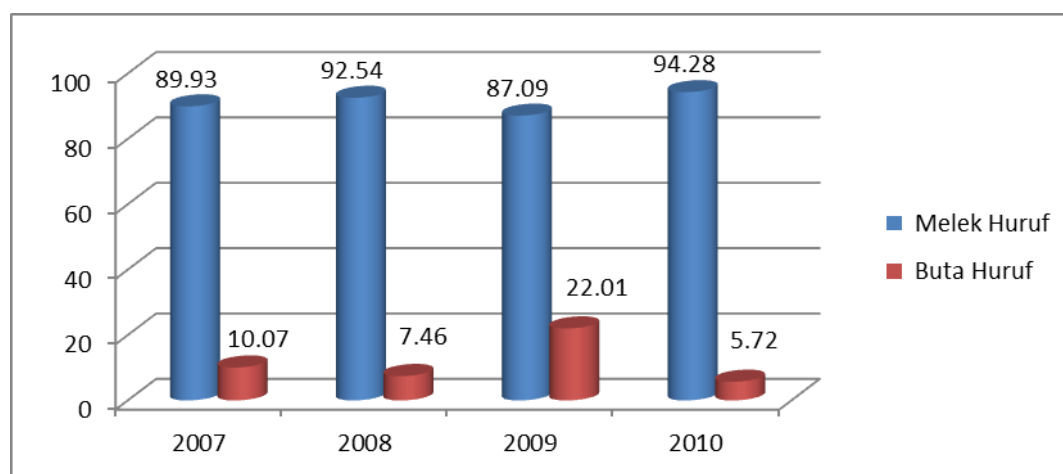
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Angka Melek Huruf

Pendidikan sebagai salah satu layanan publik dasar yang masih perlu ditingkatkan, baik dalam hal infrastruktur fisik (kuantitas) maupun mutu (kualitas) di Kabupaten Raja Ampat.

Berikut ini adalah gambar grafik angka melek dan buta huruf Kabupaten Raja Ampat :

Gambar 2.6. Angka Melek Huruf dan Buta Huruf di Raja Ampat 2007-2010



Sumber : Raja Ampat Dalam Angka 2011.

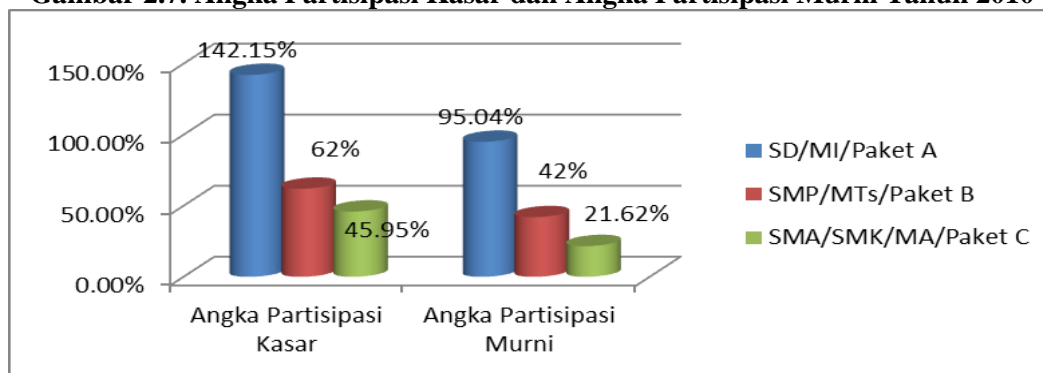
Data statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2007 dan 2008 angka buta huruf menurun dari 10.07 persen menjadi 7.46 persen. Akan tetapi pada tahun 2009 terjadi kenaikan angka buta huruf menjadi 22.01 persen, dan

kemudian pada tahun 2010 terjadi penurunan angka buta huruf menjadi 5,72. Sedangkan angka melek huruf di Kabupaten Raja Ampat tercatat bahwa terdapat kenaikan dari tahun 2007 menuju tahun 2008, yakni dari 89,93 persen menjadi 92,54 persen, namun menurun kembali pada tahun 2009, yakni 87,09. Terakhir tercatat dalam data RADA 2011, angka melek huruf tahun 2010 sebanyak 94,28 persen.

2.2.2.2. Rata-rata Lama Sekolah, Partisipasi Kasar dan Partisipasi Murni

Angka rata-rata lama sekolah terlihat melalui kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan tercatat sebesar 7,26persen. Untuk angka partisipasi sekolah, baik angka partisipasi kasar maupun angka partisipasi murni menunjukkan bahwa partisipasi untuk sekolah menengah dan lanjutan masih berada pada tahap yang perlu ditingkatkan. seperti yang tersaji pada grafik berikut :

Gambar 2.7. Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Tahun 2010



Sumber : Raja Ampat Dalam Angka 2011

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa angka partisipasi kasar untuk tingkat SD/MI/Paket A sebanyak 142.15 persen, tingkat SMP/MTs/Paket B sebesar 62 persen, dan untuk tingkat SMA/SMK/MA/Paket C sebesar 45.95 persen. Angka partisipasi murni cenderung lebih rendah dibandingkan dengan angka partisipasi kasar yakni tingkat SD/MI/Paket A sebanyak 95.04 persen, tingkat SMP/MTs/Paket B sebesar 42 persen, dan tingkat SMA/SMK/MA/Paket C sebesar 21.62 persen.

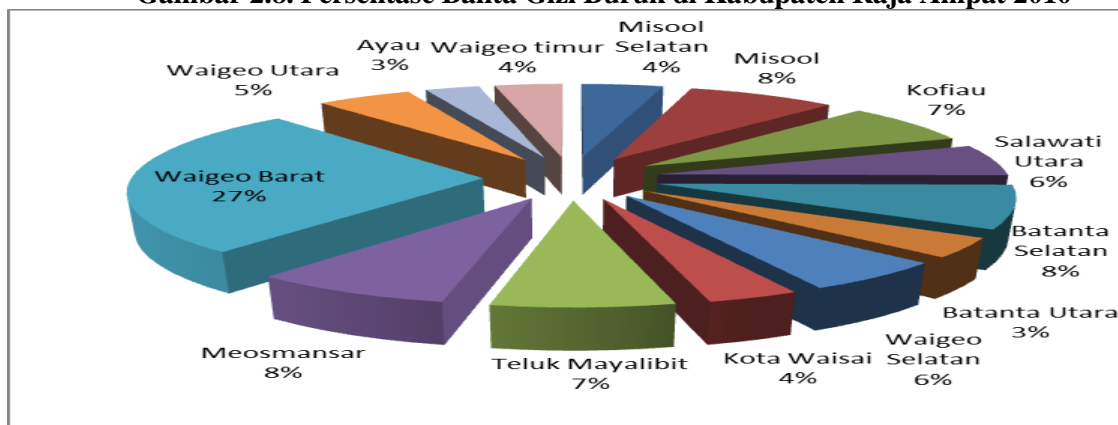
2.2.2.3. Angka Usia Harapan Hidup

Secara keseluruhan di Kabupaten Raja Ampat terdapat 1.549 keluarga (10,97 persen) yang masuk dalam kategori perumahan dan lingkungan tidak sehat. Keluarga penyandang masalah kesejahteraan kategori perumahan dan lingkungan tidak sehat paling banyak terdapat di Meosmansar dan Kepulauan Ayau yaitu sebanyak 189 keluarga. Sedangkan daerah yang terbebas dari masalah kesejahteraan kategori perumahan dan lingkungan tidak sehat yaitu di Kofiau, Misool Timur, Kepulauan Sembilan, Misool Selatan dan Misool Barat. Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua Barat tahun 2009, diketahui bahwa angka harapan hidup di Kabupaten Raja Ampat adalah 65,75. Artinya bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Raja Ampat dapat menjalani hidup selama 65 tahun.

2.2.2.4. Presentase Balita Gizi Buruk

Berdasarkan data statistik RADA 2011, kawasan Distrik Waigeo merupakan kawasan yang paling banyak terdapat balita dengan kondisi gizi yang buruk yakni sebesar 27 persen, sedangkan Pulau Ayau dan Bantara gizi buruk pada balita sebesar 3 persen. Dengan kondisi yang demikian, perlu adanya perhatian dan peningkatan gizi di Kabupaten Raja Ampat.

Gambar 2.8. Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Raja Ampat 2010



Sumber : Raja Ampat Dalam Angka 2.2.2.5. Angka Kesakitan

Berdasarkan RADA 2011, sepanjang tahun 2010 jenis-jenis penyakit yang mewabah di Kabupaten Raja Ampat adalah malaria, yaitu sebanyak 581 penderita (38,91 persen), ISPA 567 penderita (37,98 persen), GEA 100 penderita (6,7 persen), Obs. Febris 54 penderita (3,62 persen), Dyspepsia 43 penderita (2,88 persen), Myalgia 41 penderita (2,75 persen), Dermatitis 39 penderita (2,61persen), Vulnus 24 penderita (1,61 persen), Gastritis 23 penderita (1,54 persen), dan Command Cold 21 penderita (1,41 persen).

2.2.2.6. Kepemilikan Lahan dan Ketenagakerjaan

Untuk persentase kepemilikan lahan oleh penduduk Kabupaten Raja Ampat adalah sebesar 3,31 persen, yang dicatat dalam RADA 2010, sedangkan rasio penduduk yang bekerja ada sebesar 0,62 persen. Indikator ketenaga kerjaan terpenting adalah tentang proporsi penduduk yang bekerja. Adapun persentase penduduk Kabupaten Raja Ampat yang Berumur 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan utama yang bekerja terhadap angkatan kerja mengalami kenaikan dari 95,97 persen pada tahun 2007 menjadi 97,03 persen pada tahun 2008, namun mengalami penurunan lagi pada tahun 2009 menjadi 94,62 persen.

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah raga

Kabupaten Raja Ampat yang memiliki keindahan destinasi wisata alam yang luar biasa dengan karakteristik multikulturalisme penduduk yang tinggal di daerah ini merupakan potensi utama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat lokal. Daya tarik wisata budaya akan menjadi salah satu keunggulan lokal yang mampu membuat keindahan wisata laut Raja Ampat sebagai destinasi wisata tujuan utama turis asing dan domestik. Namun keterbatasan fasilitas, sarana prasarana penunjang masih menjadi kendala pengembangan seni budaya dan olah raga . Sarana pendukung seni budaya dan olah raga masih membutuhkan perhatian yang serius. Adanya pesona wisata yang menarik belum didukung sarana prasarana yang memadai baik untuk sektor seni budaya maupun olah raga. Jumlah grup kesenian yang ada di Raja Ampat hanya berjumlah tujuh kelompok, Raja Ampat juga belum memiliki gedung khusus untuk kesenian, Jumlah gedung olah raga hanya satu dengan jumlah total klub olah raga sebanyak 15 klub. Raja Ampat yang sebenarnya memiliki potensi dalam sektor seni budaya butuh pengembangan khususnya untuk kesenian yang mendukung pariwisata Raja Ampat. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur, fasilitas serta sarana prasarana di bidang kebudayaan dan olah raga menjadi sesuatu yang tidak bisa dikesampingkan di masa mendatang.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Pendidikan

Sarana dan prasarana pendidikan khususnya untuk pendidikan menengah dan atas di Kabupaten Raja Ampat masih teramat minim. Hingga tahun 2009 dan 2010 ad 13 SMA/SMK dan 22 SMP. Keterbatasan jumlah pengajar juga dapat dilihat dari jumlah guru SMP dan SMA yang masing-masing berjumlah 192 dan 75 orang. Angka putus sekolah di Kabupaten Raja Ampat mencapai 5,66 persen untuk tingkat SD/MI, sedangkan untuk tingkat SMP/MTs lebih rendah yakni sebesar 4,83 persen, dan angka putus sekolah yang paling tinggi di Kabupaten Raja Ampat terjadi pada tingkat SMA/SMK/MA yang mencapai 38,24 persen. Berikut adalah tabel yang menunjukkan jumlah ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang ada di seluruh Raja Ampat :

Tabel 2.2. Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kabupaten Raja Ampat Tahun 2006-2010

No	URAIAN	SATUAN	PERIODE					
			2003	2006	2007	2008	2009	2010
1	TK	Unit	-	2	2	5	10	10
2	SD	Unit	74	80	80	83	97	97
3	SMP	Unit	16	14	17	20	22	22
4	SMA	Unit	3	3	4	7	11	11
5	SMK	Unit	-	-	-	1	2	2
6	AK/D-III	Unit	-	-	-	-	-	-
7	PT	Unit	-	-	-	-	-	-
8	Guru TK	Org	6	6	6	6	6	8
9	Guru SD	Org	343	343	350	356	392	392
10	Guru SMP	Org	145	145	145	192	192	192
11	Guru SMA	Org	41	41	63	75	75	75
12	Guru SMK	Org		-	-	-	22	22

Sumber : BPS Raja Ampat

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah dasar di Raja Ampat masih berada di bawah rata-rata nasional, yakni baru mencapai 0,016 persen. Begitu pula halnya dengan rasio guru terhadap murid yang baru mencapai 0,040 persen. Sedangkan untuk tingkat sekolah menengah, angka partisipasi sekolah mencapai 78,5 persen (lebih rendah dibandingkan angka partisipasi sekolah dasar yang mencapai 94,34 persen), dengan rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah menengah 0,011 persen, rasio guru terhadap murid 0,092

persen dan rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata 10,90 persen. Dengan adanya keterbatasan tenaga pengajar tersebut, terdapat banyak guru yang mengajar melebihi beban tugas yang sebenarnya, seperti harus mengajar di lebih dari satu kelas pada waktu yang bersamaan atau mengelola siswa yang berjumlah melebihi batas kewajaran. Ditambah lagi dengan banyaknya distrik yang berada pada pulau-pulau terpencil yang susah diakses juga mempengaruhi komitmen para pengajar. Ketimpangan jumlah murid yang menempuh pendidikan dasar dan menengah juga sebanding dengan kondisi jumlah sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah di Raja Ampat seperti yang ditampilkan grafik berikut ini :

Tabel 2.3. Banyaknya Sekolah, Guru dan Murid Dirinci Menurut Jenis Tingkat Pendidikan Tahun 2010.

Tingkat Pendidikan	Sekolah	Guru	Murid
TK	10	22	320
SD	94	374	9246
SLTP	26	188	2049
SMA	11	87	1023
SMK	2	24	98

Sumber : Raja Ampat Dalam Angka 2011

Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang ditunjukkan dengan pengalokasian anggaran bidang pendidikan. Alokasi anggaran tersebut ditujukan untuk pembangunan sekolah dan rumah guru, mess pendidikan, pengadaan meubelair sekolah, buku-buku pelajaran, pengembangan SMA unggulan dan pelatihan ketrampilan bagi tenaga pendidik.

Tabel 2.4. Pemerataan Sekolah di Masing-Masing Distrik Tahun 2010

Distrik	Taman Kanak-kanak	Sekolah Dasar	SLTP		SLTA	
			Umum	Kejuruan	Umum	Kejuruan
1. Misool Selatan	-	5	2	-	1	-
2. Misool Barat	-	5	2	-	1	-
3. Misool Utara	1	5	1	-	1	-
4. Kofiau	-	4	2	-	1	-
5. Misool Timur	2	4	1	-	-	-
6. Kep. Sembilan	-	3	1	-	-	-
7. Salawati Utara	1	5	3	-	2	1
8. Salawati Tengah	2	3	-	-	-	-
9. Salawati Barat	-	3	-	-	-	-
10. Batanta Selatan	-	3	1	-	-	-
11. Batanta Utara	-	2	1	-	1	-
12. Waigeo Selatan	1	5	1	-	-	-
13. Kota Waisai	2	3	2	-	1	1
14. Teluk Mayalibit	-	3	1	-	-	-
15. Tiplol Mayalibit	-	7	-	-	-	-
16. Meosmansar	-	7	1	-	-	-
17. Waigeo Barat	-	5	-	-	1	-
18. Waigeo Barat Kep.	1	5	3	-	-	-
19. Waigeo Utara	-	3	1	-	1	-
20. Warwabomi	-	3	1	-	-	-
21. Supnin	-	2	-	-	-	-
22. Kepulauan Ayau	-	3	-	-	-	-
23. Ayau	-	2	1	-	1	-
24. Waigeo Timur	-	4	1	-	-	-
Jumlah	10	94	26	-	11	2

Sumber : Raja Ampat Dalam Angka 2011

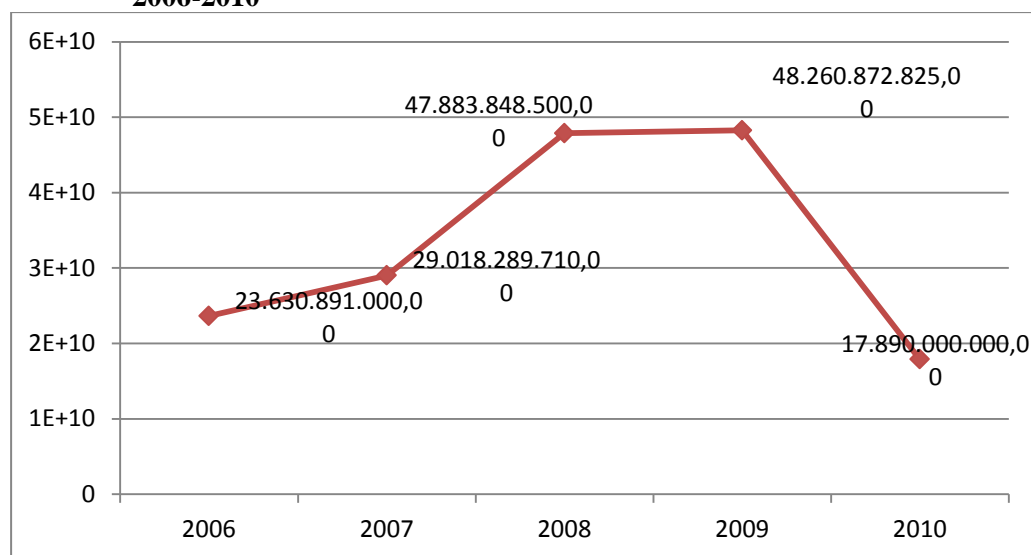
Kabupaten Raja Ampat merupakan kabupaten yang baru berdiri pada tahun 2002, sehingga fasilitas dan infrastruktur daerahnya belum terkelola dengan baik. Persebaran fasilitasnya belum terdistribusikan dengan baik di distrik-distrik tertentu, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan. data dari RADA 2011 menunjukkan bahwa belum ada pemerataan sekolah pada masing-masing Distrik. Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 24 distrik hanya terdapat 10 sekolah taman kanak-kanak di 7 distrik, sekolah dasar 94 yang sudah dimiliki oleh masing-masing distrik. Sekolah SLTP Umum ada 26 di 18 distrik, SLTA umum sebanyak 11 sekolah di 10 distrik, dan 2 sekolah kejuruan di 2 distrik Salawati Utara dan Kota Waisai).

Dari data di atas dapat terlihat bahwa perbandingan jumlah sekolah belum mengakomodasi kebutuhan murid. Data RADA menunjukkan bahwa untuk taman kanak-kanak terdapat sejumlah 320 siswa dan hanya tersedia 10 sekolah di 7 distrik. Jumlah keseluruhan murid Sekolah Dasar sebanyak 9.246 murid, dan jumlah sekolahnya 96 sekolah. Sekolah dasar di Raja Ampat jauh lebih merata dibandingkan dengan Sekolah Taman Kanak-Kanak. Untuk pendidikan umum SLTP jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Sekolah Dasar, yaitu hanya sebanyak 26 sekolah dengan jumlah siswa 2.049 orang, dan SLTA sebanyak 11 sekolah dengan jumlah siswa 1.023 orang. Untuk persebaran fasilitas pendidikan yang dilihat dari sarana prasarana atau ketersediaan sekolah dapat

dikatakan sudah merata. Akan tetapi masih ada beberapa tingkatan sekolah yang belum bisa mengakomodasi kebutuhan jumlah siswanya.

Jumlah alokasi anggaran dari tahun 2006 hingga 2010 mengalami trend yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, hanya pada tahun 2010 mengalami penurunan yang signifikan dari Rp 48.260.870.825,- menjadi Rp 17.890.000.000,- seperti yang tersaji pada grafik berikut :

Gambar 2.9. Alokasi Anggaran Bidang Pendidikan di Kabupaten Raja Ampat Tahun 2006-2010



Sumber : Raja Ampat Dalam Angka 2011

2.3.2. Kesehatan

Kabupaten Raja Ampat memiliki beberapa sarana kesehatan berupa Rumah Sakit, puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), Poliklinik Desa/Kampung (Polindes), Pos Obat Desa (POD), Posyandu, dan Pos Malaria Desa (Posmaldes). Sarana rumah sakit baru dibangun di Kabupaten Raja Ampat mulai Tahun 2009. Dengan adanya rumah sakit ini, maka rasio Rumah Sakit per satuan penduduk menjadi 0,005 dengan rasio dokter per satuan penduduk sebesar 0,04 dan rasio tenaga medis per satuan penduduk sebesar 0,74. Rasio ini menunjukkan masih minimnya sarana prasarana kesehatan dan SDM kesehatan (dokter dan tenaga medis) yang memberikan pelayanan kesehatan di Raja Ampat. Puskesmas mulai bertambah pada tahun 2008 yaitu dari 5 unit menjadi 10 unit. Penambahan Puskesmas terus dilakukan sehingga pada 2009 menjadi 13 unit dan bertambah lagi menjadi 30 unit pada 2010. Selain Puskesmas, di beberapa kampung juga terdapat Puskesmas Pembantu yang pada 2010 seluruhnya berjumlah 39 unit. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk hanya sebesar 1,74 dengan nilai cakupan puskesmas mencapai 79 persen dan cakupan pembantu puskesmas yang hanya sebesar 25 persen. Untuk sarana kesehatan berupa Poliklinik Desa (Polindes) belum tersedia di setiap kampung. Sampai dengan tahun 2010 baru terdapat 17 unit polindes. Sedangkan Posmaldes hanya terdapat disekelompok kampung yang memiliki kasus malaria yang tergolong tinggi. Dari tahun 2007 hingga 2010 tidak ada penambahan jumlah Posmaldes, yaitu tetap berjumlah 25. Begitu juga dengan Pos Obat Desa, tidak mengalami penambahan sejak 2007. Berbeda dengan keduanya, Posyandu menjadi unit pelayanan kesehatan yang pertambahan jumlahnya paling signifikan (tabel) dengan rasio posyandu per satuan balita sebesar 17,81

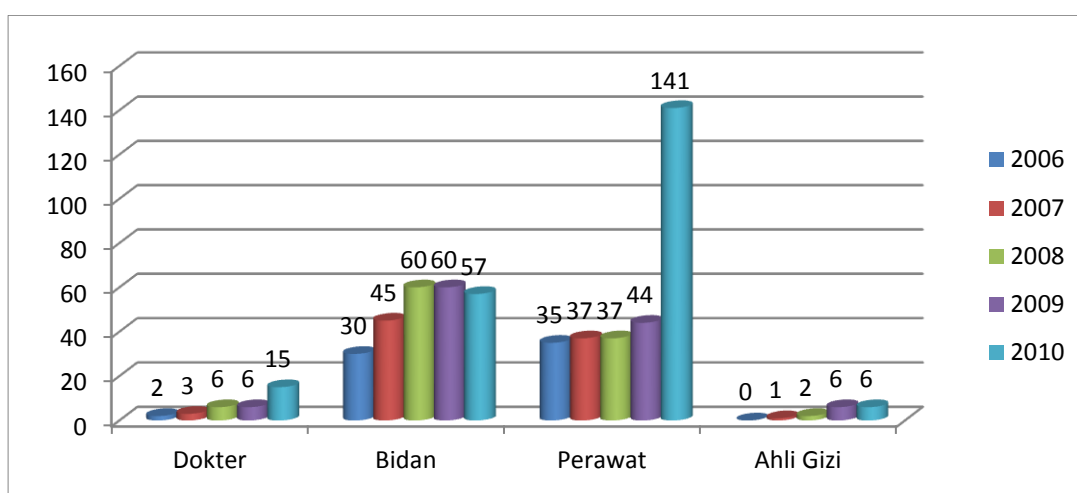
Tabel 2.5. Jumlah Fasilitas Kesehatan

No	Jenis Fasilitas	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Rumah Sakit	-	-	-	-	1
2.	Puskesmas Inap	-	-	-	4	5
3.	Puskesmas	5	5	5	10	18
4.	Pustu	17	17	17	39	55
5.	Polindes	15	15	17	20	17
6.	Pos Obat Desa	-	25	25	25	25
7.	Posyandu	45	45	95	97	106
8.	Posmaldes	-	-	25	25	25
9.	Gudang Farmasi	-	-	-	-	2
10.	Gedung Radiologi	-	-	-	1	1

Sumber : Raja Ampat Dalam Angka 2011

Adapun untuk persalinan yang dibantu dokter dan tenaga medis, masih cukup rendah, karena masyarakat setempat juga masih melakukan persalinan dengan cara tradisional. Nilai cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah sejumlah 65 persen dengan total cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani mencapai 1 persen. Untuk perawatan kesehatan khususnya balita, masih perlu mendapatkan perhatian pemerintah untuk ditingkatkan di masa mendatang. Hal ini terlihat dari masih rendahnya nilai cakupan Desa/ kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) sebesar 14,4 persen, nilai cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan sebesar 51 persen dan nilai cakupan kunjungan bayi sebesar 60 persen. Sedangkan untuk nilai cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA sebesar 85 persen, nilai penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD tinggi sebesar 90 persen dan nilai cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin sudah mencapai 80 persen. Pada sisi lain, keterbatasan dokter dan tenaga medis lainnya menjadi kendala untuk melakukan pelayanan kesehatan secara optimal. Seperti yang tampak pada grafik berikut, bahwa sampai dengan tahun 2010 jumlah dokter hanya berjumlah 15 orang.

Gambar 2.10. Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Raja Ampat



Sumber : Raja Ampat Dalam Angka 2011

2.3.3. Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Perhubungan

Kondisi jalan di Kabupaten Raja Ampat masih memprihatinkan, sebagian besar masih berupa tanah, sedikit yang menggunakan semen, dan sangat sedikit yang telah menggunakan campuran pasir dan batu. Berdasarkan data statistik, untuk persentase panjang jalan Kabupaten Raja Ampat dirinci menurut jenis permukaan jalan dapat diketahui bahwa perbaikan infrastruktur jalan hanya mengalami kenaikan beberapa persen dari tahun 2009-2010. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa kondisi jalan yang sudah di aspal hanya mengalami kenaikan dari yang semula hanya sebesar 1,81 persen pada tahun 2009 menjadi 3,91 persen di tahun 2010. Jalan yang masih berkerikil dari data dapat diketahui mengalami sedikit penurunan dari 55,65 persendi tahun 2009 menjadi 55,31 persen pada tahun 2010, hal ini menandakan bahwa peningkatan pembangunan jalan masih mengalami kendala.

Adapun jalan yang masih berupa tanah secara persentase sebesar 36,13 persen di tahun 2009 menjadi 33,21 persen pada tahun 2010. Secara keseluruhan, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik sebesar 188,9. Sejak tahun 2006-2010, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 307.853.869.154,- untuk sektor pembangunan sarana dan prasarana jalan dan jembatan. Berikut adalah tabel yang menunjukkan panjang dan kondisi jalan di Kabupaten Raja Ampat :

Tabel 2.6. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan

No	Jenis Permukaan	Panjang Jalan (Km)	
		2009	2010
1.	Di aspal	1,81	3,91
2.	Kerikil	55,65	55,31
3.	Tanah	36,13	33,21
Jumlah Total		100,00	100,0

Sumber : Raja Ampat Dalam Angka 2011

Pengembangan transportasi di Kabupaten Raja Ampat terbagi menjadi beberapa pengembangan, yakni transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Pengembangan sistem transportasi jalan darat terbagi

menjadi pengembangan jalan kabupaten (Jalan Lokal Primer), pengembangan jalan desa (lingkungan), pembangunan dan peningkatan terminal.

Fasilitas jalan darat di Kabupaten Raja Ampat yang belum memadai (sebagian besar masih berupa jalan tanah) mengakibatkan jumlah kendaraan roda empat dan roda dua masih sedikit dan hanya terdapat di beberapa Distrik, seperti Waigeo Selatan, Waigeo Barat, Samate, Misool, dan Misool Timur Selatan. Dari data yang diperoleh jalan yang dapat dilalui roda 4 ada 13 jalan, sedangkan jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk yang dapat dilalui kendaraan roda 4 terdapat 75 jalan.

Untuk panjang jalan di Raja Ampat yang memiliki trotoar dan drainase atau saluran pembuangan air sudah sebanyak 3,1 persen, dan drainase yang berada dalam kondisi baik atau tidak tersumbat sebanyak 354,5. Keterbatasan infrastruktur juga memiliki imbas terhadap kemajuan beberapa sektor penting di Raja Ampat. Pembangunan infrastruktur tidak hanya terlepas pada pembangunan jalan-jalan, akan tetapi pembangunan perumahan dan pemukiman juga menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Tempat tinggal yang sehat dan layak merupakan kebutuhan yang masih sulit dijangkau oleh masyarakat miskin. Secara umum, masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat miskin di Raja Ampat adalah terbatasnya akses terhadap perumahan yang sehat dan layak huni, rendahnya mutu lingkungan permukiman, dan lemahnya status hukum kepemilikan perumahan. Kabupaten Raja Ampat sebagian besar perumahan penduduknya berada di Kepulauan pada wilayah rawan gempa, maka dari itu pemerintah di Raja Ampat mencanangkan konsep rumah sederhana, sehat, dan tahan gempa. Selain beberapa kriteria tersebut, pemerintah juga mengembangkan MCK umum dan sanitasi pada masyarakat. Di Kabupaten Raja Ampat untuk rumah yang layak huni pada tahun 2010 terdapat 670 rumah, dengan rasio rumah layak huni sebesar 65, dan rasio pemukiman layak huni sebesar 91,7. Akan tetapi masih terdapat 20 persen rumah di Kabupaten Raja Ampat yang berada di lingkungan pemukiman kumuh. Dari kesekian rumah tangga tersebut telah memiliki sanitasi baik sebanyak 84,70 persen.

Terkait masalah transportasi, kondisi geografis Raja Ampat terletak pada Kepulauan berimplikasi pada kebutuhan masyarakat dalam menggunakan akses transportasi tidak hanya pada transportasi darat, namun juga lebih bertumpu pada transportasi laut. Masyarakat memerlukan alat transportasi laut untuk memenuhi kebutuhan mobilitas antar kampung, ke ibukota Distrik, ataupun ke ibukota Kabupaten. Karena wilayahnya yang sebagian besar berada di lautan dari pada daratan, maka alat transportasi utama masyarakat Raja Ampat adalah perahu atau *boat* yang terdapat di setiap kampung. Hingga tahun 2010, untuk melayani kebutuhan mobilitas ke Sorong dan beberapa daerah lainnya di Raja Ampat, Pemerintah Kabupaten menyediakan beberapa kapal angkut yang beroperasi hanya beberapa kali saja dalam setiap bulan. Kontribusi sektor perhubungan terhadap Produk Domestik Regional Bruto atas angkutan jalan raya pada tahun 2008 sebesar 0,05 persen, dan pada tahun 2009 sebesar 0,06 persen, serta pada tahun 2010 meningkat menjadi 0,07 persen. Untuk angkutan laut pada tahun 2008 sebesar 0,63 persen, dan pada tahun 2009 sebesar 0,61 persen, serta pada tahun 2010 meningkat menjadi 0,69 persen. Angkutan Sungai memiliki kontribusi PDRB sebesar 0,05 persen pada tahun 2008, 2009, dan 2010. Jasa angkutan penunjang memiliki kontribusi terhadap PDRB sebanyak 0,07 dari tahun 2008-2010. Total jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus sebanyak 10 unit. Untuk angkutan darat sebanyak 0,0048, dengan kelengkapan rambu-rambu yang terpasang sebesar 70 persen. Kabupaten Raja Ampat memiliki empat buah pelabuhan laut yang sederhana, yaitu di Saonek (Distrik Waigeo Selatan), Kabare (Distrik Waigeo Utara), Salafen (Distrik Misool), dan Sakabu (Distrik Samate) dan beberapa dermaga kecil yang ada di setiap Distrik. Tahun 2010, jumlah dermaga yang dibangun sebanyak 4 (empat) buah dengan total anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan dermaga adalah sebesar Rp 2.400.000.000,- Pada Tahun 2011 dialokasikan sebesar Rp 3.450.000.000,- yang akan digunakan untuk pembangunan dermaga dan pembangunan fasilitas darat dermaga dan. Pengembangan dan peningkatan empat dermaga yang terletak di Waisai itu adalah Dermaga PKL, Dermaga PKLp, Dermaga PPK, dan Dermaga PPL.

2.3.4. Penataan Ruang dan Perencanaan Pembangunan

Guna mendukung pertumbuhan daya saing daerah, penataan ruang juga menjadi salah satu hal penting dalam perencanaan pembangunan ke depan, mengingat kondisi geografis, potensi kelautan dan pariwisata yang luar biasa sekaligus kondisi kerawanan bencana yang ada di Raja Ampat. Persoalan mendasar yang dihadapi Kabupaten Raja Ampat dalam mengembangkan wilayahnya adalah keterbatasan ruang di darat maupun di laut. Keterbatasan muncul karena sebagian besar (lebih dari 80 persen) merupakan kawasan lindung (kawasan lindung laut maupun kawasan lindung darat). Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HBG sebanyak 0,4. Guna mendukung pertumbuhan daya saing daerah, penataan tata ruang juga menjadi salah satu hal penting dalam perencanaan pembangunan ke depan, mengingat kondisi geografis, potensi kelautan dan pariwisata yang luar biasa sekaligus kondisi kerawanan bencana yang ada di Raja Ampat. Adapun total luas wilayah produktif sebesar 99 persen. Sedangkan wilayah industri seluas 14,13 persen, wilayah kebanjiran 22,79 persen, wilayah kekeringan 35,55 persen dan wilayah perkotaan yang masih sangat minim, yakni hanya sebesar 10,23 persen.

Pembangunan Raja Ampat memanfaatkan berbagai sumberdaya potensial yang tersedia. Perencanaan pembangunan Raja Ampat lebih menekankan pada sektor-sektor unggulan yakni perikanan dan kelautan, pariwisata, perhubungan, dan pertambangan. Oleh karena itu, arah perencanaan program pembangunan daerah Kabupaten Raja Ampat dapat difokuskan pada beberapa kegiatan antara lain bidang ekonomi, bidang sarana dan prasarana, serta bidang sosial budaya. Dengan konsep integrasi pengembangan wilayah kelautan dan agropolitan

pengembangan kawasan di wilayah Raja Ampat menempatkan pengembangan kawasan pertanian, perkebunan dan budidaya kelautan yang menjadi kegiatan budidaya utama.

Penataan ruang Raja Ampat lebih menekankan pada sektor kelautan. Jenis kegiatan yang dilakukan adalah pengembangan pariwisata kelautan yang berdampak sektor pariwisata. Secara keseluruhan, pengembangan pariwisata kelautan merupakan kegiatan pembangunan yang selaras dengan karakteristik alam Kabupaten Raja Ampat. Berdasarkan potensi sumberdaya alamnya, Kabupaten Raja Ampat sedikitnya memiliki 8 (delapan) Pulau yang dapat dikembangkan sebagai kawasan andalan pengembangan. Karena pengembangan Pulau-Pulau tersebut tidak dapat dilakukan secara parsial, maka konsep pengembangan struktur ruangnya dikembangkan dalam bentuk kluster-kluster pengembangan wilayah. Kluster-kluster tersebut diharapkan dapat berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru yang saling berinteraksi dan bersinergi membentuk pertumbuhan wilayah Kabupaten secara berkelanjutan.

Tabel 2.7. Rencana Pengembangan Kawasan di Kabupaten Raja Ampat

No	Kluster	Arahan Pengembangan
1.	Pulau Waigeo dan sekitarnya	1. Pusat Pemerintahan 2. Agroindustri 3. Wisata dan Riset Sumberdaya Alam Hayati 4. Infrastruktur Regional
2.	Pulau Mansuar dan sekitarnya	1. Wisata Bahari
3.	Pulau Ayau dan sekitarnya	1. Kelautan 2. Kawasan Perbatasan
4.	Pulau Misool dan sekitarnya	1. Agropolitan 2. Budidaya Kelautan
5.	Pulau Kofiau, Boo dan sekitarnya	1. Pusat Riset Ekosistem Perairan 2. Budidaya Pertanian dan Perikanan 3. Konservasi
6.	Pulau Bantata, Salawati, dan sekitarnya	1. Kawasan Pertambangan 2. Agroindustri 3. Kehutanan
7.	Pulau Gag dan sekitarnya	1. Pertambangan 2. Budidaya Kelautan 3. Kehutanan
8.	Pulau Wayag dan sekitarnya	1. Wisata dan Riset Kelautan

Sumber : Hasil Analisis, RTRW 2011-2030

Selanjutnya untuk membangun struktur ruang tersebut minimal ada 2 (dua) hal yang harus diupayakan pengembangannya yaitu pengembangan dan pemerataan infrastruktur serta peningkatan kapasitas ekonomi di beberapa wilayah prioritas mengingat ada beberapa kawasan di Raja Ampat yang masih tertinggal. Pengembangan dan pemerataan infrastruktur di wilayah ini mutlak diutamakan. Hal ini karena masih rendahnya tingkat pelayanan infrastruktur dasar di semua wilayah yang akan berdampak pada terbatasnya kemampuan penduduk setempat dalam mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki.

2.3.5. Lingkungan Hidup, Pertanahan, ESDM, dan Kehutanan

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan pilar penting dalam pembangunan di Raja Ampat. Pada tahun 2010 program yang dilaksanakan untuk urusan pertambangan dan energi mencapai Rp 29.415.251.000,-. Wilayah Raja Ampat yang belum memiliki bangunan-bangunan liar menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan baik domestik maupun manca negara. Kabupaten Raja Ampat kaya dengan keanekaragaman hayati yang unik dan spesies-spesies endemik, baik flora maupun fauna. Hal ini menjadikan Kabupaten Raja Ampat sebagai area prioritas untuk kegiatan konservasi.

Penanganan sampah di Raja Ampat baru dapat tertangani sebesar 40 persen, dan tempat pembuangan sampah per satuan penduduk sebesar 30 persen. Melihat jumlah tersebut, dapat dikatakan bahwa pengelolaan sampah yang dilakukan Raja Ampat belum berjalan maksimal.

Untuk penataan lingkungan sendiri, persentase pemukiman yang tertata adalah sebesar 60 persen dengan cakupan penghijauan wilayah sumber mata air mencapai 40 persen. Peningkatan pelestarian lingkungan hidup menjadi pedoman dalam mengendalikan konservasi yang sesuai dengan AMDAL. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam menjadi perhatian Kabupaten Raja Ampat yang kaya akan hasil laut. Di masa yang akan datang, Raja Ampat sebagai kawasan bahari harus melakukan pengembangan pengelolaan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air yang dapat meningkatkan PAD Raja Ampat.

Raja Ampat sebagai wilayah Kepulauan memiliki perbandingan wilayah darat dan laut sebesar 1:6, dengan wilayah perairan yang lebih dominan. Keberadaan wilayah daratan yang sebagian besar sudah dihuni oleh penduduk ditargetkan melalui sistem pendaftaran tanah yang berguna untuk kepemilikan hak tanah. Raja Ampat

telah melakukan sosialisasi pendaftaran tanah serta penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sehingga penduduk memiliki data administratif kepemilikan dan pemanfaatan pertanahan di Raja Ampat. Tahun 2010, perumahan di Kabupaten Raja Ampat yang telah tercatat seluas 358.266 m² (22.42 persen).

Kabupaten Raja Ampat dalam sejarah perkembangannya merupakan salah satu kawasan lindung di Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Sorong pada khususnya. Sebagai akibatnya, pengembangan sistem energi berupa sistem kelistrikan yang terintegrasi tidak bisa dilakukan di wilayah ini. Selain itu dengan karakteristik wilayah Kepulauan, sangat sulit untuk membangun sistem intra koneksi kelistrikan. Dengan karakteristik wilayah yang terdiri dari Pulau-Pulau kecil ini, maka pengembangan sistem energi kelistrikannya membutuhkan suatu pendekatan teknologi yang lebih mampu menciptakan suplai listrik yang terbaharukan dan mandiri. Kontribusi sektor listrik dan air bersih terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2008 sebesar 0.05 persen, tahun 2009 sebesar 0.05 persen, dan tahun 2010 sebesar 0.05 persen.

Beberapa kawasan yang telah mendapatkan pelayanan listrik, antara lain Desa Kabare, Desa di Pulau Gag, Desa Waigama walaupun terbatas dan Desa Lenmalas di Pulau Misool dan beberapa desa ibukota Distrik lainnya. Dilihat dari teknologinya, sebagian besar pembangkit listrik yang digunakan adalah PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel). Jumlah rumah tangga yang telah menggunakan listrik sebesar 82,17 persen, sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas rumah penduduk di Kabupaten Raja Ampat sudah mendapatkan layanan listrik. Khusus untuk Pulau Gag dan Lenmalas, sistem jaringan distribusi listrik yang ada merupakan peninggalan dan dibangun oleh investor yang pernah melakukan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Namun karena investor telah pergi, maka operasionalisasi sistem pembangkit listrik ini dilakukan secara swadaya oleh masyarakat khususnya di Pulau Gag. Di samping PLTD, beberapa kawasan juga menggunakan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya). Lokasi yang telah menggunakan energi ini antara lain di Desa Kabare, Pulau Deer, dan di Misool, Desa Yenbekwan P. Mansuar. Namun demikian penggunaannya baru terbatas untuk penerangan rumah ataupun jalan desa. Hal ini dikarenakan kapasitas PLTS tersebut masih dalam skala rumah tangga dengan daya maksimum 30 Watt. PLTS merupakan salah satu bentuk teknologi Energi Baru yang Terbaharukan.

Potensi lain yang dimiliki Kabupaten Raja Ampat adalah pertambangan. Laju pertumbuhan PDRB pertambangan tahun 2008 sebesar 55.45 persen, untuk tahun 2009 sebesar 53.21 persen, dan pada tahun 2010 sebesar 49.95 persen. Berdasarkan data sekunder pertambangan di Raja Ampat meliputi :

- a. Pulau Gag, Manyaugia, Pulau Wayag, Pulau Waigeo (Kabare dan Teluk Sanpa) dengan potensi penambangan nikel dan kobalt.
- b. Pulau Yanggelo dan lepas pantai P. Misool dengan potensi minyak bumi.
- c. Pulau Salawati, Batanta, Gag dan Waigeo dengan potensi tembaga.

Namun potensi yang telah terbukti menghasilkan adalah pertambangan nikel di Pulau Gag dan eksplorasi minyak bumi oleh Petrol China di lepas pantai Misool sebelah utara dekat Desa Lenmalas dan Mios. Khusus Pulau Gag penambangan nikel telah terjadi hambatan, karena terjadi tumpang tindih antara areal pertambangan dengan kawasan hutan lindung terutama setelah terbitnya UU Nomor 41 tahun 1999. Berdasarkan UU tersebut pertambangan terbuka di kawasan hutan lindung tidak diijinkan, di samping melanggar Undang-undang Nomor 41 tahun 1999, juga mengingat pentingnya kawasan lindung dan kawasan konservasi sebagai sistem penyangga kehidupan. Berikut ini adalah perusahaan tambang yang masih berkembang di Kabupaten Raja Ampat :

- a. PT Anugrah Surya Pratama (Eksplorasi). Luas perusahaan ini adalah 9.500 Ha, dan mencakup lokasi Yembekaki, Puper, Warwanai, Asukweri, Kabare, Bonsayor. Distrik Waigeo Timur, Warwabomi, Waigeo Utara.
- b. PT Pasifik Nikel Mining (Eksplorasi). Luas perusahaan ini adalah 10 Ha, dan berada di lokasi Kabare, Bonsayor (Distrik Waigeo Utara).

2.3.6. Ketenagakerjaan, Kependudukan Catatan Sipil dan Ketransmigrasian

Sektor ketenagakerjaan, penduduk Kabupaten Raja Ampat mayoritas menggantungkan hidupnya dari sumberdaya alam yang ada di wilayahnya. Profil rumah tangga masyarakat di Kabupaten Raja Ampat didominasi oleh rumah tangga nelayan dan aktifitas mereka yang sangat dipengaruhi oleh musim. Nelayan melaut di saat ombak tenang. Saat tidak melaut aktifitas yang mereka lakukan lebih banyak berkebun dan berburu. Selain nelayan dan petani, sebanyak 848 jiwa atau 8,65 persen penduduk Kabupaten Raja Ampat berprofesi sebagai buruh/ karyawan pada perusahaan-perusahaan mutiara yang terdapat di Distrik Waigeo Barat, Distrik Samate, Distrik Misool dan Distrik Misool Timur Selatan. Hadirnya perusahaan-perusahaan mutiara seperti PT. Yellu Mutiara, PT.Cendana Indopearls dan PT. Arta Samudera di wilayah Kabupaten Raja Ampat memberikan kesempatan masyarakat untuk memperoleh penghasilan selain dari bertani dan nelayan.

Pada tahun 2010, sektor ketenaga kerjaan telah merealisasikan program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja dengan kegiatan fasilitasi pendukung pasar kerja, melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kelembagaan, peningkatan informasi dan penyelenggaraan bursa kerja. Sasaran yang dicapai yaitu tersedianya sarana dan prasarana produktif dan tersedianya lapangan kerja baru melalui terapan teknologi tepat guna. Realisasi pelaksanaan program berupa terselenggaranya pelayanan informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja serta tersedianya sarana dan prasarana padat kerja berupa satu jalan lingkungan sepanjang 1500 meter. Hal ini merupakan hal yang bagus, karena dengan begitu masyarakat mampu mandiri, tidak lagi mengandalkan pekerjaan yang bergantung pada alam dan perusahaan. Untuk angka atau tingkatan partisipasi

angkatan kerja, di Raja Ampat sudah mencapai 65 persen. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 35 persen. Angka sengketa pengusaha dengan pekerja pertahun mencapai 51,4 persen, dan perlindungan serta keselamatan kerja sudah mencapai 85,7 persen.

Indikator ketenagakerjaan terpenting adalah tentang proporsi penduduk yang bekerja. Adapun Persentase penduduk Kabupaten Raja Ampat yang Berumur 15 Tahun ke Atas menurut jenis kegiatan utama yang bekerja terhadap angkatan kerja mengalami kenaikan dari 95,97 persen pada tahun 2007 menjadi 97,03 persen di tahun 2008, namun mengalami penurunan lagi pada tahun 2009 menjadi 94,62 persen.

Untuk tantangan Kabupaten Raja Ampat kedepannya berkaitan dengan sektor ketenagakerjaan adalah kemampuan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja. Hal tersebut dapat diawali oleh adanya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program tahun 2010, khususnya dari sektor tenaga kerjanya. Dari berbagai evaluasi tersebut, jika masih ditemui beberapa kekurangan diharapkan mampu untuk menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja dan pengembangan usaha mandiri sendiri, sehingga dapat terbangun sarana penunjang latihan kerja.

Kabupaten Raja Ampat patut mengantisipasi ketersediaan informasi kependudukan yang berkualitas untuk keperluan penyusunan laporan kependudukan setiap tahunnya, mengingat pertumbuhan penduduk yang signifikan setiap tahun. Untuk pencatatan kependudukan dan catatan sipil, jumlah kepemilikan KTP sebanyak 44,7 persen, dengan rasio penduduk yang memiliki KTP persatuan penduduk sebesar 0,76. Ini menunjukkan bahwa penduduk di Kabupaten Raja Ampat belum memiliki kesadaran akan pentingnya KTP. Sedangkan kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk sebesar 5203, dengan rasio bayi yang telah memiliki akte kelahiran 70 persen, dan rasio pasangan berakte nikah sebesar 75 persen. Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa penduduk di Raja Ampat sudah memiliki kesadaran tertib administrasi kelahiran, terlihat dari besarnya jumlah persentase penduduk yang telah memiliki akte.

Jika melihat pertumbuhan penduduk di Kabupaten Raja Ampat selama ini selalu bertambah, karena perpindahan penduduk secara spontan ataupun yang diatur oleh pemerintah Indonesia melalui kebijakan program transmigrasi. Sekitar 17 persen penduduk di tanah Papua adalah kaum transmigran. Hal ini belum termasuk anak dan keturunannya, bahkan kemungkinan jumlah penduduk transmigran bertambah sesuai dengan tingkat ekonomi dan pendapatan yang semakin baik. Hingga tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat telah melaksanakan program pengembangan transmigrasi, yaitu dengan :

- a. Pengadaan fasilitas pertanian dan perikanan kepada transmigrasi lokal. Hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut adalah tersedianya peralatan pertanian dan perikanan.
- b. Penyediaan dana pembangunan perumahan transmigrasi lokal. Hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut adalah tersedianya sarana perumahan transmigrasi lokal.
- c. Pelatihan untuk transmigrasi lokal. Hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut adalah terlaksananya pelatihan pertanian dan perikanan.
- d. Lanjutan pembangunan rumah nelayan di Yenbeser. Hasil yang dicapai dari program tersebut adalah tersedianya rumah nelayan type 36.
- e. Pematangan tanah transmigrasi lokal. Hasil yang dicapai dari program tersebut adalah tersedianya areal atau lahan permukiman transmigrasi lokal.

Berikut ini disajikan pula data mengenai pembangunan rumah yang diperuntukkan bagi transmigran lokal, yang juga merupakan bagian dari program kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Raja Ampat :

Tabel 2.8. Pembangunan Rumah Bagi Transmigran Lokal

No	Tahun	Nama Lokasi/ Kelurahan	Jumlah Rumah
1	2006	Kelurahan Warmasen	25 unit
2	2007 – 2008	Kampung Kobeoser, Kelurahan Waisai	75 unit
		Kimindores, Kelurahan Sapor Danco	25 unit
3	2009	Ransbar	300 unit
		Kelurahan Bonkawir	100 unit
4	2010	Trans Nelayan Kampung Raswan Distrik Waisei Selatan	25 unit
5	2011	Kampung Wayom Distrik Salawati Barat	25 unit

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2010

Hambatan utama dari sektor transmigrasi bagi Kabupaten Raja Ampat adalah Transmigrasi di Raja Ampat menyediakan fasilitas pertanian dan perikanan yang merupakan komoditas yang berpotensi di Raja Ampat. Pemerintah memberikan Jadup (Jatah Hidup) pada masyarakat transmigrasi sehingga terbangun pemukiman transmigrasi sesuai dengan program yang ada. Akan tetapi yang menjadi tantangan ke depan adalah ketepatan pemberian fasilitas-fasilitas dan terdistribusikannya jatah hidup pada masyarakat transmigrasi.

2.3.7. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dalam rangka pemberdayaan perempuan yang ada di kampung dan Distrik, sejak tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Raja Ampat mengalokasikan anggaran bagi tim penggerak PKK di 97 kampung. Setiap kampung mendapat kucuran dana sebesar 25 juta rupiah. Dana tersebut dikelola pengurus PKK kampung berdasarkan program dan kebutuhan masing-masing. Sedangkan untuk 17 tim penggerak PKK Distrik, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat memberikan bantuan modal stimulan koperasi sebesar 170 juta rupiah atau 10 juta rupiah per tim penggerak PKK Distrik. Kaum perempuan memiliki peran strategis dalam memajukan sebuah daerah. Bahkan bila diberi ruang dan kesempatan, bukan tidak mungkin kaum perempuan turut menentukan perjalanan dan kemajuan daerah.

Di Kabupaten Raja Ampat kaum perempuan selain diberikan kesempatan untuk mengelola dana rencana strategi pengembangan kampung, juga mengembangkan kehidupan koperasi, serta diberikan kesempatan untuk mengikuti berbagai pelatihan dan studi banding dalam rangka mengembangkan ilmu dan wawasan. Kebijakan ini untuk meningkatkan peran aktif perempuan dalam pembangunan untuk meminimalisasi kebijakan-kebijakan yang berbatas gender. Hal ini tak perlu dilakukan lagi, tetapi peran-peran sosial antara laki-laki dan perempuan harus dipadukan menjadi mitra yang sejajar dalam berbagai bidang untuk mencapai tujuan bersama. Berdasarkan Rada 2011, Persentase tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Raja Ampat menunjukkan sebesar 42,27 persen, sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat partisipasi perempuan masih rendah dalam angkatan kerja. Pada tahun 2010 dialokasikan anggaran, sebesar Rp. 6.842.902.000 yang ditujukan untuk meningkatkan pengembangan sanggar PKK, penataan administrasi PKK, pengembangan kualitas posyandu serta penyuluhan KB. Pada tahun 2011 dialokasikan lagi anggaran sebesar Rp. 7.038.120.000 yang ditujukan untuk melanjutkan dan meningkatkan pengembangan sanggar PKK, penataan administrasi posyandu serta Penyuluhan KB. Rasio akseptor KB di Kabupaten Raja Ampat sudah mencapai 94 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah sadar dengan program KB yang dicanangkan oleh Pemerintah, dan jumlah rata-rata anak per keluarga sebesar 0,34 persen.

Tantangan persoalan ke depan mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah minimalnya peran perempuan di Kabupaten Raja Ampat. Jika melihat data 2010 diketahui bahwa partisipasi perempuan di lembaga pemerintahannya sebanyak 20,63 persen, sedangkan untuk partisipasi perempuan di lembaga swasta jauh lebih baik yakni sebesar 33,33 persen. Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas sebesar 42 persen dan partisipasi angkatan kerja perempuan sebanyak 12,05 persen. Alternatif solusi untuk tantangan tersebut adalah harus dibuka atau didata secara pasti angkatan kerja perempuan, kemudian diberikan kesempatan yang lebih untuk perempuan bekerja di sektor formal maupun informal dengan diberikan fasilitasi pendidikan agar memperoleh pendidikan yang layak dan persentase melek huruf meningkat.

Pemberdayaan masyarakat dan desa memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Meskipun desa dalam struktur pemerintahan berada di level yang paling bawah, akan tetapi justru terdepan dan langsung berada di tengah masyarakat. Sejak tahun 2010 program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan antara lain adalah melanjutkan program Rencana Strategis Pembangunan Kampung (Respek), kegiatannya meliputi : monitoring, evaluasi dan pelaporan dana Respek; pendampingan/ pengelolaan administrasi kegiatan PNPM Mandiri-Respek serta fasilitasi pendampingan dana Respek.

Tantangan permasalahan yang muncul untuk sektor pemberdayaan masyarakat adalah masih rendahnya pemahaman pengelola pemberdayaan masyarakat kampung dalam memberikan penyuluhan masyarakat desa dan masih kurangnya dana infrastruktur kepada pemerintah kampung untuk membiayai pembangunan infrastruktur, peningkatan dan pemeliharaan di bidang ekonomi kerakyatan. Solusi yang mungkin untuk dimunculkan adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Raja Ampat melalui PNPM pedesaan dengan Distrik, guna terselenggaranya pelatihan ekonomi produktif dalam pemanfaatan sumberdaya alam Kabupaten Raja Ampat.

Program keluarga berencana bertujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Raja Ampat. Jumlah penduduk di Raja Ampat akan berkaitan dengan pendapatan perkapita. Untuk keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I, di Raja Ampat sebesar 49,27 persen. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melakukan beberapa program diantaranya adalah meningkatkan pelayanan KB, dan melakukan sosialisasi penggunaan alat kontrasepsi mengingat penduduk di Raja Ampat banyak yang belum mengetahui cara penggunaannya. Selain itu, program lain yang menjadi perhatian BKKBN Raja Ampat adalah terdistribusinya kader-kader penyuluh dan tercapainya pendataan Pra KB dan KB di Raja Ampat.

2.3.8. Sosial dan Kebudayaan

Dengan kondisi geografis, yang merupakan wilayah Kepulauan dan wilayah paling barat dari rangkaian Kepulauan Pulau besar New Guinea, Kepulauan Raja Ampat menjadi daerah yang secara antropologis dan linguistik merupakan daerah yang mendapat sebutan keragaman (*an area of diversity*). Istilah keragaman ini sangat tepat dipakai untuk menggambarkan situasi sosial dan budaya yang merupakan perpaduan antara budaya asli Kabupaten Raja Ampat dengan budaya yang dibawa oleh pendatang-pendatang, baik dari wilayah lain di Papua maupun luar Papua. Sarana sosial yaitu panti asuhan di Raja Ampat ada sebanyak 2 unit, dan untuk penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial sudah mencapai 90 persen.

Di Kabupaten Raja Ampat terdapat tiga suku besar yaitu **pertama Suku Ma'ya** yang terdiri dari suku Moi, Modik, Klaba, Matbat dan Karon yang mendiami Pulau Salawati, Pulau Batanta, Pulau Misool dan Pulau

Waigeo; **kedua, Suku Biak** yang terdiri dari suku Biak, Numfor, Wardo, Usba dan Beser yang mendiami daerah Pulau Waigeo, Pulau Misool dan sebagian Salawati; dan **ketiga, Suku Ambel** terdiri dari suku Ambel, Fiawat, Laganyan, Wawiyai, Kawe dan Kafdarun yang mendiami Salawati, Misool, Waigeo Selatan dan Waigeo Utara. Tiap suku bangsa mempunyai lembaga adat istiadat dan budaya sendiri yang berbeda satu dengan lainnya.

Ciri-ciri budaya masyarakat lokal tersebut antara lain : hidupnya berkelompok dan berpencar berdasarkan suku serta bergantung pada alam, sehingga hidupnya ada yang sering berpindah kecuali yang mengenal budaya modern; tali persaudaraan sesama suku yang sangat kuat; menganut sistem keturunan garis ayah dan garis ibu; mengenal kepercayaan magis dan memiliki Tata Cara adat.

Persoalan sosial budaya yang mendasar dihadapi oleh Kabupaten Raja Ampat jika dilihat dari paparan diatas adalah mengenai tata pengelolaan keanekaragaman dan kekayaan budaya, seperti salah satu contohnya kelengkapan dokumen sejarah dan kepurbakalaan Kabupaten Raja Ampat. Karena, jika dicermati Kabupaten Raja Ampat terdiri dari berbagai Pulau-Pulau kecil sehingga dimungkinkan pengelompokan data tentang kebudayaan dilakukan oleh masing-masing Pulau. Kedepannya diharapkan budaya-budaya dari masing-masing Distrik di Kabupaten Raja Ampat tersebut dapat terangkat kepublik guna mencirikan wilayah Kabupaten melalui berbagai program festival budaya, muatan lokal pendidikan serta terkelolanya situs-situs sejarah dengan rapi dan apik.

2.3.9. Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Penanaman Modal

Sumberdaya Alam (SDA) dan lingkungan merupakan salah satu faktor kunci dalam pembangunan, selain sumberdaya manusia. Sumberdaya alam mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting bagi kehidupan dan memiliki banyak manfaat ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung (secara finansial maupun non finansial) berupa manfaat ekologis yang dapat dinilai dalam harga.

Perkembangan pembangunan di segala bidang dapat memacu terjadinya pergeseran pada beberapa sektor, diantaranya sektor industri. Perkembangan sektor industri yang cukup pesat, akan memicu percepatan pembangunan di Kabupaten Raja Ampat terutama dalam hal peningkatan pendapatan daerah, penyerapan tenaga kerja lokal, tenaga kerja antar Kabupaten dan Provinsi, serta pemberian biaya kompensasi kepada pemilik hak ulayat. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yakni pada industri kecil kerajinan rumah tangga ditahun 2008 sebesar 0,18 persen, tahun 2009 sebesar 0,19 persen dan di tahun 2010 sebesar 20,21 persen. Untuk pertumbuhan sektor industri tercatat sebanyak 15 persen, jika dilihat berdasarkan RADA tahun 2009 dan 2011 terlihat bahwa sektor industri kecil meningkat dengan bertambahnya kelompok industri. Pada tahun 2009 tercatat jenis industri kecilnya meliputi pengolahan pangan, anyaman tangan, pengolahan kayu dan penjahit. Pada tahun 2010 jumlah industri kecil bertambah jenisnya, meliputi : kimia, agro dan hasil hutan; sandang, kulit dan aneka; serta logam, mesin dan elektronika. Sedangkan untuk industri besarnya adalah sektor industri budidaya mutiara di Kabupaten Raja Ampat.

Kabupaten Raja Ampat merupakan kabupaten yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di Indonesia. Potensi perikanan dan kelautannya sangat berlimpah dan memiliki prospek untuk dikembangkan, sehingga pertumbuhan sektor industri perikanan mengalami peningkatan yang pesat dibandingkan sektor industri lainnya. Sektor industri perikanan yang berkembang mulai dari skala industri rumahan sampai dengan skala industri menengah dan besar. Sektor industri perikanan paling besar didominasi oleh kegiatan produksi budidaya mutiara. Mutiara tersebut sebagian besar dieksporke beberapa negara seperti Jepang, Singapura, Australia, dan Hongkong. Selain ke negara-negara tersebut, mutiara ini juga dijual ke pasar domestik seperti Makassar, Surabaya, Jakarta dan Medan. Mutiara dan rumput laut merupakan barang pokok dalam perdagangan dikabupaten Raja Ampat. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB yakni pada tahun 2008 sebesar 2,47 persen; tahun 2009 sebesar 2,56 persen dan di tahun 2010 sebesar 2,91 persen.

Dalam tahun 2010 alokasi dana pada sektor-sektor perekonomian mencapai Rp 14.940.000.000 yang juga dialokasikan pada bantuan modal dan peralatan serta bantuan usaha industri kecil dan perdagangan. Usaha-usaha peningkatan perekonomian rakyat akan terus mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Raja Ampat karena terkait dengan salah satu misi yang diemban. Pada tahun 2011 upaya-upaya pembiayaan sektor perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM terus ditingkatkan. Pada tahun ini selain melanjutkan program dan kegiatan tahun lalu, juga dilakukan expo keluar daerah guna memperkenalkan produk-produk daerah untuk menarik para investor untuk datang menanamkan modal usahanya sehingga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Permasalahan mendasar yang mungkin muncul kedepannya untuk Kabupaten Raja Ampat adalah terbatasnya kualitas sumber daya aparatur, terbatasnya pengetahuan tentang pengelolaan pasar tradisional pada modal dan mengingat kondisi geografis Kabupaten Raja Ampat merupakan daerah kepulauan sehingga untuk menjangkau lokasi per lokasi kegiatan memerlukan biaya yang besar.

Penanaman modal atau investasi langsung di sektor riil mempunyai peran yang dominan dalam pembangunan perekonomian daerah di wilayah kabupaten Raja Ampat. Kegiatan ini selain memberikan efek pengganda pada pertumbuhan pendapatan daerah, penanaman modal juga mampu mendorong peningkatan daya beli masyarakat di lokalitas di mana investasi tersebut dilakukan. Seluruh rangkaian kegiatan penanaman modal didaerah pada akhirnya akan memberikan dampak pada peningkatan kemampuan perusahaan-perusahaan di daerah dan masyarakat melakukan pembayaran pajak pada kas pemerintahan daerah.

Wilayah Kabupaten Raja Ampat yang kaya akan potensi alam baik pariwisata maupun hasil laut berupa mutiara juga merupakan salahsatu sektor yang mampu dikembangkan untuk penanaman modalasing. Untuk tantangan persoalan kedepan yang mungkin dihadapi adalah peningkatan promosi dan kerjasama investasi,

sekiranya Kabupaten Raja Ampat harus mampu menampilkan contoh-contoh produk unggulan mutiara mereka dan menyediakan informasi yang lengkap. Selain itu, dapat juga dilakukan media expo guna menarik investor untuk berinvestasi.

2.3.10. Kepemudaan dan Olah Raga

Di bidang Pemuda dan Olah raga, hingga tahun 2010 terus dilakukan peningkatan fasilitas dan pembinaan terhadap pemuda dan 24 cabang olah raga, mulai dari pembinaan pelatih dan fasilitasi kegiatan olah raga hingga pengembangan kapasitas SDM pemuda. Namun keterbatasan fasilitas, sarana prasarana penunjang masih menjadi kendala bagi pengembangan seni budaya dan olah raga, misalnya belum ada gedung kantor, gedung kesenian dan olah raga yang representatif. Gedung olah raga yang ada hanya 1 dengan jumlah total klub olah raga sebanyak 15 klub. Jadi Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur, fasilitas serta sarana prasarana di bidang kebudayaan dan olah raga menjadi sesuatu yang tidak bisa dikesampingkan di masa mendatang.

2.3.11. Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Pemerintah Kabupaten Raja Ampat terus mengupayakan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan. Keamanan dan kenyamanan lingkungan menjadi prioritas utama dalam menjaga stabilitas Raja Ampat mengingat daerah ini berada dekat dengan daerah yang rawan dengan konflik. Selain itu, Raja Ampat melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal sebagai wujud keamanan lingkungan. Cakupan patroli petugas satuan Polisi Pamong Praja adalah 730 wilayah, dengan rasio jumlah per 1000 penduduk sebesar 14,11. Sedangkan untuk jumlah Linmas (Petugas Perlindungan Masyarakat) adalah sebesar 1,24 persen, serta linmas perjumlah desa atau kelurahan sebanyak 124,68 dengan rasio pos siskamling sebesar 0,10 persen. Kendalanya, tingkat kesadaran masyarakat masih rendah dalam melakukan penjagaan keamanan lingkungan, sehingga dinas terkait seperti Satpol PP harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

Untuk tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan, dan Keindahan) di Kabupaten sudah mencapai 80 persen. Selain itu, dilakukan peningkatan pelayanan kedinas melalui koordinasi dengan dinas-dinas terkait dan melakukan study banding ke daerah yang telah berhasil melaksanakan pelayanan dengan baik. Cakupan sarana dan prasarana perkantoran yang menunjang pelayanan publik mencapai 61,8 persen. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah terselenggara secara sistematis dengan adanya pelaporan dan identifikasi anggaran. Adanya penilaian aset daerah dan terpeliharanya aplikasi daerah merupakan salah satu tujuan jangka panjang pengelolaan keuangan daerah di Raja Ampat.

2.3.12. Ketahanan Pangan dan Pertanian

Ketahanan pangan merupakan upaya baik dari pemerintah Raja Ampat maupun dari masyarakat Raja Ampat dalam mencukupi kebutuhan pangan. Raja Ampat telah memiliki program ketahanan pangan yaitu dengan memfokuskan perhatian pada daerah-daerah yang rawan pangan. Raja Ampat juga mengupayakan desa mandiri pangan. Pemerintah memberikan pembinaan agar masyarakat di Raja Ampat mampu mencari dan mengupayakan pangan terutama dari sumber daya yang telah tersedia. Pemerintah Raja Ampat juga mengembangkan cadangan pangan daerah yang dapat digunakan sebagai cadangan makanan apabila terjadi krisis pangan. Ketersediaan pangan utama di Kabupaten Raja Ampat sebesar 70,5 persen. Produktivitas padi di Raja Ampat hanya ditemui di Distrik Salawati dengan lahan seluas 80 Ha mampu memproduksi secara keseluruhan 35 ton dengan tingkat rata-rata produktivitas sebanyak 4.37 kwintal/ha. Sedangkan tanaman pangan lainnya di Raja Ampat yang berpotensi adalah jagung, ubi kayu dan ubi bakar. Secara keseluruhan, produktivitas jagung di Raja Ampat mencapai 124 kwintal di tahun 2010, dan ubi kayu, ubi bakar sebanyak 166 kwintal. Data mengenai persebaran luas lahan, produktivitas, dan rata-rata produktivitasnya dapat dilihat dari tabel Hasil Produktivitas Pertanian.

Tabel 2.9. Hasil Produktivitas Pertanian Tahun 2010

No	Nama Distrik	Luas Lahan (Ha)				Produktivitas (Kw/Ha)				Rata-rata produktivitas			
		Jagung	Kedelai	Kacang Tanah, Kacang Hijau	Ubi Kayu, Ubi Bakar	Jagung	Kedelai	Kacang Tanah, Kacang Hijau	Ubi Kayu, Ubi Bakar	Jagung	Kedelai	Kacang Tanah, Kacang Hijau	Ubi Kayu, Ubi Bakar
1	Misool Selatan												
2	Misool Barat	8		2	11	11		1	13	13.7		5.0	12.25
3	Misool	9		7	12	12		3	14	13.3		10.5	11.7
4	Kofiau	6			5	8			9	13.3			17.5
5	Misool Timur	7		2	11	10		1	12	14.3		5.0	11
6	Kep. Sembilan	4			6	9			10	20.25			14.25
7	Salawati Utara	30	20	40	35	20	4	5.5	36	6.7	2.00	3.1	10.15
8	Salawati Tengah												
9	Salawati Barat												
10	Batanta Selatan	4		2	8	9		1	12	22.5		5.0	15
11	Batanta Utara												
12	Waigeo Selatan	12		2	17	13		1	17	10.8		10.0	9.9
13	Kota Waisai												
14	Teluk Mayalibit	3			5.5	4			8	13.3			17.8
15	Tiplol Mayalibit												
16	Meosmansar												
17	Waigeo Barat	5			4	10			8	20.0			20.0
18	Waigeo Barat Kep.												
19	Waigeo Utara	20			15	10			9	12.5			7.5
20	Warwabomi	82			4	3			7	15.0			17.5
21	Supnin												
22	Kepulauan Ayau												
23	Ayau												
24	Waigeo Timur	4			8	5			11	12.5			13
	Jumlah	194	20	55	136	124	4	7	166	188.15		38.6	39

Sumber : Raja Ampat Dalam Angka 2011

Sektor pertanian terdiri dari sub sektor tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan.

Untuk fokus kemampuan ekonomi daerah salah satu hal yang dilihat adalah besarnya nilai tukar petani. Untuk Raja Ampat hingga tahun 2010, besar nilai tukar petani sebesar 92.35 persen. Kontribusi sektor pertanian atau perkebunan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan, pada tahun 2008 kontribusi PDRB sektor perkebunan sebesar 10.225,40, pada tahun 2009 sebesar 12.818,84, dan pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 15.619,53. Kawasan pertanian di Kabupaten Raja Ampat dapat dikatakan masih sangat terbatas. Komoditi yang terdapat hampir di semua Distrik adalah kelapa. Komoditi padi hanya terdapat di Distrik Samate yang memang menunjukkan perkembangan kawasan perkebunan dan pertanian yang terus meningkat. Cakupan bina kelompok petani di wilayah Kabupaten Raja Ampat terdiri dari 20 kelompok yang meliputi petani ubi kayu, ubi jalar, sagu dan tanaman palawija.

Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yakni pada tahun 2008 sebesar 1,09 persen, tahun 2009 sebesar 1,21 persen dan di tahun 2010 sebesar 1,381 persen. Untuk kontribusi produksi kelompok petani terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada saat ini belum ada, namun diharapkan di tahun 2013 mendatang kelompok petani sudah mampu berkontribusi.

2.3.13. Komunikasi dan Informatika, Kearsipan, Perpustakaan dan Statistik

Wilayah Kabupaten Raja Ampat memiliki ratusan pulau-pulau kecil yang terpisah satu dengan lainnya. Sesuai dengan konsep kluster pengembangan pulau-pulau di wilayah ini, makapengembangan sistem telekomunikasi mengacu pada sistem pembagian tersebut. Berdasarkan lokasi kedekatan kluster dengan Kota Sorong sebagai kota dengan fasilitas pelayanan telekomunikasi yang lebih memadai, maka pengembangan teknologi komunikasi di wilayah Kabupaten Raja Ampat dapat dibedakan dalam tiga kategori yaitu :

- a. Teknologi Telekomunikasi Terrestrial,
- b. Teknologi Telekomunikasi Wireless, dan
- c. Teknologi Satelit.

Terdapat sejumlah pilihan sarana komunikasi di Kabupaten Raja Ampat, yaitu telepon satelit, radiogram, radio SSB dan belakangan sudah bisa menggunakan telepon seluler GSM.

Fasilitas telepon satelit terdapat di beberapa kampung, namun beberapa di antaranya sudah tidak dapat dipergunakan lagi karena rusak. Alternatif fasilitas komunikasi lainnya adalah radiogram yang memiliki keunggulan dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Raja Ampat. Pemerintah atau pihak-pihak lainnya menggunakan fasilitas radiogram yang dikelola oleh RRI Sorong yang berlokasi di Kota Sorong untuk menyebarkan informasi baik untuk perorangan maupun seluruh penduduk Raja Ampat.

Tabel 2.10. Rencana Pengembangan Sistem Komunikasi

No.	Kluster	Teknologi Alternatif	Operator
1.	Pulau Waigeo dan sekitarnya	Kombinasi antara Terrestrial, wireless dan satelit	PT. Telkom, Pemda, Swasta
2.	Pulau Mansuar dan sekitarnya	Kombinasi antara Terrestrial, wireless dan satelit	PT. Telkom, Pemda, Swasta
3.	Pulau Ayau dan sekitarnya	Teknologi Satelit	Pemerintah dan PT Telkom atau swasta
4.	Pulau Misool dan sekitarnya	Teknologi Satelit	Pemerintah dan PT Telkom atau swasta
5.	Pulau Kofiau	Teknologi Satelit	Pemerintah dan PT Telkom atau swasta
6.	Pulau Bantata, Salawati dan sekitarnya	Terrestrial dan Satelit	PT. Telkom, Pemda, Swasta
7.	Pulau Gag dan sekitarnya	Teknologi Satelit	Pemerintah dan PT Telkom atau swasta
8.	Pulau Wayag dan sekitarnya	Teknologi Satelit	Pemerintah dan PT Telkom atau swasta

Sumber : Hasil Analisis RTRW, 2011-2030

Jumlah jaringan komunikasi di wilayah Kabupaten Raja Ampat adalah 0,5 persen, dengan rasio wartel/warnet terhadap penduduk sebesar 0,007 persen. Jumlah surat kabar nasional/ lokal ada sebanyak 7 dan jumlah penyiaran radio/ TV lokal sebanyak 1 stasiun. Jika di tilik dari data kemajuan informatika tersebut, Kabupaten Raja Ampat masih tergolong terbelakang dibanding dengan kota-kota lainnya. Oleh karena itu, penguasaan

komunikasi dan informatika perlu mendapatkan perhatian dan pengembangan yang serius agar tidak tertinggal dengan daerah yang lainnya. Komunikasi yang baik harus disertai dengan kelengkapan sarana dan prasarana yang mendukungnya. Kontribusi sektor komunikasi terhadap PDRB pada tahun 2008 sebesar 0.17 persen, tahun 2009 sebesar 0.18 persen, dan tahun 2010 sebesar 0.20 persen.

Perpustakaan merupakan salah satu sarana yang dapat dipergunakan sebagai jendela informasi. Jumlah perpustakaan yang tersedia di Kabupaten Raja Ampat adalah sebanyak 5 gedung, dengan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah sebanyak 0,93 persen dari jumlah koleksi judul yang tersedia. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun tercatat sebanyak 0,19 persen dari jumlah orang populasi yang harus dilayani. Berdasarkan data, pada tahun 2010 untuk kegiatan yang berkaitan dengan perpustakaan, arsip dan dokumentasi mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 dialokasikan anggaran, sebesar Rp 1.165.190.000 yang ditujukan untuk melanjutkan dan meningkatkan pengembangan taman baca, penataan administrasi perpustakaan, pengembangan kualitas perpustakaan dan penataan administrasi dokumentasi serta pengadaan buku-buku perpustakaan. Pada tahun 2011 dialokasikan anggaran, sebesar Rp 2.291.064.000 yang ditujukan untuk melanjutkan dan meningkatkan kegiatan yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya.

2.3.14. Pariwisata

Kawasan karst yang terdiri dari ratusan pulau-pulau kecil merupakan salah satu fenomena alam yang indah dan masih asli. Kekayaan flora dan fauna yang dimiliki Kabupaten Raja Ampat seperti burung Cenderawasih Botak, Cenderawasih Merah, Maleo Waigeo, Kus-kus, Anggrek, Palem dan lainnya memberikan dayatarik tersendiri.

Dengan kondisi alam Kabupaten Raja Ampat yang masih asli dan memiliki keanekaragaman hayati tinggi maka kawasan ini memiliki potensi pariwisata yang luar biasa, baik alam, endemisitas keanekaragaman hayati darat dan laut, potensi pesisir, maupun budaya dan adat masyarakat setempat. Obyek-obyek wisata tersebut dapat dikembangkan untuk menarik para turis baik domestic maupun mancanegara. Potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Raja Ampat dapat memberikan sumbangan bagi peningkatan perekonomian masyarakat apabila dikelola dengan baik. Walaupun Kepulauan Raja Ampat memiliki potensi wisata yang sangat besar, namun sangat disayangkan potensi tersebut sampai saat ini masih belum dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal. Berdasarkan laporan PAD Kabupaten Raja Ampat tahun 2005, sektor pariwisata hanya mampu menyumbang sebesar Rp 45.600.000 atau 0,0003 persen dari total PAD Kabupaten Raja Ampat yang sebesar Rp 151.161.816.000. Pendapatan sektor pariwisata sebesar ini diperoleh dari pajak orang asing/turis saja. Padahal bila potensi wisata yang dimiliki ini dikembangkan dengan baik maka dapat dibayangkan betapa besarnya sumbangan dari sektor pariwisata bagi PAD Kabupaten Raja Ampat dan sekaligus dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan kontribusi sektor jasa hiburan dan rekreasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun 2008-2010 sebesar 0.02 persen. Potensi wisata di Kabupaten Raja Ampat terdapat 30 kampung wisata yang sudah dikembangkan menjadi potensi wisata, yaitu : Wejim Timur, Wejim Barat, Satu Kurano, Pulau Tikus, Fafanlap, Yellu, Harapan Jaya, Keyerepop, Dabatan, Folley, Tomolol, Usaha Jaya, Limalas Barat, Audam, Lenmalas Timur, Waigama, Salafen, Atkari, Solal, Aduwey, Lilinta, Gamata, Magei, Biga, dan Kapatcol. Kampung wisata yang mulai dikembangkan menjadi potensi wisata ini merupakan wisata panorama pulau, pengatan burung, pantai pasir panjang, *diving*, *snorkling*, *dive sport*, *sunset*, *hiking*, pengatan paus, terumbu karang dan *junseis fishing*.

Guna menggenjot PAD dari sektor pariwisata, pemerintah Kabupaten Raja Ampat sedang berusaha mengembangkan potensi pariwisata yang ada, khususnya pariwisata kelautan (wisata bahari) dan menempatkan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan kedua setelah sektor perikanan dan kelautan. Dari data statistic dapat dilihat bahwa dari tahun 2007-2009 terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Raja Ampat. Adapun data jumlah kunjungan wisata di Raja Ampat sebagai berikut :

Tabel 2.11. Jumlah Kunjungan Wisata Raja Ampat

No	Tahun	Turis Asing	Lokal
1	2007	932	66
2	2008	2.367	280
3	2009	2.850	336
4	2010	3.855	658
5	2011	3.133	700

Sumber data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

2.3.15. Kelautan dan Perikanan

Kedalaman laut atau batimetri terdalam di Kabupaten Raja Ampat adalah lebih dari 200 m, terdapat di tengah-tengah laut lepas antara Pulau-pulau Waigeo, Kofiau dan Misool. Sedangkan laut antara Pulau Misool dengan Salawati dan pulau-pulau sekitar memiliki kedalaman kurang dari 200 m, sedangkan laut di sekitar Pulau Waigeo pada daerah teluk berkisar antara 3 hingga 55 meter dan di daerah tanjung yang bertebing kedalamannya dapat mencapai 118 meter.

Penyebaran suhu permukaan di perairan Kabupaten Raja Ampat dipengaruhi oleh Samudera Pasifik di bagian utara dan Laut Banda di bagian selatan. Perairan di Kabupaten Raja Ampat terletak di wilayah tropis (10 00' LU-20 15' LS) memiliki suhu permukaan yang relatif hangat dengan variasi tahunan yang cukup kecil. Dari hasil pengamatan di lapangan, pada bulan maret 2006, diperoleh suhu permukaan di perairan Kabupaten Raja Ampat berkisar antara 28,50C-31,80C dengan rata-rata 29,80C. Pada perairan tertutup (Teluk Mayalibit) suhu permukaan mencapai 31,80C. Tingginya suhu permukaan di Teluk Mayalibit diperkirakan karena pergantian massa air sangat lamban. Pola arus di perairan Kabupaten Raja Ampat lebih banyak dipengaruhi oleh massa air dari Samudera Pasifik Barat (*Western Pacific Ocean*) yang bergerak dari arah timur menuju barat laut (*North West*) dan sejajar dengan daratan Papua bagian utara. Ketika arus ini tiba di Laut Halmahera atau bagian utara Kepulauan Raja Ampat arus tersebut sebagian bergerak ke selatan dan sebagian berbalik menuju Samudera Pasifik. Arus ini dikenal sebagai *Halmahera Eddie*. Diduga sebagian arus ini memasuki perairan Kabupaten Raja Ampat.

Sebagai daerah Kepulauan yang dikelilingi oleh lautan dan relative masih alami, maka Kabupaten Raja Ampat memiliki terumbu karang yang indah dan sangat kaya akan berbagai jenis ikan dan moluska. Hasil penelitian LIPI dan lembaga lainnya telah mengidentifikasi 450 jenis terumbu karang, 950 jenis ikan karang dan 600 jenis moluska disekitar Pulau Batanta, Waigeo dan Pulau Gam. Salah satu sumberdaya kelautan yang dominan di wilayah perairan Kabupaten Raja Ampat adalah perikanan. Banyak jenis ikan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, yaitu diantaranya adalah Ikan Pelagis antara lain Tuna, Cakalang, Kembung, Tongkol dan Tenggiri; Ikan Karang antara lain Ikan ekor Kuning, Ikan Pisang Pisang, Ikan Napoleon, Ikan kakatua, Kerapu, Kakap, dan Baronang; dan Udang, Kepiting dan Rajungan. Selain ikan, hasil tangkapan lainnya adalah udang, cumi-cumi, cacing laut, kerang serta siput. Udang yang umumnya tertangkap adalah jenis lobster (*Panulirus sp*). Cumi-cumi yang tertangkap adalah jenis *Loligo sp*. Jenis kerang dan siput yang dimanfaatkan oleh nelayan selain kerang mutiara adalah bia garu, pia-pia, batu laga, kepala kambing dan mata tujuh. Produksi perikanan di Kabupaten Raja Ampat adalah sebesar 222.354, dengan kontribusi sebanyak 185.175 dari produksi perikanan kelompok nelayan. Konsumsi ikan di Kabupaten Raja Ampat ada sebanyak 186.068, untuk cakupan bina kelompok nelayan sejumlah 62 kelompok. Potensi wisata bahari yang memanfaatkan sumber daya perairan (banyaknya pulau dan pantai termasuk terumbu karangnya) sangat berpotensi untuk dikembangkan di wilayah Kabupaten Raja Ampat ini. Bahkan keunggulan potensi ini dapat menjadikan wilayah perencanaan sebagai obyek unggulan Indonesia untuk level internasional. Raja Ampat memiliki ratusan jenis terumbu karang yang tersebar di berbagai wilayah. Terumbu karang yang terbesar terdapat di Distrik Waigeo Barat, Waigeo Selatan, Ayau, Samate dan Misool Selatan. Terumbu karang di Pulau Ayau seluas 168.380 hektar, Kepulauan Asia 125.750 hektar, Pulau Sayang 96.000 hektar, Pulau Aljui 25.750 hektar, Pulau Kofiau 16.676 hektar dan Pulau Sausapor 10.405 hektar. Sedangkan terumbu karang lainnya seperti yang terdapat di Pulau Matan, Pulau Senapan dan Pulau Jefman luasnya dibawah 10.000 hektar.

Perikanan juga merupakan sumber pendapatan terbesar bagi Kabupaten Raja Ampat, baik perikanan tangkap maupun budidaya. Dana yang digunakan untuk Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan bersumber dari dana APBN Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Jumlah anggaran yang digunakan sebesar Rp 50.850.000,-, dengan realisasi sebesar Rp 543.320.400 atau 98,63 persen.

Ekosistem di Kabupaten Raja Ampat masih terjaga dengan keanekaragaman biota laut yang tinggi, oleh karena itu sektor perikanan memiliki potensi yang besar dan diharapkan dapat menjadi roda penggerak utama ekonomi Kabupaten Raja Ampat. Kabupaten Raja Ampat menempatkan sektor perikanan dan kelautan sebagai sektor unggulan dalam pembangunan ke depan. Perairan Kabupaten Raja Ampat memiliki potensi lestari (MSY) sebesar 590.600 ton/tahun dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sekitar 472.000 ton/tahun (80 persen MSY). Saat ini sumberdaya yang telah dimanfaatkan sebesar 38.000 ton/tahun, diluar dari pemanfaatan perikanan subsistem, sehingga diperkirakan masih memiliki peluang sekitar 434.000 ton/tahun.

Kepulauan Raja Ampat sangat potensial bagi pengembangan budidaya perikanan laut terutama ikan-ikan karang (Kerapu dan Napoleon), rumput laut, mutiara dan teripang karena memiliki kondisi perairan yang sesuai. Perairan teluk dan pulau-pulau kecil yang relatif tenang dan belum mengalami pencemaran adalah tempat yang tepat untuk pengembangan budidaya perikanan. Pendapatan rata-rata per rumah tangga nelayan per bulan berkisar antara Rp 500.000-Rp 2.000.000. Untuk daerah yang dekat dengan pasar (Sorong) seperti Waigeo Selatan, Batanta dan Salawati umumnya lebih mudah memasarkan hasil tangkapannya. Untuk daerah yang jauh seperti Ayau, Kofiau, Waigeo Utara, Misool dan lain-lain, pemasaran hasil tergantung pada adanya penampung karena jauhnya jarak yang harus ditempuh sehingga hasil yang akan dijual tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk bahan bakar minyak. Kendala perikanan di Kabupaten Raja Ampat adalah alat tangkap yang tradisional dan alat transportasi yang sangat sederhana sehingga hasil produksi nelayan menjadi terbatas.

Hal lain yang menjadi kendala rendahnya produksi tangkapan nelayan adalah tidak tersedianya pasar, sehingga nelayan melaut sekedar untuk konsumsi sendiri dan dijual di sekitar kampung. Selain itu, kendala lain

aktifitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan Kabupaten Raja Ampat sangat dipengaruhi oleh musim terutama musim selatan. Pada musim tersebut nelayan tidak bisa melakukan aktifitas penangkapan ikan karena ombak yang besar, sehingga banyak nelayan yang beralih profesi sebagai petani. Faktor lain terkait dengan perikanan adalah adanya *illegal fishing* yang tidak menutup kemungkinan akan merusak ekosistem perikanan di Kabupaten Raja Ampat. Tercatat pada tahun 2009 terdapat 15 pelanggaran yang berupa bom, potasium, dan pelanggaran administrasi perizinan. Pada tahun 2010 *illegal fishing* di Kabupaten Raja Ampat mengalami penurunan yaitu sebanyak 10 pelanggaran baik yang berupa pelanggaran bom dan administrasi perizinan. Sedangkan di tahun 2011 ini sudah tercatat sebanyak 8 pelanggaran yang terdiri dari pelanggaran bom dan administrasi perizinan.

2.3.16. Kehutanan

Mayoritas wilayah Kabupaten Raja Ampat didominasi oleh tipe hutan dataran rendah. Dari beberapa tipe hutan yang ada di wilayah Kabupaten Raja Ampat, seperti hutan pegunungan rendah, dataran tinggi, dataran rendah dan hutan aluvial yang hidup pada substrat yang sama, umumnya tidak dijumpai dalam batasan flora yang jelas dan tegas, terutama sebagai indikator bahwa komposisi hutan memang sudah mengalami pergantian antara jenis tumbuhan dataran rendah dan dataran tinggi. Pada tahun 2010 program yang dilaksanakan sebanyak 4 program dengan total anggaran sebesar Rp 3.887.860.000. Sedangkan kontribusi sektor kehutanan terhadap PRDB dari tahun 2008 sebesar 5.85 persen, untuk tahun 2009 sebesar 6.23 persen, dan pada tahun 2010 sektor kehutanan berkontribusi pada PRDB sebesar 7.15 persen.

Tabel 1.16 Luas Kawasan Hutan Kabupaten Raja Ampat

Kawasan Hutan	Luas (Ha)
Cagar Alam (KSA)	401,973
Hutan Lindung (HL)	153,839
Hutan Produksi Konversi (HPK)	154,233
Hutan Produksi (HP)	16.520
Hutan Produksi Terbatas (HPT)	7,092
TOTAL	703.021

Sumber : Dinas Kehutanan Raja Ampat 2010

Kawasan Kabupaten Raja Ampat mencakup beberapa tipe hutan, yakni hutan pantai, hutan mangrove, hutan nipah, hutan sagu, hutan rawa campuran, dan hutan hujan dataran rendah. Ekosistem mangrove di Kabupaten Raja Ampat menunjukkan kondisi yang masih baik. Umumnya, area hutan mangrove di Kabupaten Raja Ampat meskipun sangat terbatas, dapat dikenali secara mudah melalui citra satelit Landsat, karena ciri-cirinya yang unik Berdasarkan hasil survei dan analisis citra digital, luas hutan mangrove di Kabupaten Raja Ampat adalah \pm 27.180 ha. Masyarakat masih menggunakan mangrove sebagai material untuk pembangunan rumah, dermaga dan konstruksi bangunan lainnya. Beberapa kawasan mangrove di Kabupaten Raja Ampat telah dialih fungsikan menjadi lahan permukiman seperti terjadi di Waisai, Wawiyai, Kabui, Araway, Kalitoko, Waigama, Salafen, Kapatlap dan beberapa tempat lainnya. Sedangkan luas sebaran mangrove untuk masing-masing pulau besar yang ada di wilayah Kabupaten Raja Ampat adalah sebagai berikut : Pulau Waigeo seluas 6.843 hektar, Pulau Batanta seluas 785 hektar, Pulau Kofiau seluas 79 hektar, Pulau Misool seluas 8.093 hektar, Pulau Salawati seluas 4.258 hektar. 88 Sektor kehutanan merupakan salah satu potensi sumberdaya yang dapat dimanfaatkan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan mencakup penebangan kayu, pengambilan hasil hutan, perburuan, kegiatan penebangan kayu gelondongan, kayu olahan, kayu bakar, arang dan bambu. Untuk kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB adalah 6,39. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis di Kabupaten Raja Ampat sudah dilakukan seluas 20 hektar.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dihitung dengan cara menghitung pembelian rumah tangga yang berupa barang-barang jadi baru dan jasa tanpa melihat kualitas barang dan jasa, dikurangi penjualan dari pembelian barang bekas netto, dengan pengecualian pengeluaran yang bersifat transfer, pembelian tanah dan rumah. Pengecualian ini dilakukan sebab transfer akan dihitung sebagai pengeluaran pada konsumen yang menerima transfer tadi, sedang pengeluaran untuk tanah dan rumah dimasukkan dalam item pembentukan modal (*Capital Formation*). Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Kabupaten Raja Ampat sebesar 1.734,08 juta dengan nilai 41,02 persen, hal ini menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga per kapita Kabupaten Raja Ampat masih rendah dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi non pangan perkapita dan produktivitas total daerah yang mencapai 22.053,63 juta.

Adapun PDRB perkapita dengan migas tahun 2010 mempunyai nilai 26,8 juta rupiah, lebih besar dibandingkan tahun 2009 yang mencapai 25,2 juta, dengan tingkat perkembangan mencapai 4,3 kali PDRB

perkapita pada tahun dasar 2000 dan mempunyai laju pertumbuhan sebesar 5,10 persen. Besarnya nilai PDRB per kapita ini dikarenakan begitu besarnya nilai sub sektor migas sebagai pembentuk PDRB 2010 atas dasar harga berlaku.

2.4.2. Fokus Fasilitas dan Infrastruktur Wilayah

2.4.2.1. Perhubungan

Panjang jalan di Kabupaten Raja Ampat pada tahun 2010 mencapai 220,54 kilometer. Menurut jenis permukaan, bentangan jalan beraspal sepanjang 8,62 kilometer, kerikil sepanjang 121,97 kilometer, jalan tanah sepanjang 73,25 kilometer dan tidak dirinci sepanjang 16,7 kilometer. Adapun rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Raja Ampat hingga tahun 2010 adalah sebesar 0.13 persen, sedangkan jumlah orang per barang yang terangkut angkutan umum sebanyak 12.750 orang. Untuk jumlah orang perbarang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun sebesar 72.000 orang. Rekomendasi untuk pembangunan Kabupaten Raja Ampat ke depan adalah peningkatan infrastruktur, terutama jalan-jalan yang berupa pasir batu (sirtu) di hampir semua Distrik. Kabupaten Raja Ampat harus mampu mengalokasikan sebagian dari APBD untuk perbaikan infrastruktur jalan. Diharapkan dengan adanya perbaikan tersebut mampu mendorong kemudahan akses bagi penduduk dan investor untuk melakukan aktifitas.

2.4.2.2. Penataan Ruang

Guna mendukung pertumbuhan daya saing daerah, penataan tata ruang juga menjadi salah satu hal penting dalam perencanaan pembangunan kedepan, mengingat kondisi geografis, potensi kelautan dan pariwisata yang luar biasa sekaligus kondisi kerawanan bencana yang ada di Raja Ampat. Adapun total luas wilayah produktif sebesar 99 persen. Sedangkan wilayah industri seluas 14,13 persen, wilayah banjir 22,79 persen, wilayah kekeringan 35,55 persen dan wilayah perkotaan yang masih sangat minim, yakni hanya sebesar 10,23 persen.

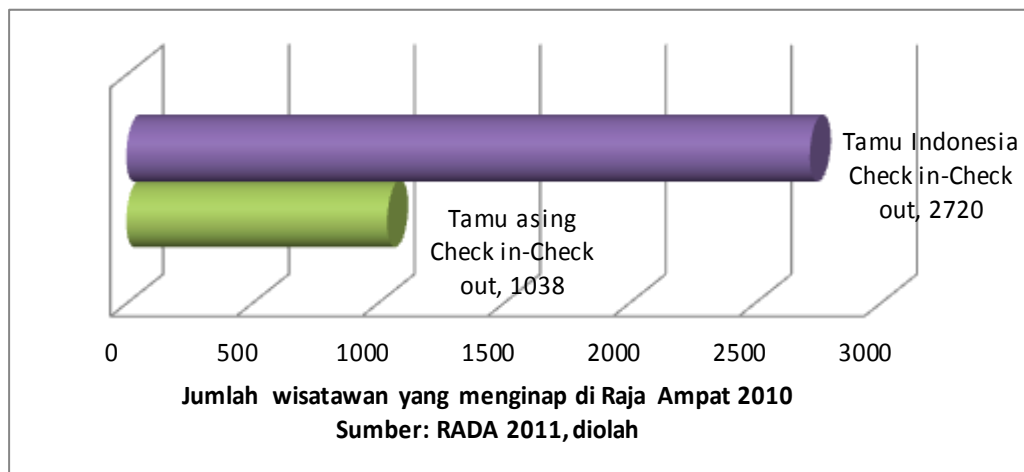
Dukungan terhadap daya saing daerah juga diindikasikan dengan keberadaan instansi perbankan dan perusahaan asuransi. Adapun jumlah restoran, resort, penginapan/ hotel juga menjadi pendukung daya saing daerah karena kelautan dan pariwisata adalah pilar perekonomian Raja Ampat yang berbasis keunggulan lokal. Adapun jenis dan jumlah bank dan cabang di Raja Ampat masih sangat minim, hanya ada dua bank, yakni Bank Papua dan BRI. Hanya terdapat 1 perusahaan asuransi. Sedangkan untuk jumlah resort dan hotel dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.12. Fasilitas Hotel/Losmen/Cottage/Resort, Kamar, Tempat Tidur, Desa Wisata, dan Spot Diving Per Kecamatan di Kabupaten Raja Ampat 2010

Distrik	Hotel/ Losmen/ Cottage/ Resort	Kamar	Tempat Tidur	Desa Wisata	Spot Diving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Misool Selatan	1	14	28	5	14
2. Misool Barat	—	—	—	—	2
3. Misool	—	—	—	—	24
4. Kofiau	—	—	—	—	4
5. Misool Timur	—	—	—	—	10
6. Kep. Sembilan	—	—	—	—	2
7. Salawati Utara	—	—	—	—	2
8. Salawati Tengah	—	—	—	—	—
9. Salawati Barat	—	—	—	—	—
10. Batanta Selatan	—	—	—	—	6
11. Batanta Utara	1	10	10	—	8
12. Waigeo Selatan	1	5	10	—	13
13. Kota Waisai	8	91	91	—	2
14. Teluk Mayalibit	—	—	—	—	4
15. Tiplol Mayalibit	—	—	—	—	—
16. Meosmansar	2	20	24	5	18
17. Waigeo Barat	—	—	—	—	8
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18. Waigeo Barat Kep.	—	—	—	—	14
19. Waigeo Utara	F—	—	—	—	—
20. Warwabomi	—	—	—	—	—
21. Supnin	—	—	—	—	—
22. Kepulauan Ayau	—	—	—	—	—
23. Ayau	—	—	—	—	—
24. Waigeo Timur	—	—	—	—	2
Jumlah	13	140	163	10	133

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Raja Ampat 2010

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa dari sejumlah 24 distrik total kamar yang dimiliki hotel/penginapan hanya berjumlah 140 kamar. Jumlah itu tentunya sangat minim sekali apabila dibandingkan dengan jumlah tamu/wisatawan asing dan domestik yang menginap di Raja Ampat. Gambar Jumlah Wisatawan yang menginap di Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010.



Sumber : RADA 2011, diolah

2.4.2.3. Air Bersih

Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih hingga tahun 2010 baru mencapai 55,7 persen dari jumlah rumah tangga yang ada. Persentase penduduk yang berakses air minum sebesar 65 persen, dengan pencemaran status mutu air sebesar 30 persen. Sumber air bersih yang paling umum digunakan masyarakat Raja Ampat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya adalah sumur gali dan sebagian kecil dari ledeng. Meskipun demikian, di sejumlah kampung masih ada yang hanya memiliki beberapa sumur gali yang digunakan untuk keperluan bersama penduduk kampung. Sejumlah kampung di Raja Ampat juga menggunakan air dari mata air yang disalurkan ke bak penampungan atau kerumah-rumah penduduk melalui pipa. Di beberapa distrik masih terdapat kesulitan dalam mengakses air bersih karena kualitas air di beberapa kampung tidak terlalu bagus, yaitu tidak jernih atau berwarna kekuning-kuningan.

2.4.2.4. Komunikasi dan Informatika

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini juga menuntut Raja Ampat untuk mampu memberikan fasilitas kepada masyarakat, baik melalui alokasi anggaran daerah maupun dengan melakukan penguatan sinergi dan kerjasama dengan para investor dan dunia usaha. Pelibatan pilar non pemerintah untuk menunjang percepatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sistem komunikasi dan informatika sangat dibutuhkan karena rasio ketersediaan daya listrik hingga 2010 di Raja Ampat masih sangat rendah, yakni hanya 31,01 persen. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik sejumlah 26 persen dan presentase pengguna telepon/handphone sejumlah 17,2 persen. 2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi Penciptaan Iklim berinvestasi yang kondusif dan menjaga iklim berinvestasi tetap nyaman untuk para investor diantaranya terkait perihal jumlah demo, lama proses perijinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, jumlah perda yang mendukung iklim usaha serta presentase desa berstatus swasembada terhadap total desa yang ada di Raja Ampat. Jumlah demo hingga tahun 2010 di Raja Ampat tergolong sangat sedikit yakni hanya terjadi dua kali. Sedangkan lama proses perijinan untuk izin usaha dapat terselesaikan hanya dalam waktu lima hari.

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Selain kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan iklim berinvestasi, penentuan kondisi daya saing daerah ditentukan oleh sumberdaya manusia. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk. Rasio kelulusan sarjana di Kabupaten Raja Ampat hanya sebesar 0,64 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan strata masih rendah di tahun 2010. Rendahnya rasio ini menjadi satu urgensi yang perlu untuk dibenahi sehingga rasio ini akan meningkat pada tahun-tahun mendatang.

Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Sebaliknya ratio ketergantungan yang masih tinggi yakni sejumlah 61,70 persen, masih memerlukan upaya untuk diturunkan karena persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini merupakan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal Kabupaten Raja Ampat. Hasil analisis tersebut disajikan dalam tiga bagian Bagian pertama potensi dan peluang pembangunan. Bagian kedua mendeskripsikan permasalahan pembangunan. Sedangkan bagian ketiga merupakan rumusan isu strategis Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam merespon permasalahan pembangunan yang sedang dan akan dihadapi selama 20 tahun ke depan dengan mengoptimalkan penggunaan kekuatan atau daya dukung internal dan pemanfaatan peluang atau daya dukung eksternal yang tersedia.

Rumusan isu-isu strategis menjadi pertimbangan pokok di dalam menentukan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Raja Ampat. Dengan menjadikan isu-isu strategis sebagai basis penentuan visi dan misi maka pembangunan Raja Ampat dalam dua puluh tahun ke depan akan memiliki sasaran, arah, dan prioritas yang jelas, sehingga mampu mengoptimalkan pemanfaatan potensi dan peluang untuk mengatasi permasalahan dan ancaman yang dihadapi Kabupaten Raja Ampat.

3.1. Potensi dan Peluang Pembangunan

Potensi daerah yang dimaksudkan di sini adalah berbagai kondisi baik berupa daya dukung lingkungan alam maupun sosial ekonomi di Raja Ampat yang dapat digunakan sebagai modal penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Raja Ampat. Sedangkan peluang adalah daya dukung eksternal yang relevan dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Raja Ampat, baik yang berasal dari skema perubahan internasional, kebijakan pembangunan nasional, maupun kebijakan pembangunan provinsi. Berikut adalah uraian mengenai potensi dan peluang pembangunan Kabupaten Raja Ampat.

a. Raja Ampat memiliki sumberdaya kelautan yang sangat kaya.

Sumberdaya kelautan ini bukan hanya karena Raja Ampat berupa daerah kepulauan yang memiliki wilayah laut yang lebih luas dari daratan, tetapi lebih karena posisi strategis Raja Ampat di wilayah segitiga terumbu karang dunia (*Coral Triangle*). Sumberdaya kelautan Raja Ampat berupa ikan tangkap, udang, rumput laut, dan mutiara.

Dari penelitian yang dilakukan Konsorsium Atlas Sumber Daya Wilayah Pesisir pada 2006, perairan Raja Ampat memiliki potensi perikanan lestari sebesar 590 ribu ton per tahun dan baru dimanfaatkan sekitar 38 ribu ton per tahun. Selain untuk dijual dalam kondisi segar dan disalurkan ke rumah makan-rumah makan, pengolahan ikan tangkap dan udang selama ini baru sebatas untuk pembuatan ikan asin dan terasi udang.

Budidaya dan pemanfaatan rumput laut juga belum dilakukan dengan baik dan sangat potensial untuk dikembangkan. Kendala utama yang dihadapi bukan karena keterbatasan sumberdaya, melainkan belumlah arena yang memadai dan berkelanjutan untuk memasarkan hasil olahan sumberdaya terutama rumput laut.

Selain itu, kendala lainnya adalah keterbatasan teknologi penangkapan ikan di kalangan nelayan, keterbatasan teknologi pengolahan, langka dan mahalnya bahan bakar untuk operasional kegiatan nelayan, serta terbatasnya sarana pengangkutan hasil tangkapan dan olahan terutama untuk daerah-daerah tertentu.

Sementara untuk mutiara telah dimanfaatkan secara lebih baik, yaitu telah terdapat setidaknya lima perusahaan yang mengolah dan menjualnya di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Sayangnya penjualan dilakukan dalam bentuk butiran atau biji mutiara, belum diolah menjadi berbagai macam perhiasan dan asesoris. Hal ini menunjukkan terdapat potensi nilai tambah yang luar biasa apabila berbagai sumberdaya tersebut diolah secara lebih serius.

b. Kearifan lokal merupakan modal sosial untuk mendorong pengelolaan sumberdaya kelautan secara berkelanjutan.

Kearifan lokal di Raja Ampat mencakup penentuan batas wilayah Ulayat, pengakuan hak-hak seperti pembatasan nelayan dari luar untuk desa-desa tertentu seperti di Desa Arborek dan Fam, pembatasan ukuran komoditas laut yang bisa ditangkap seperti pembatasan ukuran Lobster di Desa Sawinggrai dan Lola di Desa Arborek, sasi gereja atau musim buka tutup untuk penangkapan teripang, lobster dan lola, serta adanya sejumlah hal yang ditabukan untuk dilakukan di daerah tertentu.

c. Raja Ampat memiliki sumberdaya pariwisata yang sangat kaya.

Hal ini ditandai dengan banyaknya destinasi wisata terutama yang menawarkan keindahan alam bawah laut, seperti di selat yang berada di antara Pulau Waigeo dan Pulau Batanta, Kepulauan Kofiau, Kepulauan Misool Timur dan Selatan, serta Kepulauan Wayag; panorama pantai berpasir putih dan gugusan pulau karang (karst), seperti di Kepulauan Wayag, Pulau Kri, dan Teluk Kabui; maupun pesona sejumlah flora dan fauna khas dan langka, seperti cendrawasih merah, cendrawasih Wilson, Maleo Waigeo, Kakatua, Nuri, dan Kuskus Waigeo.

Berenang, snorkeling, diving, dan juga tracking di sejumlah kawasan menarik menjadi alternatif aktifitas wisata unggulan. Banyaknya destinasi wisata yang menarik dan lokasinya tersebar merupakan modal penting bagi Pemerintah Kabupaten Raja Ampat untuk mengembangkan paket wisata bahari.

d. Peluang pengembangan wisata bahari di Raja Ampat semakin besar dengan adanya Segitiga Terumbu Karang di kawasan Timur Indonesia (Wakatobi, Halmahera, dan Raja Ampat) di jantung segitiga karang dunia.

Pengembangan kawasan wisata bahari melalui kolaborasi antar pemerintah daerah bersama pelaku usaha pariwisata dengan menciptakan paket-paket wisata dapat memperkuat daya tarik wisata bahari di Raja Ampat.

Pengembangan paket wisata menawarkan efisiensi bagi wisatawan sehingga memberikan peluang bagi peningkatan jumlah dan lama kunjungan wisatawan di Raja Ampat.

e. Kawasan hutan lindung dan cagar alam sangat potensial untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata.

Sebagian besar (>75%) kawasan hutan di Raja Ampat merupakan hutan lindung dan cagaralam.

Terbatasnya kawasan hutan produksi bukanlah kendala bagi Pemerintah Kabupaten Raja Ampat untuk memanfaatkan hutan sebagai sektor unggulan. Untuk mengoptimalkan fungsinya sebagai kawasan konservasi, hutan lindung dan cagar alam sangat potensial untuk dikembangkan sebagai objek wisata, baik untuk tujuan melihat keindahan panorama alam, keunikan spesies langka, maupun untuk keperluan riset ilmiah. Pengembangan kawasan wisata berbasis hutan sangat mungkin dilakukan mengingat hutan di Raja Ampat dihuni oleh sejumlah spesies langka, seperti cendrawasih merah, cendrawasih Wilson, Maleo Waigeo, beranekaragam Kakatua, Nuri, dan Kuskus. Beragam jenis anggrek juga terdapat di sana. Wisata berbasis hutan ini akan menjadi alternatif tujuan wisata atau destinasi pendukung wisata bahari.

f. Peluang pengembangan sektor pertanian melalui strategi intensifikasi lahan.

Intensifikasi lahan terutama dapat dilakukan di daerah-daerah yang memiliki lahan tidak begitu luas namun memiliki produktivitas tinggi, seperti di Kepulauan Sembilan, Batanta Selatan, Misool, Warwabomi, Teluk Mayalibit, dan Kofiau untuk tanaman Jagung; Misool, Misool Timur, Batanta Selatan, dan Waigeo Selatan untuk Kacang Tanah; serta Misool Barat, Misool, Waigeo Selatan, dan Waigeo Utara untuk Kacang Hijau.

Jenis tanaman lain adalah ubi kayu, ubi jalar, dan sagu. Sektor pertanian akan lebih berkembang dan produktif dengan mengintensifkan pengolahan lahan di daerah-daerah tersebut untuk mendukung produktivitas pertanian di Salawati Utara sebagai daerah utama pengembangan pertanian.

g. Kekayaan sumberdaya mineral dan minyak bumi di Raja Ampat perlu pengelolaan secara proporsional dan ramah lingkungan.

Selama ini pertambangan merupakan sektor yang paling banyak menyumbang PDRB Raja Ampat. Kandungan deposit nikel di Pulau Gag diperkirakan sampai 176 juta ton, di Pulau Manoram 100 juta ton, dan di Kampung Kapadiri 175 juta ton. Sedangkan cadangan minyak keseluruhan di pantai utara Salawati diperkirakan sekitar 200 juta barel. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Conservation International dan Universitas Negeri Papua (2006), nilai ekonomi potensi pertambangan di Raja Ampat tersebut selama 20 tahun sebesar Rp 1,13 triliun.

Namun apabila eksploitasi dilakukan maka Raja Ampat akan lebih mendapatkan kerugian besar senilai lebih dari Rp 2,5 triliun. Hal itu akan terjadi karena aktifitas pertambangan yang diikuti penebangan hutan dan berbagai perusakan lingkungan lainnya mengakibatkan meluasnya sedimentasi terumbu karang dan kerusakan hutan sehingga fungsi penting yang dimilikinya hilang, yaitu sebagai penahan bencana, pengendali erosi, pengatur ketersediaan air, dan tempat tinggal berbagai hewan khas. Dengan demikian potensi laut dan hutan di Raja Ampat untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata tentu akan rusak.

h. Kebijakan otonomi khusus (otsus) memberikan peluang dan keleluasaan bagi Pemerintah Kabupaten Raja Ampat

Untuk mengatasi permasalahan utama, seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya kualitas SDM dan derajat kesehatan masyarakat, serta lambannya perkembangan perekonomian daerah. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut Pemerintah 102 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011-2030 Kabupaten Raja Ampat mendapatkan dukungan dari Pemerintah berupa aliran dana otsus dalam jumlah yang besar setiap tahunnya. Apabila dikelola dengan baik, yaitu lebih banyak ditujukan untuk mengatasi persoalan yang paling krusial dan memiliki dampak terhadap penyelesaian persoalan lainnya, maka keberadaan dana otsus akan lebih efektif dan dapat dirasakan oleh masyarakat.

i. Kebijakan nasional percepatan pembangunan kawasan Timur Indonesia yang memiliki fokus pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian memberikan dukungan secara langsung bagi pembangunan Raja Ampat.

Raja Ampat dilihat dari sejumlah ukuran sosial ekonomi dan ketersediaan infrastruktur termasuk dalam kategori daerah tertinggal bersama 34 kabupaten lainnya di wilayah Papua dan Papua Barat. Label dari Pemerintah ini dapat dimaknai secara positif sebagai peluang besar bagi Raja Ampat untuk mendapatkan dukungan penyelenggaraan pembangunan dari Pemerintah.

Berdasarkan RTRW Nasional, Kawasan Timur Indonesia dialokasikan untuk sentra pengembangan kelautan yang terpadu dan sentra pendukung ketahanan pangan nasional. Paralel dengan itu, strategi Pemerintah untuk mengembangkan daerah tertinggal yang memiliki karakteristik daerah kepulauan adalah menjadikan industri kelautan sebagai *leading sektor* bagi daerah tersebut. Untuk mewujudkan hal itu, Pemerintah memberikan perhatian dan dukungan khusus terhadap pembangunan infrastruktur di Kawasan Timur Indonesia, terutama infrastruktur dasar seperti infrastruktur transportasi (jalan, jembatan, dermaga, pelabuhan, dan bandara), energi listrik, air bersih dan telekomunikasi. Pemerintah juga memberikan perhatian khusus untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat di Kawasan Timur Indonesia. Semua itu merupakan dukungan nyata bagi Pemerintah Kabupaten Raja Ampat untuk mengembangkan bukan hanya sektor kelautan, perikanan dan pertaniannya, tetapi juga sektor pariwisata yang akan menjadi sektor unggulan.

j. Kebijakan pembangunan di Provinsi Papua Barat sejalan dengan upaya Kabupaten Raja Ampat untuk mengembangkan potensi pariwisata dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Provinsi Papua Barat juga menetapkan empat sektor yang menjadi prioritas pembangunan, yaitu sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor infrastruktur, dan sektor ekonomi (kerakyatan). Pembangunan di keempat sektor tersebut merupakan solusi yang diperlukan oleh semua daerah yang berada di Papua dan Papua Barat yang memiliki persoalan yang relatif sama terkait dengan rendahnya kualitas SDM dan derajat kesehatan masyarakat, keterisolasian, dan kemiskinan. Pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi kerakyatan yang menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Papua Barat selaras dan karenanya akan mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Raja Ampat untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai *leading sektor* dengan mendorong tumbuhnya berbagai kegiatan usaha berbasis masyarakat yang berkontribusi langsung bagi pengembangan wisata bahari. Hal ini paralel dengan penetapan Raja Ampat sebagai kawasan budidaya ruang laut di Papua Barat, bersama dengan Kabupaten Teluk Bintuni, untuk pengembangan sektor unggulan perikanan. Sementara itu, RTRW Provinsi Papua Barat menetapkan sejumlah kawasan di Raja Ampat sebagai kawasan konservasi, baik yang berupa cagar alam, seperti Cagar Alam di Pulau Waigeo Barat, Pulau Batanta Barat, Salawati Utara, Pulau Waigeo Timur, Pulau Misool, Pulau Kofiau, dan Teluk Mayalibit, maupun hutan lindung seperti di Pulau Misool Utara, Pulau Mapele, Pulau Batanta Timur, dan Pulau Gam. Penetapan sejumlah kawasan konservasi di Raja Ampat ini tidak harus dimaknai sebagai pembatasan untuk memanfaatkan sumberdaya. Eksploitasi mineral dan hasil hutan tentu dilarang di kawasan tersebut. Namun kawasan yang terjaga kelestariannya dan menjadi tempat tinggal berbagai spesies khas tersebut sangat potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata.

k. Pesatnya pertumbuhan ekonomi di Kota Sorong.

Pemerintah Kota Sorong, sebagaimana disebutkan di dalam RPJP Kota Sorong 2005-2024, akan membangun dan membenahi berbagai infrastruktur terutama infrastruktur transportasi. Pembangunan infrastruktur transportasi di Kota Sorong, terutama bandara dan pelabuhan, akan sangat berpengaruh besar bagi peningkatan kelancaran dan kenyamanan transportasi menuju Raja Ampat. Hal ini dikarenakan Kota Sorong merupakan pintu gerbang dan kota persinggahan untuk menuju daerah lain yang berada di Papua Barat, termasuk Raja Ampat. Dengan adanya pelabuhan yang lebih memadai maka alternatif moda transportasi laut menuju Raja Ampat berpotensi untuk bertambah setiap harinya. Alternatif moda akan semakin bertambah setelah bandara Raja Ampat selesai dibangun dan dioperasikan.

Kondisi tersebut tentu dapat memperbesar peluang peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Raja Ampat. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan akan semakin signifikan apabila peningkatan kualitas pengelolaan pariwisata di Raja Ampat dapat diwujudkan. Keuntungan ekonomi akan semakin banyak diperoleh apabila Pemerintah dan masyarakat Raja Ampat mampu mengembangkan usaha-usaha ekonomi produktif yang mendukung pemenuhan kebutuhan para wisatawan yang berkunjung.

3.2. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan merupakan manivestasi ataupun implikasi dari kelemahan yang dimiliki dan juga tantangan eksternal yang sedang dan akan dihadapi oleh Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Raja Ampat. Sebagai kabupaten baru, Raja Ampat menghadapi permasalahan pembangunan yang sangat kompleks dan memerlukan perhatian yang menyeluruh.

Permasalahan pembangunan perlu diidentifikasi untuk dijadikan sebagai basis penentuan isu-isu strategis. Berikut ini dipaparkan permasalahan-permasalahan pembangunan yang berdimensi internal maupun eksternal di Kabupaten Raja Ampat.

a. Implementasi pembangunan selama ini kurang memperhatikan karakteristik lokal dan pengakuan terhadap hak-hak ulayat/adat masyarakat lokal.

Pendekatan pembangunan yang kurang memperhatikan karakteristik lokal menyebabkan hasil pembangunan kurang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Percepatan pembangunan di Papua Barat pada umumnya dan di Kabupaten Raja Ampat pada khususnya dengan pendekatan yang lebih berfokus pada pembangunan ekonomi, di satu sisi telah mampu meningkatkan kesejahteraan sejumlah kelompok masyarakat, namun tidak dapat dipungkiri masih menyisakan sebagian besar masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Masyarakat sangat jarang dilibatkan dalam proses pembangunan baik dalam tataran perencanaan, pelaksanaan maupun dalam evaluasi. Akibatnya, pembangunan yang dilaksanakan selama ini seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan belum dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.

Keanekaragaman adat-istiadat sangat jarang diperhitungkan dengan baik sehingga sering memicu konflik antara masyarakat adat dan pemerintah. Budaya masyarakat merupakan dimensi penting yang harus dipertimbangkan dalam setiap proses pembangunan.

Masyarakat tidak dapat dilepaskan dari kebudayaannya. Keberadaan masyarakat dan kebudayaan merupakan satu entitas yang semestinya dikembangkan bersama. Penyelenggaraan pembangunan selama ini yang sering mengabaikan budaya lokal mengakibatkan terciptanya masyarakat yang tercerabut dari akar budayanya. Kondisi ini jelas akan menimbulkan persoalan pembangunan di waktu yang akan datang.

b. Keterbatasan infrastruktur dasar dan infrastruktur pelayanan publik masih menjadi persoalan utama di Kabupaten Raja Ampat.

Sebagai daerah otonom baru, Kabupaten Raja Ampat masih dihadapkan pada persoalan terbatasnya infrastruktur dasar dan sarana prasarana pelayanan publik. Konsekuensi dari kondisi tersebut adalah terbatasnya pelayanan publik yang dapat disediakan oleh pemerintah daerah, lemahnya daya tarik investasi, dan lambannya kemajuan perekonomian daerah. Keterbatasan infrastruktur dasar dan prasarana pelayanan publik ini antara lain tercermin dari :

- 1) Keterbatasan layanan transportasi darat terutama untuk wilayah pulau-pulau besar, seperti Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misool. Kuantitas maupun kualitas jaringan jalan dan jembatan di Kabupaten Raja Ampat sangat terbatas. Sebagian besar jaringan jalan masih berupa jalan tanah sehingga pada musim penghujan jaringan jalan tersebut sulit untuk dapat dilalui kendaraan. Kondisi tersebut menghambat interaksi antar wilayah di Kabupaten Raja Ampat sehingga berdampak pada terjadinya kesenjangan sosial ekonomi antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi di wilayah pedalaman juga menjadi terhambat. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi laut juga masih jauh dari kata memadai, belum dapat diakses secara murah dan mudah oleh warga untuk berinteraksi dengan daerah lain, serta belum mendukung kelancaran arus barang dan jasa. Selama ini sarana transportasi yang menghubungkan antara satu pulau dengan pulau lainnya dilakukan dengan kapal yang membutuhkan biaya yang relative tinggi. Terbatasnya sarana transportasi laut ini menyebabkan rendahnya mobilitas warga sehingga perkembangan masyarakat menjadi terhambat.
- 2) Layanan listrik oleh pemerintah masih sangat terbatas jangkauannya. Sebagian warga yang tinggal di luar Kota Waisai masih mengandalkan pelayanan listrik non PLN yang menggunakan energi pembangkit listrik dari tenaga surya dan mikrohidro. Meskipun sumber energi alternative tersebut telah dikembangkan di sejumlah wilayah, jangkauan pelayanannya masih sangat terbatas. Akibatnya, masih banyak keluarga yang belum memiliki akses terhadap listrik. Padahal pelayanan listrik bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan penerangan saja, tetapi juga sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif masyarakat. Perekonomian masyarakat ditingkat kampung belum dapat berkembang karena salah satu penyebabnya adalah masih terbatasnya infrastruktur dasar seperti listrik.
- 3) Terbatasnya prasarana pendidikan yang dapat dijangkau oleh masyarakat, terutama yang berada didistrik-distrik hasil pemekaran. Sekolah menengah atas (SMA) belum tersedia di setiap distrik. Jumlah SMA sampai dengan 2010 hanya 11 unit yang tersebar hanya di 10 distrik. Persoalan yang sama terjadi pada jenjang pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP/SMP). Untuk pendidikan sekolah dasar meskipun sudah tersedia di hampir semua distrik, masih banyak warga yang mengalami kesulitan untuk mengaksesnya mengingat wilayah untuk setiap distrik cukup luas. Keterbatasan lain di bidang pendidikan adalah minimnya sarana dan prasarana untuk pendidikan sekolah kejuruan. Padahal keberadaan sekolah kejuruan merupakan alternatif yang lebih strategis untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan masyarakat sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Kabupaten Raja Ampat. Berbagai macam keterbatasan tersebut yang menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Raja Ampat.
- 4) Keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan, seperti rumah sakit dan puskesmas, menjadi kendala utama untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Raja Ampat. Satu-satunya rumah sakit di Raja Ampat berada di Kota Waisai sehingga relatif sulit untuk dijangkau oleh warga yang tinggal di distrik yang jauh dari Kota Waisai. Sarana pelayanan kesehatan dasar, seperti puskesmas dan puskesmas pembantu, juga belum ada di semua distrik. Setidaknya masih terdapat enam distrik yang belum memiliki fasilitas puskesmas, seperti Salawati Tengah, Salawati Barat, Batanta Utara, Waisai, Supnin dan Kepulauan Ayau.

Keberadaan puskesmas dan puskesmas pembantu (Pustu) tersebut tidak semuanya dapat diakses dengan mudah oleh warga masyarakat yang membutuhkannya. Persoalan ini masih ditambah dengan terbatasnya tenaga medis yang melayani serta ketersediaan obat dan peralatan medis di setiap puskesmas dan pustu. Bukan hanya itu, masih rendahnya derajat kesehatan sebagian besar masyarakat Raja Ampat karena belum ada pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, seperti belum adanya sanitasi dan tempat pembuangan sampah di setiap rumah dan lingkungan.

c. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia penduduk lokal.

Sebagaimana daerah di Papua Barat lainnya, Kabupaten Raja Ampat juga dihadapkan pada persoalan rendahnya kualitas sumberdaya manusia. Rendahnya kualitas SDM terlihat dari banyaknya penduduk yang hanya berpendidikan sekolah dasar dan bahkan banyak di antaranya yang masih buta huruf. Kondisi ini diperparah dengan persaingan usaha yang tidak seimbang antara penduduk pribumi dengan warga pendatang. Implikasinya adalah semakin kronisnya persoalan pengangguran dan kemiskinan.

d. Masih rendahnya akuntabilitas dan responsivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Hal itu ditandai oleh rendahnya efektivitas layanan publik, adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah, dan lemahnya penegakan prinsip pembangunan berkelanjutan.

- 1) Rendahnya efektivitas layanan publik di Raja Ampat bukan hanya karena adanya hambatan dari kondisi geografis Raja Ampat yang berupa kepulauan dengan wilayah laut jauh lebih luas dari pada daratan dan jarak antar pulau saling berjauhan, tetapi juga keterbatasan sumberdaya yang dimiliki dan juga sistem layanan publik yang diterapkan belum sesuai dengan kondisi geografis. Contohnya adalah layanan puskesmas yang selama ini lebih banyak mengharapkan sikap proaktif masyarakat untuk bersedia datang dan berobat di puskesmas. Layanan keliling yang bersifat proaktif dari tenaga kesehatan untuk mendatangi kampung-kampung selama ini masih dilakukan sangat terbatas. Dengan kondisi geografis Raja Ampat sebenarnya yang lebih diperlukan adalah layanan yang bersifat keliling terutama untuk menjangkau daerah-daerah yang jauh dari fasilitas layanan kesehatan.
- 2) Rendahnya akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Raja Ampat juga ditandai oleh adanya kesenjangan pembangunan dan kemajuan ekonomi antar wilayah. Kota Waisai yang merupakan ibu kota Kabupaten Raja Ampat mengalami perkembangan yang sangat cepat dengan dukungan berbagai infrastruktur dasar dan fasilitas pelayanan publik yang lengkap, sementara masih banyak distrik lainnya yang kondisi infrastruktur dasarnya masih jauh dari kata memadai dan bahkan ada distrik yang sama sekali belum memiliki fasilitas pelayanan publik seperti sekolah dan puskesmas. Kesenjangan kondisi ini terjadi karena pelaksanaan pembangunan selama ini lebih banyak dikonsentrasikan pada wilayah-wilayah tertentu saja. Masih banyaknya wilayah yang belum tersentuh pembangunan sehingga kebutuhan dan permasalahan masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah itu masih terabaikan menjadi ukuran masih rendahnya akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.
- 3) Lemahnya penegakan prinsip pengelolaan sumberdaya secara berkelanjutan di Raja Ampat juga menjadi ukuran berikutnya dari rendahnya akuntabilitas pemerintah daerah. Banyaknya praktik pembalakan kayu secara ilegal, penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan racun, atau bahkan aktifitas penambangan di daerah konservasi merupakan bentuk-bentuk pelanggaran terhadap prinsip ramah lingkungan. Pelakunya, baik dari masyarakat Raja Ampat maupun dari luar daerah, semestinya dapat dikenai sanksi hukum. Namun hal itu tidak terjadi karena lemahnya penegakan hukum di Raja Ampat yang disebabkan oleh terbatasnya jumlah personel dan sarana pengawasan lingkungan. Selain itu, kurang sinergisnya upaya konservasi lingkungan dari pemerintah dan masyarakat juga turut menjadi penyebab lemahnya penegakan hukum. Meskipun sudah terdapat regulasi mengenai pembagian kawasan produksi dan konservasi di Raja Ampat, hal ini belum diketahui semua oleh masyarakat. Sebaliknya, sejumlah kawasan yang dinyatakan oleh masyarakat sebagai kawasan yang harus dilindungi atau dibatasi dari kegiatan eksploitasi belum dikuatkan secara formal melalui peraturan daerah.

e. Masih rendahnya disiplin dan etos kerja pegawai.

Penyebabnya adalah lemahnya pengawasan dan juga tidak adanya insentif bagi pegawai baik yang berbasis kinerja maupun yang merupakan bentuk kompensasi atas beban tugas yang diembannya, seperti ditempatkan di daerah pelosok. Hal ini juga memberikan kontribusi terhadap tidak efektifnya penyelenggaraan layanan publik.

f. Besarnya ancaman bencana alam tanpa disertai dengan kesiagaan penanggulangan yang memadai.

Berdasarkan peta kerawanan dan ancaman bencana pada tingkat nasional diketahui bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Raja Ampat merupakan kawasan rawan bencana. Beberapa jenis bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi di Kabupaten Raja Ampat di antaranya adalah gempa bumi dan tsunami, gelombang air pasang, angin kencang (puting beliung), abrasi, dan tanah longsor. Besarnya ancaman bencana ini belum diimbangi dengan kapasitas yang memadai dari pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Raja Ampat baru dibentuk pada 2011. Sebagai sebuah lembaga baru, BPBD belum didukung oleh sumberdaya, baik SDM, sarana dan prasarana,

informasi, maupun teknologi, yang memadai dari aspek kuantitas maupun kualitas. Kapasitas kelembagaan BPBD Kabupaten Raja Ampat masih perlu ditingkatkan untuk mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya baik pada saat sebelum, ketika terjadi, maupun setelah terjadinya bencana untuk berbagai jenis bencana. Ketidaksiapan juga terjadi di level masyarakat.

Informasi seperti daerah rawan bencana, jenis bencana, risiko, serta langkah-langkah untuk mengantisipasi dan menyelamatkan diri ketika bencana terjadi belum diketahui secara memadai oleh masyarakat. Masyarakat juga belum memiliki kelembagaan yang tanggap dan tangguh untuk menanggulangi bencana.

g. Ancaman kerusakan lingkungan kawasan bahari dan keanekaragaman hayati sebagai akibat dari aktifitas yang tidak ramah lingkungan.

Berkembangnya suatu daerah selalu diikuti oleh meningkatnya aktifitas masyarakat baik yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas lingkungan. Apalagi potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Raja Ampat berupa kandungan sumberdaya mineral dan minyak, sumberdaya kelautan, dan keindahan alam. Berbagai macam potensi tersebut dapat mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat apabila aktifitas pengelolaannya dilakukan secara serasi, seimbang serta berwawasan lingkungan. Namun sebaliknya, apabila pengelolaannya lebih diorientasikan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang besar secara cepat tanpa memperhatikan risiko kerusakan alam maka pembangunan tidak akan berkelanjutan dan justru akan menyisakan banyak persoalan. Aktifitas yang secara langsung berpengaruh terhadap kondisi lingkungan di kawasan wisata bahari di antaranya adalah meningkatnya intensitas lalu lintas laut, penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan racun, serta pembuangan sampah dalam berbagai bentuk oleh masyarakat maupun wisatawan. Sedangkan aktifitas yang tidak secara langsung berpengaruh terhadap kawasan wisata bahari, diantaranya yaitu aktifitas pembangunan di daratan yang berdampak langsung pada kerusakan laut seperti pembangunan infrastruktur di pesisir yang tidak memperhatikan kawasan konservasi laut, penambangan di kawasan hutan lindung yang dapat menyebabkan erosi dan kerusakan kawasan wisata bahari, serta *illegal logging*. Berbagai aktifitas tersebut akan memberikan tekanan terhadap kondisi lingkungan yang selanjutnya dapat menurunkan kualitas dan daya tarik sebuah kawasan.

3.3. Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan permasalahan pembangunan di atas maka berikut ini dirumuskan sejumlah isu-isu pembangunan yang dinilai strategis, yaitu yang mampu menjadi solusi berjangka panjang atas sejumlah permasalahan yang ada, memiliki dampak besar apabila dilakukan, memerlukan dukungan sumberdaya yang besar, serta memerlukan keterlibatan banyak aktor dan pemangku kepentingan.

- a. Pengembangan pariwisata yang berbasis potensi sumberdaya alam Ampat untuk mendorong kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan aspek keseimbangan ekologis, sosiologis dan kemanfaatan secara ekonomi yang berorientasi pada prinsip keberlanjutan.
- b. Penanggulangan kemiskinan melalui perumusan dan implementasi kebijakan pembangunan secara sinergis antar sektor dan antar kawasan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha ekonomi produktif yang berbasis pada potensi dan keunggulan lokal terutama bagi penduduk lokal.
- c. Pengembangan infrastruktur dasar dan sarana prasarana di setiap wilayah secara proporsional dalam rangka menyediakan pelayanan publik yang berkualitas dan dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
- d. Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan melalui peningkatan kapasitas aparatur, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat terutama dalam penyelenggaraan layanan publik dan penanggulangan bencana.
- e. Pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat dari kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang tidak tepat melalui peningkatan kapasitas pemerintah dalam perumusan dan implementasi kebijakan pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan serta mengaktualisasi kearifan lokal masyarakat yang fungsional dalam memelihara kelestarian lingkungan.

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

Berdasarkan elaborasi terhadap potensi dan peluang yang dimiliki serta identifikasi permasalahan-permasalahan pembangunan baik yang dihadapi saat ini maupunantisipasi permasalahan di masa depan, dirumuskanlah visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Raja Ampat. Visi merupakan kondisi masa depan yang diharapkan dapat terwujud pada akhir periode perencanaan jangka panjang 20 tahun. Visi bukan hanya mimpi tetapi suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu rumusan visi kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang menjadi panduan bagi para pelaku pembangunan dalam merumuskan dan mewujudkan agenda-agenda pembangunan. Selanjutnya pada bagian ini diuraikan konsepsi visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Raja Ampat.

4.1. Visi

Berdasarkan kondisi dan potensi yang ada di masyarakat, lingkungan sosial, dan lingkungan hidup serta mempertimbangkan tantangan yang dihadapi dalam dua puluh tahun mendatang, maka visi pembangunan Kabupaten Raja Ampat tahun 2011-2030 adalah :

“Raja Ampat sebagai Kabupaten Bahari yang Mandiri, Adil dan Makmur, serta Berkelanjutan”

Rangkaian kata sebagaimana terumus menjadi visi Kabupaten Raja Ampat masing-masing mengandung makna yang merefleksikan harapan masyarakat kabupaten Raja Ampat. Harapan-harapan tersebut tentunya juga mengacu pada esensi tujuan pembangunan nasional sebagaimana tercantum Pembukaan Undang-undang 1945 maupun dokumen perencanaan jangka panjang nasional yakni Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Meskipun bersifat jangka panjang namun visi pembangunan tetap harus dapat diukur untuk dapat mengetahui capaiannya dari periode ke periode. Oleh karena itu Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Raja Ampat dijelaskan dengan ruang lingkup sebagai berikut :

Kabupaten Bahari.

Merujuk pada kondisi di mana laut menjadi pilar utama dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Manivestasi dari terwujudnya Kabupaten Bahari ditandai dengan berkembangnya nilai-nilai dasar masyarakat yang menempatkan laut sebagai sumber kehidupan. Nilai-nilai dasar tersebut tercermin dari kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan, mengelola, dan sekaligus melindungi sumberdaya laut. Visi Kabupaten Bahari didukung oleh realitas bahwa 85 persen (delapan puluh lima persen) wilayah Raja Ampat merupakan laut yang sangat kaya akan berbagai keragaman hayati.

Mandiri.

Kemandirian pada hakikatnya adalah kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Kemandirian bukanlah kemandirian dalam keterisolasian. Dalam visi pembangunan Kabupaten Raja Ampat, kemandirian dimaknai sebagai kondisi di mana pemerintah dan masyarakat Kabupaten Raja Ampat memiliki kedaulatan, kapasitas, posisi tawar, dan daya saing dalam memajukan kehidupan ekonomi, sosial, politik, dan budaya masyarakat. Dengan demikian, meskipun merupakan salah satu kabupaten yang baru terbentuk pasca reformasi, Kabupaten Raja Ampat dapat disejajarkan dengan kabupaten-kabupaten lain di Indonesia. Menguatnya kemandirian juga ditandai dengan semakin meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan, pemerintahan, dan penyediaan layanan publik yang berkualitas serta dapat diakses oleh masyarakat.

Adil dan Makmur.

Keadilan dan kemakmuran harus tercermin pada semua aspek kehidupan. Visi Kabupaten Raja Ampat untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur memiliki arti bahwa seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf kehidupan; memperoleh lapangan pekerjaan; mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan; mengemukakan pendapat; melaksanakan hak politik; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum. Dengan demikian, Raja Ampat yang adil dan makmur berarti suatu kondisi di mana kebutuhan seluruh masyarakat sudah terpenuhi tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.

Berkelanjutan.

Secara umum dimaknai sebagai pembangunan yang mampu merespon tantangan persoalan pada masa kini namun tidak mengganggu kebutuhan generasi masa mendatang. Dalam hal ini konsep berkelanjutan tidak semata-mata terkait dengan persoalan kelestarian ekologis melainkan juga keseimbangan dan keselarasan antara pembangunan sosial ekonomi yang maju dan lingkungan yang terpelihara sehingga dapat terus menerus menopang pembangunan. Upaya menciptakan pembangunan yang berkelanjutan juga turut ditopang dengan berperannya kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan. Keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan tercermin dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat secara terus menerus dengan memperhatikan keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan.

4.2. Misi

Guna mewujudkan visi pembangunan jangka panjang sebagaimana dikemukakan di atas, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menetapkan 4 (empat) misi pembangunan yaitu :

- a. Mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
- b. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
- c. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.
- d. Mengembangkan ekonomi kelautan secara berkelanjutan yang ditopang oleh potensi ekonomi lainnya berbasis masyarakat.

4.2.1. Mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan Sebagai Kabupaten yang masih relatif baru, Raja Ampat harus bergegas mengejar ketertinggalannya dari daerah-daerah lain melalui upaya percepatan dan pemerataan pembangunan. Upaya tersebut sangat dipengaruhi terutama oleh ketersediaan infrastruktur dasar seperti transportasi, energi, dan komunikasi, maupun infrastruktur pelayanan publik terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.

Pemenuhan kebutuhan infrastruktur harus diletakkan dalam kerangka menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, ekologi, dan sosial budaya. Oleh karena itu, upaya percepatan pembangunan harus dilandaskan pada sistem perencanaan dan skema-skema kebijakan yang tidak hanya mampu mengantisipasi dilema persoalan spasial dan sektoral, melainkan juga mampu mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat dan mengantisipasi ancaman-ancaman degradasi lingkungan baik yang disebabkan oleh bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia.

4.2.2. Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Sumberdaya manusia merupakan faktor penting dan menentukan keberhasilan pembangunan. Dalam era otonomi daerah seperti sekarang ini, kemajuan pembangunan suatu daerah sangat ditentukan oleh sumberdaya manusia yang dimiliki, baik dari sisi aparatur pemerintah maupun masyarakat, sebagai penggerak dan pelaku pembangunan. Di samping ditujukan untuk menghasilkan para pelaku pembangunan yang sehat, terampil, terdidik, kreatif, dan berwawasan luas, pembangunan SDM Kabupaten Raja Ampat juga diorientasikan untuk menghasilkan individu-individu yang memiliki jati diri dan karakter yang kuat, toleran, jujur, dan bertanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungannya.

Sebagai kabupaten bahari, pembangunan SDM di Kabupaten Raja Ampat juga ditekankan pada upaya menumbuhkan kapasitas SDM yang berwawasan bahari sehingga mampu menjadi penggerak pembangunan yang bertumpu pada sektor kelautan sebagai ciri khas dan keunggulan komparatif Kabupaten Raja Ampat.

4.2.3. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Sebagai motor penggerak pembangunan pemerintah memiliki peran sangat strategis dalam menentukan arah dan keberhasilan pembangunan. Sehingga terselenggaranya pemerintahan yang profesional dan akuntabel menjadi kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi guna menjamin keberhasilan pembangunan. Pemerintahan yang akuntabel adalah pemerintahan yang peka dan responsive terhadap dinamika kebutuhan dan persoalan masyarakat. Sementara pemerintahan yang profesional adalah pemerintahan yang mampu menjalankan peran dan fungsinya secara efektif sehingga dapat menjalankan amanat rakyat dengan sebaik-baiknya. Termasuk dalam ukuran pemerintahan yang efektif dalam hal ini adalah pemerintahan yang tidak menciderai kepercayaan masyarakat dengan. Praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sebagai kabupaten yang masih relatif baru, penataan pemerintahan menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Raja Ampat. Guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan profesional, upaya meningkatkan kapasitas pemerintahan di tekankan pada pembenahan kelembagaan dan penguatan kapasitas aparatur.

4.2.4. Mengembangkan Ekonomi Kelautan Secara Berkelanjutan yang Ditopang Oleh Potensi Ekonomi Lainnya Berbasis Masyarakat Sebagai Kabupaten Bahari, potensi unggulan perekonomian Kabupaten Raja Ampat adalah sektor kelautan. Pengembangan sektor ekonomi kelautan tidak hanya diarahkan melalui eksploitasi sumberdaya perikanan dan hasil laut lainnya tetapi yang paling utama adalah melalui sektor pariwisata, sehingga upaya menjaga kelestarian lingkungan menjadi prinsip dasar pengelolaan potensi kelautan. Pengembangan sektor unggulan ini juga dilakukan dengan prinsip mengedepankan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha. Untuk itu pemerintah berperan aktif dalam memfasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat, dan pada saat yang sama mendorong iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha. Pengembangan ekonomi Kabupaten Raja Ampat juga ditopang oleh sektor-sektor ekonomi lainnya seperti pertanian, perdagangan dan jasa, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

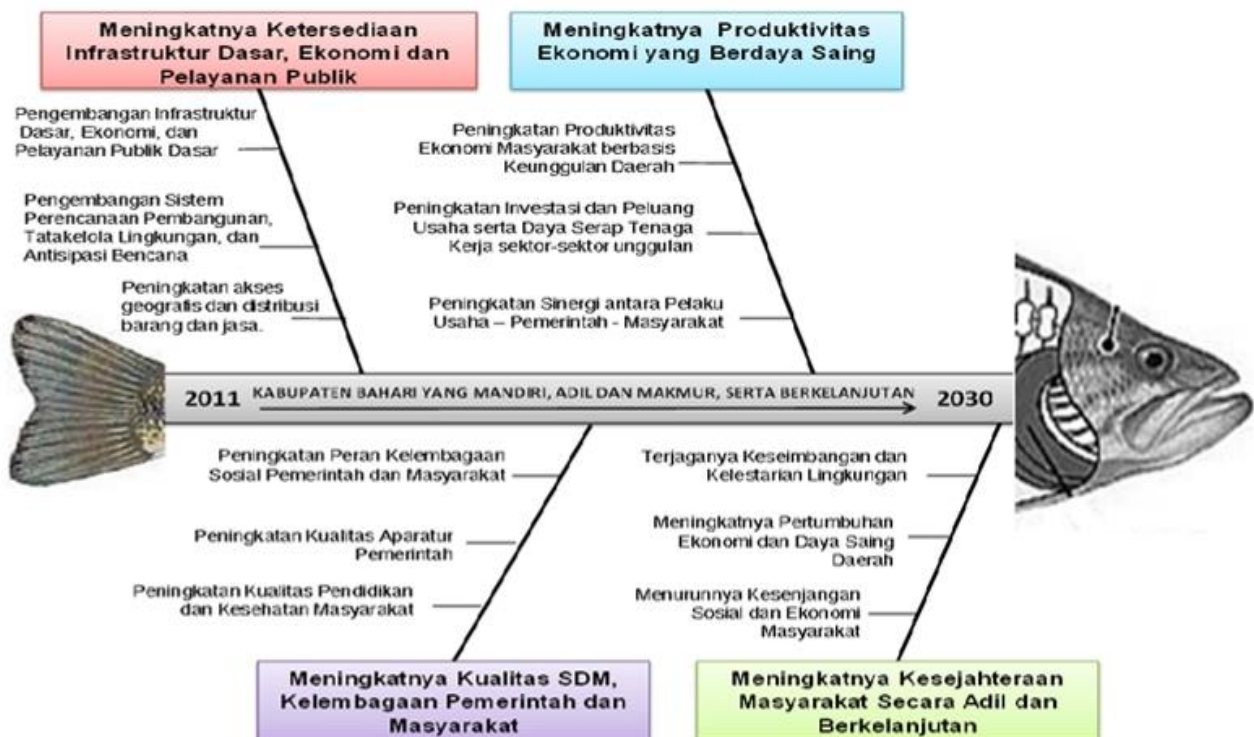
BAB V SASARAN, ARAH KEBIJAKAN, DAN PRIORITAS TAHAPAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Rumusan visi dan misi yang telah ditetapkan perlu diperjelas dengan menentukan sasaran pokok, arah kebijakan, dan prioritas tahapan untuk mencapainya. Bab V memaparkan ketiga hal itu secara komprehensif dan berurutan. Sasaran pokok merupakan kondisi yang menjadi target untuk diwujudkan dari setiap misi yang telah ditetapkan selama 20 tahun ke depan. Sedangkan arah kebijakan adalah strategi yang relevan untuk diterapkan dalam rangka mencapai setiap sasaran pokok. Agar pencapaian sasaran pokok lebih realistis, sistematis, dan berkesinambungan untuk dicapai maka pada bagian terakhir Bab ini dipaparkan tahapan pencapaian yang berisi capaian-capaian yang diprioritaskan dari setiap tahapan pembangunan lima tahunan.

5.1. Sasaran dan Arah Kebijakan

Dari setiap misi pembangunan jangka panjang ditetapkan sejumlah sasaran. Sasaran di sini adalah target capaian untuk diwujudkan selama 20 tahun ke depan yaitu hingga 2030. Masing-masing sasaran perlu dipastikan untuk dapat terwujud maksimal pada tahun ke-20 tersebut. Karena itu diperlukan arah kebijakan yang memberikan kejelasan orientasi sekaligus strategi untuk mencapai sasaran. Arah kebijakan juga menunjukkan suatu upaya yang dapat berupa tahapan yang simultan tetapi juga dapat dilakukan beriringan sebagai sebuah langkah sinergis. Pada bagian di bawah ini diuraikan sasaran dari setiap misi yang diikuti oleh arah kebijakan masing-masing.

Gambar 5.1. Tahapan dan Prioritas Capaian Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011-2030



5.1.1. Misi Pertama : Mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Sebagai daerah otonom yang masih relatif baru, Kabupaten Raja Ampat masih dilingkupi oleh berbagai keterbatasan di tengah keberlimpahan potensi sumberdaya alam yang dimiliki. Salah satu faktor utama yang menjadi kendala adalah keterbatasan infrastruktur. Karakter geografis yang berupa gugusan kepulauan berimplikasi pada pengembangan infrastruktur dasar di kawasan Raja Ampat yang membutuhkan biaya yang sangat tinggi dan menghadapi tingkat kesulitan teknis yang juga tinggi. Di sisi lain, penyediaan infrastruktur dasar seperti transportasi, energi, dan komunikasi maupun infrastruktur pelayanan publik mutlak diperlukan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan. Terkait dengan percepatan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan, ada 3 (tiga) sasaran yang hendak dicapai yaitu :

- (i) tersedianya infrastruktur dasar yang mendukung percepatan dan pemerataan pembangunan;
- (ii) tersedianya infrastruktur pelayanan publik dasar khususnya pendidikan dan kesehatan secara proporsional, berkualitas dan dapat diakses masyarakat; dan
- (iii) tersedianya sistem perencanaan dan kebijakan dasar pembangunan yang mampu mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan secara berkelanjutan.

5.1.1.1. Tersedianya Infrastruktur Dasar yang Mendukung Percepatan dan Pemerataan Pembangunan

Ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai merupakan prasyarat utama bagi upaya percepatan dan pemerataan pembangunan. Dalam konteks Raja Ampat sebagai kabupaten yang masih relatif baru, percepatan pembangunan infrastruktur terutama ditekankan pada infrastruktur dasar yakni transportasi, energi, komunikasi, air bersih serta infrastruktur perekonomian. Pencapaian sasaran ini antara lain ditunjukkan dengan adanya sistem perencanaan pengembangan infrastruktur yang mampu merespon kebutuhan masyarakat, mengintegrasikan pendekatan spasial dan sektoral, sehingga keterisolasian daerah dapat diminimalisasi, dan pelayanan publik dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dengan lebih mudah. Untuk mencapai sasaran tersebut kebijakan yang diambil diarahkan untuk :

- (i) mendorong kerjasama antar daerah dan sinergi lintas sektor dalam penyediaan infrastruktur dasar pembangunan;
- (ii) meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar seperti jaringan energi, jaringan transportasi, jaringan komunikasi, dan infrastruktur perekonomian;
- (iii) meningkatkan ketersediaan infrastruktur fisik pemerintahan seperti gedung perkantoran untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah.

5.1.1.2. Tersedianya infrastruktur pelayanan publik dasar khususnya pendidikan dan kesehatan secara proporsional, berkualitas dan dapat diakses masyarakat.

Salah satu indikator yang kerap digunakan dalam mengukur keberhasilan pembangunan adalah terselenggaranya pelayanan publik dasar yang semakin merata dan berkualitas. Pelayanan publik dasar dalam hal ini khususnya terkait dengan sektor pendidikan dan kesehatan. Kedua bidang tersebut merupakan variabel-variabel utama dalam pengukuran indeks pembangunan manusia.

Guna mendukung keberhasilan pembangunan di kedua bidang tersebut, penyediaan infrastruktur pelayanan publik dasar seperti gedung sekolah, puskesmas, rumah sakit, dan berbagai infrastruktur penunjang terselenggaranya pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan, perlu terus diupayakan. Penyediaan infrastruktur pelayanan dasar tersebut tentunya tidak dapat dilakukan secara serentak pada saat bersamaan mampu menjangkau seluruh kawasan Raja Ampat, melainkan dilakukan secara bertahap dengan tetap memperhatikan variasi kebutuhan masyarakat. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, kebijakan yang diambil diarahkan untuk :

- (1) Meningkatkan ketersediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan di seluruh distrik secara proporsional;
- (2) Mendorong terbangunnya sentra-sentra pelayanan yang berkualitas dan dapat diakses oleh masyarakat daerah-daerah tertinggal dan terisolir;
- (3) Mendorong tersedianya fasilitas pelayanan yang mampu menyelenggarakan pelayanan melalui sistem “jemput bola”.

5.1.1.3. Tersedianya sistem Perencanaan dan Kebijakan Dasar Pembangunan yang Mampu Mendorong Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan secara Berkelanjutan.

Salah satu tantangan terberat yang dihadapi dalam proses pembangunan adalah memastikan terselenggaranya pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan dalam hal ini dimaknai sebagai pembangunan yang berorientasi mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keselarasan sosial budaya, dan kelestarian lingkungan. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan tercermin dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat secara terus menerus dari generasi ke generasi dengan daya dukung lingkungan yang selalu terpelihara. Untuk mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan yang akan dilakukan adalah meningkatkan **tata kelola sumberdaya alam dan lingkungan** yang mencakup :

- (i) sistem perencanaan dan penataan wilayah yang mensinergikan kepentingan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan;
- (ii) pengembangan skema kebijakan pembangunan yang mengintegrasikan pendekatan sektoral dan spasial;
- (iii) pengembangan skema kebijakan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memperhatikan keselarasan sosial budaya dan kelestarian lingkungan. Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut di atas, berikut ini adalah target dan capaian berdasarkan tahapan pembangunan.

Tabel 5.1. Target dan Tahapan Capaian Misi 1 : Mewujudkan Percepatan dan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan dan berkelanjutan

RPJMD Ke-1 (2011-2015)	RPJMD Ke-2 (2016-2020)	RPJMD Ke-3 (2021-2025)	RPJMD Ke-4 (2026-2030)
<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya master plan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang lebih komprehensif. • Mulai terbangunnya jaringan infrastruktur transportasi, energi, komunikasi, dan air bersih. • Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pelayanan publik dasar khususnya bidang kesehatan dan pendidikan di berbagai distrik. • Meningkatnya ketersediaan gedung-gedung perkantoran dan pemerintahan dari kabupaten hingga distrik. • Tersedianya basis data dan informasi kerawanan bencana dan mulai terbangunnya sarana tanggap bencana. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya ketersediaan infrastruktur transportasi, energi, komunikasi, dan air bersih. • Meningkatnya ketersediaan infrastruktur ekonomi termasuk infrastruktur sektor pertanian. • Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pelayanan publik khususnya bidang kesehatan dan pendidikan. • Meningkatnya ketersediaan gedung-gedung perkantoran dan pemerintahan. • Meningkat dan terpeliharanya sarana tanggap bencana. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meratanya ketersediaan jaringan infrastruktur dasar yang ditandai dengan semakin terbukanya isolasi fisik kewilayahan. • Semakin meningkatnya ketersediaan maupun kualitas jaringan infrastruktur ekonomi, pertanian dan sektor-sektor lainnya secara proporsional. • Tersedianya fasilitas layanan publik yang semakin merata dan berkualitas. • Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan • Terpeliharanya sarana tanggap bencana. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyempurnaan sarana prasarana pelayanan publik dan infrastruktur sebagai pendukung optimalisasi pembangunan ekonomi berbasis kelautan yang lebih produktif dan berdaya saing. • Semakin meningkatnya kualitas, efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi yang semakin berkembang. • Terwujudnya lingkungan perkotaan dan perdesaan yang sesuai dengan standar kehidupan yang baik, berkelanjutan, serta mampu memberikan kemakmuran masyarakat.

5.1.2. Misi Kedua : Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Sumberdaya manusia merupakan faktor penting dan menentukan tingkat keberhasilan pembangunan. Jumlah sumberdaya manusia yang besar belum tentu menjadi kekuatan bagi pembangunan bahkan jumlah yang besar sering menjadi kendala dan bahkan menjadi ancaman bagi keberhasilan pembangunan apabila sumberdaya manusia yang ada tidak berkualitas. Dari segi jumlah, sumberdaya manusia di Raja Ampat dapat dikatakan relatif sedikit dan tersebar di 24 distrik. Kondisi ini jelas mempunyai pengaruh terhadap proses pembangunan.

Sementara dari sisi kualitas, sumberdaya manusia di Kabupaten Raja Ampat juga masih cukup rendah. Hal ini terlihat dari tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat yang masih cukup rendah. Dari segi kesehatan, sumberdaya manusia di daerah ini juga relative masih perlu ditingkatkan. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia juga dapat dilihat dari tingkat produktivitas masyarakat, kondisi ini dapat dilihat pada

masih banyaknya potensi sumberdaya alam yang belum dapat dimanfaatkan dengan baik. Indikator penting yang sering dipergunakan untuk mengukur kualitas sumberdaya manusia adalah Indek Pembangunan Manusia (IPM). Gambaran IPM sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 masih menunjukkan angka yang lebih rendah bila dibandingkan dengan IPM Propinsi Papua barat, yakni 62,47 dan 63,57 pada tahun 2007 dan 2008, dan 64,08 pada tahun 2009. Sementara IPM untuk Propinsi Papua Barat berturut-turut mulai tahun 2007 sampai tahun 2009 adalah 67,28, 67,95 dan 68,58. Untuk mewujudkan Misi 2, ada 5 (lima) sasaran yang ingin dicapai yaitu :

- (i) meningkatnya tingkat pendidikan dan ketrampilan penduduk;
- (ii) meningkatnya derajat kesehatan penduduk;
- (iii) terjaminnya keadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta terjaminnya perlindungan anak;
- (iv) meningkatnya jiwa kewirausahaan; dan
- (v) terciptanya peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial.

5.1.2.1. Meningkatnya derajat pendidikan dan ketrampilan penduduk

Kondisi yang diharapkan melalui sasaran ini adalah meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat secara merata di semua distrik yang ada di Kabupaten Raja Ampat yang ditandai dengan tingginya angka partisipasi sekolah untuk semua jenjang pendidikan, meningkatnya angka melek huruf, meningkatnya penduduk yang mengikuti pendidikan non formal sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, terbentuknya Balai Latihan Kerja sebagai tempat untuk mempersiapkan tenaga kerja yang trampil dan kreatif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, dan terciptanya sumberdaya manusia yang handal yang mempunyai karakter dan sikap mental yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Arah kebijakan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut meliputi :

- (i) meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan tuntutan kebutuhan pembangunan daerah melalui jalur pendidikan formal dan non formal;
- (ii) mengembangkan kurikulum muatan lokal yang berorientasi pada pengembangan wawasan dan keterampilan kebaharian dan manajemen bencana;
- (iii) meningkatkan kualitas tenaga pengajar pada semua jenis dan jenjang pendidikan di semua distrik di wilayah Kabupaten Raja Ampat;
- (iv) meningkatkan kualitas sarana pendidikan untuk semua jenis dan jenjang pendidikan;
- (v) meningkatkan perluasan pendidikan anak usia dini dalam rangka mengembangkan sikap, nilai-nilai, pengetahuan dan daya cipta berdasarkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya lokal;
- (vi) meningkatkan kerjasama antar lembaga pendidikan, dunia usaha maupun dunia industri dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui penelitian dan pengembangan; dan
- (vii) meningkatkan pengembangan pendidikan kejuruan yang berorientasi pada sektor kelautan, perikanan dan pariwisata.

5.1.2.2. Meningkatnya derajat kesehatan penduduk

Kondisi yang diharapkan dari sasaran ini adalah terciptanya masyarakat yang sehat yang ditandai dengan tingginya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, angka kematian ibu dan angka kesakitan untuk beberapa jenis penyakit yang ada di Kabupaten raja Ampat. Disamping itu, derajat kesehatan masyarakat juga dapat dilihat dari perilaku hidup bersih dan sehat warga masyarakat. Hal ini terkait dengan tersedianya sarana sanitasi pada tingkat keluarga. Untuk mendukung sasaran tersebut, pelayanan kesehatan juga diharapkan menjadi semakin berkualitas yang ditandai dengan tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memadai dan merata di semua wilayah yang didukung dengan ketersediaan sumberdaya manusia di bidang kesehatan yang berkompeten.

Untuk mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan yang akan dilakukan meliputi :

- (i) meningkatkan kualitas dan pemerataan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- (ii) meningkatkan pemenuhan tenaga kesehatan yang profesional dan kompeten untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui rekrutmen dan penempatan tenaga medis sesuai dengan kebutuhan;
- (iii) meningkatkan pemahaman dan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat paada lingkup keluarga, institusi pendidikan dan institusi kesehatan yang berorientasi pada kepedulian lingkungan sehingga tumbuh dan berkembang menjadi sikap dan budaya yang melekat dalam kehidupan bersama;
- (iv) memberdayakan masyarakat agar mampu berperan aktif dalam peningkatan kesehatan lingkungan dan masyarakat; dan
- (v) mewujudkan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat secara bertahap.

5.1.2.3. Meningkatnya keadilan gender dan perlindungan anak.

Kondisi yang diharapkan dari sasaran ini adalah semakin meningkatnya kesempatan untuk berkembang bagi kaum perempuan di semua bidang dan instansi baik pemerintah maupun non pemerintah yang ditandai

dengan semakin tingginya kemampuan kaum perempuan, terbukanya kesempatan bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, serta semakin banyaknya model perencanaan pembangunan dan anggaran pembangunan yang sensitif gender.

Untuk mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan yang akan dilakukan meliputi :

- (i) meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan melalui peningkatan kapasitas perempuan pada aspek ekonomi, politik, sosial dan budaya;
- (ii) mengembangkan perencanaan pembangunan yang sensitif gender di semua sektor;
- (iii) mendorong berkembangnya lembaga-lembaga perempuan disemua wilayah di Kabupaten Raja Ampat; dan
- (iv) mengembangkan skema kebijakan perlindungan anak dalam rangka menciptakan generasi muda yang berkualitas.

5.1.2.4. *Meningkatnya jiwa kewirausahaan (entrepreneurship)*

Kondisi yang diharapkan dari sasaran ini adalah tumbuhnya jiwa kewirausahaan dan kreativitas masyarakat untuk membuka dan mengembangkan usaha, meningkatnya kemampuan masyarakat untuk menangkap peluang usaha, meningkatnya aktifitas ekonomi yang dapat memberikan nilai tambah bagi produksi lokal dan mampu menyerap tenaga kerja. Pengusaha kecil dan menengah juga diharapkan semakin meningkat kemampuannya dalam mengembangkan skala usaha yang didukung dengan terbukanya akses permodalan.

Untuk mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan yang akan dilakukan meliputi :

- (i) mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi masyarakat dan pelaku ekonomi skala usaha kecil dan menengah, melalui pengembangan potensi diri sehingga mempunyai kemampuan untuk menangkap dan mengembangkan peluang usaha; dan
- (ii) mengembangkan iklim usaha yang kondusif berbasis keunggulan lokal di setiap wilayah melalui penyederhanaan perijinan, fasilitasi untuk memperoleh akses permodalan, serta pendampingan dan bimbingan teknis bagi pelaku usaha baru.

5.1.2.5. *Meningkatnya jaminan perlindungan dan kesejahteraan sosial masyarakat.*

Kondisi yang diharapkan dari sasaran ini adalah terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat yang ditandai dengan adanya kepastian jaminan sosial, bantuan sosial bagi pekerja dan kelompok masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana. Pencapaian sasaran ini juga ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya lembaga jaminan sosial berbasis masyarakat, tersedianya sistem koordinasi penanggulangan bencana di tingkat daerah, dan meningkatnya kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Untuk mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan yang akan dilakukan meliputi :

- (i) menyelenggarakan dan mengembangkan sistem jaminan sosial untuk masyarakat secara menyeluruh dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat;
- (ii) mengembangkan dan menyerasikan kebijakan untuk penanganan masalah-masalah strategis dalam bidang kesejahteraan sosial;
- (iii) meningkatkan kualitas manajemen dan sumberdaya manusia pelayanan kesejahteraan sosial;
- (iv) meningkatkan sinergi antar aktor (pemerintah, Lembaga Sosial Kemasyarakatan dan NGO) dalam pengelolaan masalah sosial.

Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut diatas, berikut ini adalah target dan capaian berdasarkan tahapan pembangunan.

Tabel 5.2. Target dan Tahapan Capaian Misi 2 : Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

RPJMD Ke-1 (2011-2015)	RPJMD Ke-2 (2016-2020)	RPJMD Ke-3 (2021-2025)	RPJMD Ke-4 (2026-2030)
<ul style="list-style-type: none"> • Terpenuhinya hak-hak warga masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik seperti pelayanan pendidikan dan kesehatan; • Tumbuhnya jiwa kewirausahaan di kalangan masyarakat; • adanya kebijakan pengarusutamaan gender di semua instansi dan semua distrik; • tersedianya data-data terkait dengan upaya meningkatkan kesejahteraan sosial; • adanya komitmen politik untuk meningkatkan anggaran kesejahteraan sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> • semakin tingginya tingkat pendidikan derajat kesehatan masyarakat ; • meningkatnya kesiapan masyarakat untuk memasuki pasar kerja dan mengembangkan usaha; • Terbukanya peluang berusaha dan kesempatan kerja; • semakin tingginya partisipasi wanita dalam pembangunan; • Terpenuhinya pemenuhan hak-hak anak; • Terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar PMKS; • Teroptimalisasinya sumber-sumber kesejahteraan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • semakin mantapnya kualitas sumberdaya manusia yang ditandai dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; • semakin tingginya produktivitas masyarakat; • menurunnya kesenjangan sosial ekonomi antara penduduk lokal dan pendatang; • meningkatnya kapasitas kaum perempuan dalam mendukung pembangunan; • menurunnya angka kemiskinan; • meningkatnya kualitas hidup PMKS; 	<ul style="list-style-type: none"> • Sumberdaya manusia semakin berkualitas dan berdaya saing yang ditandai dengan tingginya keterserapan tenaga kerja dan tumbuhnya usaha-usaha ekonomi produktif; • Semakin tingginya profesionalitas dan etos kerja masyarakat serta berintegritas sebagai pendukung utama pembangunan.

5.1.3. Misi Ketiga : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.

Pemerintah Kabupaten Raja Ampat memiliki peran yang strategis dalam penyelenggaraan pembangunan di Raja Ampat. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat berperan sebagai katalisator yang akan memberdayakan masyarakat dan berkolaborasi dengan dunia usaha dalam mengembangkan Raja Ampat sebagai Kabupaten Bahari. Keberhasilan dalam menjalankan peran strategis tersebut menjadi ukuran kinerja dari Pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Untuk memperbesar peluang keberhasilan dalam menjalankan perannya, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat akan berkonsentrasi pada pengembangan kapasitas di dua level, yaitu aparatur dan kelembagaan. Dalam penyelenggaraan misi ketiga ini terdapat dua sasaran pokok yang ditetapkan untuk dicapai selama 20 tahun ke depan, yaitu (i) meningkatnya akuntabilitas dan responsivitas Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam menyelenggarakan pemerintahan, dan (ii) meningkatnya profesionalitas aparatur Pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Berikut ini diuraikan arah kebijakan dari setiap sasaran tersebut.

5.1.3.1. *Meningkatnya akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam menyelenggarakan pembangunan*

Meningkatnya akuntabilitas ditandai dengan meningkatnya daya tanggap Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam mengelola dinamika persoalan sosial, politik, dan ekonomi baik yang berdimensi lokal maupun regional. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dinilai akuntabel bukan hanya semata dilihat dari kemampuannya menyelenggarakan pembangunan sesuai dengan rencana pengembangan sektoral dan spasial yang telah ditetapkan, tetapi juga dilihat dari kemampuannya sebagai katalisator dalam merespon dinamika persoalan dan kompleksitas kebutuhan masyarakat yang mengiringi kebutuhan untuk mewujudkan Raja Ampat sebagai Kabupaten Bahari.

Untuk mencapai sasaran pertama tersebut Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menetapkan arah kebijakan sebagai berikut yaitu :

- (i) membenahi kelembagaan pemerintah daerah melalui restrukturisasi kelembagaan untuk memastikan keberadaan setiap SKPD relevan dengan visi dan misi Kabupaten Raja Ampat serta memiliki struktur yang tepat, ramping, dan fungsional untuk mendukung SKPD dalam menjalankan mandate dan misinya;
- (ii) menyelenggarakan pembangunan secara lebih sistematis, holistik, partisipatif, dan efektif untuk mewujudkan Raja Ampat sebagai Kabupaten Bahari melalui penguatan sinergi antar lembaga pemerintah dan kolaborasi antara lembaga pemerintah dan nonpemerintah;
- (iii) mengurangi kesenjangan ketersediaan layanan publik antar distrik terutama di daerah-daerah terpencil dan terisolasi melalui pengembangan sentra pelayanan publik di sejumlah kawasan yang terjangkau, pada saat yang sama jangkauan pelayanan tetap terus diperluas;
- (iv) meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap dinamika kebutuhan dan permasalahan masyarakat melalui pengembangan sistem dan mekanisme pelayanan publik yang tepat, cepat dan efektif yang disesuaikan dengan kondisi Raja Ampat sebagai daerah kepulauan.

5.1.3.2. *Meningkatnya profesionalitas aparatur pemerintah.*

Profesionalitas aparatur menjadi salah satu faktor kunci penentu kinerja penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik. Meningkatnya profesionalitas aparatur Pemerintah Kabupaten Raja Ampat ditandai oleh meningkatnya kapasitas, kedisiplinan, dan kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Untuk mencapai sasaran ini ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut yaitu :

- (i) mengembangkan mekanisme rekrutmen aparat dan promosi jabatan yang bukan hanya mampu mengenali, menilai, dan mendapatkan calon pegawai dan pejabat yang memiliki kesediaan untuk mengabdikan diri dan mengembangkan diri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, tetapi juga mampu menjadi instrumen penguatan kohesivitas masyarakat Raja Ampat yang komposisinya sangat heterogen;
- (ii) mengembangkan mekanisme mutasi dan rotasi pegawai yang lebih berfungsi sebagai instrumen untuk memenuhi kebutuhan pegawai dan melakukan penataan pegawai terutama di distrik atau pulau yang terpencil agar penyelenggaraan pemerintahan di Raja Ampat lebih fungsional, bukan sebagai mekanisme untuk memberikan *punishment* terhadap pegawai seperti yang selama ini berlangsung;
- (iii) mengadopsi sistem pengembangan kapasitas dan keahlian paratur berbasis kebutuhan pengembangan institusi sehingga penyelenggaraan diklat dan pengiriman tugas belajar akan lebih efisien dan terarah dalam mendukung pengembangan institusi; dan
- (iv) mengembangkan sistem pemberian insentif berbasis kinerja dengan mempertimbangkan proporsionalitas antara dimensi personal pegawai dengan institusi, serta dimensi proses dengan hasil sehingga mampu memotivasi pegawai agar terus mengembangkan diri, memperbaiki kinerja personal, dan memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja institusi.

Termasuk di dalam komponen insentif ini adalah fasilitas dan dukungan pembiayaan khususnya bagi pegawai yang bertugas di daerah pelosok, seperti pulau yang relatif terisolir atau jauh dari pusat pemerintahan.

Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut diatas, berikut ini adalah target dan capaian berdasarkan tahapan pembangunan.

Tabel 5.3. Target dan Tahapan Capaian Misi 3 : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

RPJMD Ke-1 (2011-2015)	RPJMD Ke-2 (2016-2020)	RPJMD Ke-3 (2021-2025)	RPJMD Ke-4 (2026-2030)
<ul style="list-style-type: none"> • Tertatanya struktur Pemerintahan sehingga lebih fungsional untuk mendukung pencapaian Visi dan penyelenggaraan Misi Kabupaten Raja Ampat • Terisinya struktur jabatan oleh aparatur yang memiliki kompetensi yang sesuai. • Meningkatkan pemerataan sebaran aparatur penyelenggara layanan publik di Daerah. • Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pembangunan dan layanan publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya sinergis antara instansi Pemerintah dalam penyelenggaraan Misi dan pencapaian Visi • Meningkatnya akses masyarakat di Daerah terpencil terhadap layanan publik melalui pengembangan layanan keliling dan sentra-sentra layanan publik • Semakin meningkatnya jumlah aparatur dan pejabat dengan kapasitas yang memadai. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbangunnya kalaborasi antara Pemerintah dan actor-tingkatnya daya tanggap Pemerintah terhadap aktor nonpemerintah dalam penyelenggaraan layanan publik • Mulai terlembagakannya sistem evaluasi dan pemberian insentif berbasis kinerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya daya tanggap Pemerintah terhadap permasalahan dan kebutuhan masyarakat • Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan layanan publik dan pembangunan sebagai hasil dari berfungsi efektifnya sistem evaluasi dan pemberian insentif berbasis kinerja • Meningkatnya kapasitas penyelenggara Pemerintahan dalam mewujudkan Raja Ampat sebagai Kabupaten Bahari yang Mandiri, adil, dan makmur serta berkelanjutan

5.1.4. Misi Keempat : Mengembangkan Ekonomi Kelautan Secara Berkelanjutan yang Ditopang Oleh Potensi Ekonomi Lainnya Berbasis Masyarakat.

Pengembangan ekonomi kelautan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip keberlanjutan pembangunan daerah di masa mendatang. Pengembangan ekonomi kelautan akan menjadi lebih optimal bila ditopang oleh potensi ekonomi lainnya seperti pariwisata, pertanian, perkebunan, kehutanan serta industri dan perdagangan. Adanya dukungan potensi ekonomi lain akan meningkatkan nilai tambah, mutu dan perluasan pasar terhadap pengembangan ekonomi kelautan.

Untuk mewujudkan Misi 4, ada 3 (tiga) sasaran yang ingin dicapai yaitu :

- (i) meningkatnya kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya kelautan;
- (ii) meningkatnya kapasitas dan sinergi lembaga pengelola industri pariwisata; dan
- (iii) meningkatnya dukungan sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, serta industri dan perdagangan terhadap perekonomian daerah;
- (iv) Meningkatnya efektivitas penegakan prinsip pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan.

5.1.4.1. Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya kelautan

Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumberdaya kelautan perlu ditekankan pada keseimbangan antara dimensi ekologi, ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Dimensi ekologi ditandai dengan terjaganya kelestarian hasil laut, spesies dan ekosistem laut. Dimensi ekonomi ditandai dengan keberlanjutan produksi ekonomi kelautan yang bervariasi dan berdaya saing tinggi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Dimensi sosial budaya ditandai dengan masyarakat sebagai sebuah sistem yang di dalamnya mencakup pelestarian terhadap nilai budaya, aturan lokal, pengetahuan, dan kohesivitas sosial dalam rangka mentaati norma-norma sosial yang berlaku dilingkungan masyarakat yang berbasis kelautan. Terjadinya keseimbangan dimensi ekologi, ekonomi dan sosial budaya masyarakat dalam peningkatan kapasitas masyarakat menjadi sebuah manifestasi budaya bahari dan pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk mencapai sasaran peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumberdaya kelautan, arah kebijakan yang akan dilakukan meliputi :

- (i) mengembangkan budaya bahari dengan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan, mengelola, dan sekaligus melindungi tambah komoditas unggulan; dan
- (ii) mendorong kerjasama ekonomi yang sumberdaya laut;
- (iii) meningkatkan produktivitas ekonomi rakyat yang berorientasi pada peningkatan nilai berorientasi pada peningkatan daya saing daerah.

5.1.4.2. Meningkatnya kapasitas dan sinergi lembaga pengelola industri pariwisata.

Sektor pariwisata diharapkan menjadi salah satu pilar bagi tumbuhnya perekonomian masyarakat di Raja Ampat. Hadirnya industri pariwisata diharapkan dapat terus memacu tumbuhnya industri-industri kreatif dan sekaligus sebagai motor untuk menghasilkan pendapatan daerah, meningkatnya penciptaan kesempatan kerja, menggerakkan sektor UMKM, dan meningkatnya nilai investasi di bidang pariwisata serta merangsang pembangunan di bidang infrastruktur yang pada akhirnya akan berujung pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Raja Ampat. Kemajuan industri pariwisata di Raja Ampat dapat berkembang dengan baik bila ada sinergi dan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha dan masyarakat. Adanya sinergi ditandai dengan meningkatnya aktifitas usaha masyarakat, meningkatnya kualitas wisata, terjaganya keberlanjutan destinasi pariwisata, dan terbukanya potensi wisata baru serta terjaganya asset wisata bahari. Oleh karena itu diperlukan penguatan kapasitas dan kemitraan guna meningkatkan partisipasi aktif dan sinergitas antara pemangku kepentingan dalam pengembangan industri pariwisata. Untuk mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan yang dilakukan meliputi :

- (i) menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat tentang kepariwisataan;
- (ii) meningkatkan kuantitas dan kualitas usaha masyarakat lokal di sektor pariwisata;
- (iii) mengembangkan kapasitas lembaga pengelola industri pariwisata berbasis masyarakat;
- (iv) mengembangkan kapasitas pengelolaan objek wisata dan diversifikasi atraksi wisata; dan
- (v) mengembangkan industri kreatif pariwisata berbasis masyarakat dan sumberdaya lokal.

5.1.4.3. Meningkatnya dukungan sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, serta industri dan perdagangan terhadap perekonomian daerah.

Meskipun Kabupaten Raja Ampat memiliki potensi sumberdaya alam terbesar di sektor kelautan, namun untuk beberapa wilayah mempunyai potensi besar untuk dikembangkan sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, serta industri dan perdagangan. Sektor-sektor tersebut memiliki peranan yang penting dalam aktifitas perekonomian daerah. Selain mampu menyerap banyak tenaga kerja, sektor-sektor tersebut juga mampu meningkatkan ketahanan pangan, kesejahteraan masyarakat, jenis unit usaha dan volume perdagangan, serta mampu mengurangi tingkat ketergantungan dengan daerah lain. Untuk mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan yang dilakukan meliputi :

- (i) mendorong pengembangan sentra usaha ekonomi untuk produk yang bernilai tambah seperti : industri berbasis agro, produk industri kecil dan mikro, serta produk dari sektor jasa dan perdagangan lainnya;
- (ii) peningkatan produktifitas sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan melalui pembinaan dan penyuluhan kelembagaan kelompok usaha, peningkatan kualitas SDM, penguasaan dan penggunaan teknologi tepat guna;
- (iii) pengembangan keanekaragaman produk melalui fasilitasi sarana produksi permodalan dan kemitraan; dan
- (iv) perluasan jangkauan pemasaran dan distribusi melalui peningkatan mutu dan daya saing produksi.

5.1.4.4. Meningkatnya efektivitas penegakan prinsip pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan.

Meningkatnya efektivitas penegakan prinsip pengelolaan sumberdaya alam di Raja Ampat ini ditandai oleh masyarakat untuk mengelola sumberdaya alam secara proporsional, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam sistem pengawasan, tidak adanya konflik atau tumpang tindih pemanfaatan lahan yaitu antara kawasan produksi dan kawasan konservasi, pembangunan yang memperhatikan analisis dampak lingkungan, serta meningkatnya penindakan terhadap pelaku pembalakan kayu, penangkapan ikan secara ilegal, dan pencemaran lingkungan. Untuk mencapai sasaran tersebut maka arah kebijakan yang perlu dikembangkan meliputi :

- (i) pengembangan sistem sumberdaya pengawasan yang memadai;
- (ii) sosialisasi regulasi yang mengatur tata guna lahan, penetapan kawasan konservasi, dan Tata Cara pengelolaan sumberdaya alam terhadap semua pemangku kepentingan terutama masyarakat;
- (iii) memberdayakan masyarakat untuk mengaktualisasi kearifan lokal yang relevan untuk menyelamatkan lingkungan; dan
- (iv) serta membangun sinergi antara pemerintah dengan aparat pemerintah dan masyarakat dalam sistem pengawasan pada sejumlah kawasan di Raja Ampat. Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut diatas, berikut ini adalah target dan capaian berdasarkan tahapan pembangunan.

Tabel 5.4. Target dan Tahapan Capaian Misi 4 : Mengembangkan Ekonomi Kelautan Secara Berkelanjutan yang Ditopang Oleh Potensi Ekonomi Lainnya Berbasis Masyarakat

RPJMD Ke-1 (2011-2015)	RPJMD Ke-2 (2016-2020)	RPJMD Ke-3 (2021-2025)	RPJMD Ke-4 (2026-2030)
<ul style="list-style-type: none"> • tersedianya <i>grand design</i> dan <i>road map</i> dalam mengelola sumber daya ekonomi perikanan, kelautan, pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan pariwisata secara lestari dan ramah lingkungan; • terciptanya keseimbangan antara dimensi ekologi, ekonomi dan sosial budaya masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya ekonomi lokal; • terciptanya kelestarian nilai-nilai dasar masyarakat yang menempatkan laut sebagai sumber kehidupan; • meningkatnya kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan, mengelola, dan sekaligus melindungi sumberdaya ekonomi lokal; • terbentuknya kelembagaan sosial dan ekonomi masyarakat (usaha mikro kecil dan menengah) yang berbasis sumberdaya ekonomi lokal. 	<ul style="list-style-type: none"> • berkembangnya kegiatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya ekonomi lokal masyarakat secara lestari dan ramah lingkungan; • meningkatnya produktivitas dan kemampuan masyarakat dalam memproduksi untuk memenuhi kebutuhan pokok berbasis potensi unggulan; • tumbuhnya industri-industri kreatif yang pada akhirnya penciptaan lapangan kerja meningkat; • semakin terbukanya peluang dan akses pasar bagi masyarakat; • sistem produksi dan distribusi yang semakin baik; • meningkatnya partisipasi aktif dan sinergitas antara pemangku kepentingan dalam pengembangan sumberdaya ekonomi lokal unggulan. 	<ul style="list-style-type: none"> • semakin meningkatnya kapasitas masyarakat dan lembaga pengelola sumberdaya ekonomi lokal; • semakin meningkatnya produktivitas dan kemampuan masyarakat dalam memproduksi untuk memenuhi kebutuhan pokok lokal dan regional berbasis potensi unggulan; • meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat; • semakin banyaknya tenaga kerja yang terserap yang ditandai dengan semakin tumbuh dan berkembangnya industri-industri kreatif berbasis masyarakat • meningkatnya sinergi antara pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha yang ditandai dengan semakin meningkatnya investasi, volume skala usaha masyarakat, destinasi wisata, jumlah dan waktu kunjungan wisatawan serta meningkatnya kerjasama ekonomi antar wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> • semakin meningkatnya kontribusi sumberdaya ekonomi lokal yang berdaya saing tinggi terhadap perekonomian daerah secara berkelanjutan; • semakin meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat yang dimbangi dengan menurunnya kesenjangan ekonomi antar masyarakat; • semakin meningkatnya jenis unit usaha industri kecil, menengah dan besar yang ditandai dengan meningkatnya volume perdagangan barang dan jasa; • semakin meningkatnya sinergi antarpelaku dalam pengelolaan sumberdaya ekonomi lokal yang kompetitif di tingkat nasional dan internasional

5.2. Tahapan dan Prioritas

Untuk mewujudkan sasaran pokok sebagaimana dimaksud di atas, pembangunan jangka panjang ini memerlukan tahapan dan prioritas yang akan menjadi target capaian dari setiap rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) yaitu RPJMD :

ke-1 tahun 2011-2015, RPJMD;

ke-2 tahun 2016-2020, RPJMD;

ke-3 tahun 2021-2025, dan RPJMD;

ke-4 tahun 2026-2030.

5.2.1. RPJMD Ke-1 (2011-2015)

Berdasarkan capaian pembangunan tahap sebelumnya, target capaian RPJMD tahap ke-1 ini adalah terbangunnya infrastruktur dasar dengan perencanaan yang mensinergikan dimensi spasial dan sektoral serta antisipatif terhadap bencana guna mendukung ketersediaan pelayanan publik, peningkatan kinerja pemerintah, dan pengembangan ekonomi. Tercapainya prioritas RPJMD tahap ke-1 ini ditandai dengan semakin terbukanya keterisolasian pulau-pulau yang terpencil, meningkatnya ketersediaan energi dan air bersih, lancarnya pendistribusian kebutuhan pokok masyarakat, dan meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan publik, dan tersedianya sistem penanggulangan bencana daerah.

5.2.2. RPJMD Ke-2 (2016-2020)

Berdasarkan capaian pembangunan tahap sebelumnya, target capaian RPJMD tahap ke-2 ini adalah meningkatnya kualitas SDM dan kapasitas kelembagaan guna membangun kemandirian daerah berbasis keunggulan lokal yang didukung oleh pemerintahan yang responsif. Tercapainya prioritas RPJMD tahap ke-2 ini ditandai dengan semakin meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, berkembangnya kelembagaan sosial dan ekonomi masyarakat yang memiliki budaya bahari, semakin terbukanya peluang berusaha dan kesempatan kerja, meningkatnya kemampuan masyarakat dalam berproduksi untuk memenuhi kebutuhan pokok, berkembangnya kegiatan ekonomi yang berbasis pada kelautan dan wisata bahari, meningkatnya kesadaran dan kesiapan baik masyarakat maupun pemerintah terhadap kondisi rawan bencana, dan meningkatnya daya tanggap dan kapasitas pemerintah terhadap penyelesaian masalah dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

5.2.3. RPJMD Ke-3 (2021-2025)

Berdasarkan capaian pembangunan tahap sebelumnya, target capaian RPJMD tahap ke-3 ini adalah meningkatnya produktivitas ekonomi yang berdaya saing berbasis keunggulan lokal guna meningkatkan kemakmuran masyarakat. Tercapainya prioritas RPJMD tahap ke-3 ini ditandai dengan semakin meningkatnya skala usaha masyarakat, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam produktivitas ekonomi, meningkatnya investasi daerah, meningkatnya sinergi antara pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha, meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat, meningkatnya destinasi wisata, serta meningkatnya jumlah dan waktu kunjungan wisatawan.

5.2.4. RPJMD Ke-4 (2026-2030)

Berdasarkan capaian pembangunan tahap sebelumnya, target capaian RPJMD tahap ke-4 ini adalah Meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan yang didukung oleh tata kelola pemerintahan efektif, profesional dan akuntabel guna terwujudnya visi Kabupaten Raja Ampat. Tercapainya prioritas RPJMD tahap ke-4 ini ditandai dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah, terpenuhinya kebutuhan masyarakat tanpa diskriminasi, menurunnya kesenjangan ekonomi antar kelompok masyarakat, serta terjaganya keseimbangan dan kelestarian lingkungan.

Tabel 5.5. Tahapan dan Prioritas RPJPD Kabupaten Raja Ampat

TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN	RPJMD Ke-1 (2011-2015)	RPJMD Ke-2 (2016-2020)	RPJMD Ke-3 (2021-2025)	RPJMD Ke-4 (2026-2030)
Target	terbangunnya infrastruktur dasar dengan perencanaan yang mensinergikan dimensi spasial dan sektoral serta antisipatif terhadap bencana guna mendukung ketersediaan pelayanan publik, peningkatan kinerja pemerintah, dan pengembangan ekonomi.	meningkatnya kualitas SDM dan kapasitas kelembagaan guna membangun kemandirian daerah berbasis keunggulan lokal yang didukung oleh pemerintahan yang responsif dan profesional	meningkatnya produktivitas ekonomi yang berdaya saing berbasis keunggulan lokal guna meningkatkan kemakmuran masyarakat	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan yang didukung oleh tata kelola pemerintahan efektif, profesional dan akuntabel guna terwujudnya visi Kabupaten Raja Ampat
Indikator	<ul style="list-style-type: none"> • semakin terbukanya keterisolasian pulau-pulau yang terpencil; • meningkatnya ketersediaan energi dan air bersih; • lancarnya pendistribusian kebutuhan pokok masyarakat; • meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan publik; • tersedianya sistem penanggulangan bencana • tersedianya skema pengelolaan sumberdaya dan sistem perencanaan pembangunan yang mensinergikan aspek ekologi, ekonomi, sosial dan budaya. 	<ul style="list-style-type: none"> • semakin meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat; • berkembangnya kelembagaan sosial dan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada pengembangan budaya bahari; • meningkatnya kemampuan masyarakat dalam berproduksi untuk memenuhi kebutuhan pokok; • berkembangnya kegiatan ekonomi yang berbasis pada kelautan dan wisata bahari; • meningkatnya kesadaran dan kesiapan baik masyarakat maupun pemerintah terhadap kondisi rawan bencana; • meningkatnya daya tanggap dan kapasitas pemerintah terhadap penyelesaian masalah dan pemenuhan kebutuhan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • semakin meningkatnya skala usaha masyarakat; • meningkatnya partisipasi masyarakat dalam produktivitas ekonomi; • meningkatnya investasi daerah; • meningkatnya sinergi antara pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha; • menurunnya kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat; • menurunnya angka kemiskinan; • meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat; • meningkatnya destinasi wisata, jumlah dan waktu kunjungan wisatawan. 	<ul style="list-style-type: none"> • semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah; • terpenuhinya kebutuhan masyarakat tanpa diskriminasi; • menurunnya kesenjangan ekonomi antar kelompok masyarakat; • terjaganya keseimbangan dan kelestarian lingkungan; • meningkatnya daya saing daerah

BAB VI
KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011-2030 merupakan pedoman pembangunan Kabupaten Raja Ampat yang mempunyai jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan arah kebijakan dalam RPJPD Kabupaten Raja Ampat tahun 2011-2030.
- b. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melalui Bappeda Raja Ampat perlu mensosialisasikan dokumen RPJPD Raja Ampat kepada seluruh pemangku kepentingan daerah sehingga sasaran pembangunan 20 (dua puluh) tahun dapat dilaksanakan dan selaras dengan pentahapan arah kebijakan pembangunan jangka menengah.
- c. Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berpedoman pada RPJPD Kabupaten Raja Ampat tahun 2011-2030.
- d. Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Raja Ampat tahun 2011-2030 didasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan yang inklusif, partisipatif, berkeadilan gender, dan berkelanjutan.
- e. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan capaian rencana pembangunan ini akan ditinjau secara berkala berdasarkan peraturan yang berlaku.

BUPATI RAJA AMPAT,
CAP/TTD
MARCUS WANMA